

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA DEPOK

TAHUN 2009



PEMERINTAH KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT



WALIKOTA DEPOK

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNYA, penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok 2009 telah dapat diselesaikan. Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok 2009 diharapkan dapat menjadi sumber informasi lingkungan hidup yang berperan penting dalam kegiatan sosialisasi kondisi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok.

Penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan kondisi lingkungan hidup merupakan bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan di Kota Depok. Hal tersebut terkait erat dengan Visi Kota Depok yaitu Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyambut baik dengan diterbitkannya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok Tahun 2009, karena pada era keterbukaan saat ini keberadaan buku SLHD Kota Depok juga merupakan salah satu langkah menuju *Good Environmental Governance* yang menuntut kemudahan mendapatkan informasi secara transparan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi lingkungan hidup.

Diharapkan dokumen SLHD Kota Depok 2009 dapat menjadi salah satu sarana dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup demi tercapainya kehidupan yang harmonis antara masyarakat dan lingkungan hidup di Kota Depok.

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Tujuan Penulisan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Depok	I-1
1.2. Isu lingkungan hidup	I-2
a. Isu lingkungan hidup utama	I-2
(1) Kependudukan	I-2
(2) Pemanfaatan ruang/lahan	I-3
(3) Transportasi	I-5
(4) Persampahan	I-6
b. Isu lingkungan hidup lain	I-9
(1) Layanan air bersih	I-9
(2) Daerah Rawan Banjir	I-9
(3) Program Adipura	I-10
BAB II. KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA	
A. LAHAN DAN HUTAN	II-1
1. Kondisi	II-1
1.1. Pemanfaatan lahan	II-1
1.1.1. Kawasan Perumahan	II-2
1.1.2. Kawasan Perdagangan dan Jasa	II-2
1.1.3. Kawasan Industri	II-3
1.1.4. Kawasan Hijau	II-4
1.1.5. Kawasan Khusus	II-5
1.1.6. Kawasan Pendidikan	II-5
1.1.7. Kawasan Potensial untuk Pariwisata	II-6
1.1.8. Kawasan Strategis Potensial	II-6
1.1.9. Kawasan Andalan sebagai Pusat Pertumbuhan	II-7
B. KEANEKARAGAMAN HAYATI	II-23
C. AIR	II-33
D. KUALITAS AIR SITU	II-50
D. UDARA	II-64
E. Laut, Pesisir dan Pantai	II-68
F. Iklim	II-68

**BAB III. TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN**

A. KEPENDUDUKAN	III-1
1. Jumlah Penduduk	III-1
2. Tekanan	III-7
3. Respon	III-9
B. PERMUKIMAN	III-9
1. Tekanan	III-9
2. Respon	III-11
C. KESEHATAN	III-14
D. PERTANIAN	III-15
E. INDUSTRI	III-17
F. PERTAMBANGAN	III-18
G. ENERGI	III-18
H. TRANSPORTASI	III-21
I. PARIWISATA	III-28
J. LIMBAH B3	III-28

BAB IV. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. REHABILITASI LINGKUNGAN	IV-1
B. AMDAL	IV-4
C. PENEGAKAN HUKUM	IV-5
D. PERAN SERTA MASYARAKAT	IV-6
1. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan	IV-6
2. Kegiatan Pengelolaan Situ-situ melalui Forum Komunikasi Masyarakat Situ (FKMS)	IV-7
E. KELEMBAGAAN	IV-7

DAFTAR PUSTAKA

1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penanganan Sampah Kota Depok	I-8
Tabel 2.1.	Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Depok 2000 – 2010	II-10
Tabel 2.2.	Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan di Kota Depok	II-10
Tabel 2.3.	Inventarisasi Kondisi Situ di Kota Depok	II-37
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Depok Tahun 1998–2008	III-2
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kota Depok	III-5
Tabel 3.3.	Penduduk Laki-Laki Menurut Kecamatan, dan Golongan Umur Kota Depok	III-6
Tabel 3.4.	Penduduk Perempuan Menurut Kecamatan, dan Golongan Umur di Kota Depok	III-6
Tabel 3.5.	Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan, dan Golongan Umur	III-6
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	III-6
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Jumlah Sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan	III-7
Tabel 3.8.	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Depok	III-8
Tabel 3.9.	Migrasi Selama Hidup Menurut Jenis Kelamin	III-8
Tabel 3.10.	Rencana dan Proyeksi Pemanfaatan Ruang 2005- 2025	III-11
Tabel 3.11.	Pentahapan Keluarga Sejahtera	III-14
Tabel 3.12.	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Sumber Air Minum	III-14
Tabel 3.13.	Jumlah Kelahiran dan Kematian Menurut Jenis Kelamin	III-14
Tabel 3.14.	Jumlah Kematian menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	III-15
Tabel 3.15.	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk	III-15
Tabel 3.16.	Kendaraan dan Bahan Bakar Kabupaten/ Kota /Provinsi: Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Tahun Data:	III-19
Tabel 3.17.	Jumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) Rata-rata Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kota: Depok, Tahun Data : 2009	III-20
Tabel 3.18.	Jumlah Rumah Tangga dan Penggunaan Bahan Bakar untuk Memasak, Kota: Depok Tahun Data: 2008	III-21
Tabel 3.19.	Panjang Jalan menurut Kewenangan Kabupaten/Kota /Provinsi: Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Tahun Data:	III-21
Tabel 3.20.	Volume Lalulintas dan V/C Ratio 10 Ruas Jalan di Kota Depok	III-24
Tabel 4.1.	Jenis Pemanfaatan Lahan di Kota Depok	IV-4
Tabel 4.2.	Dokumen AMDAL, UKL UPL yang telah mendapat Rekomendasi tahun 2008	IV-5
Tabel 4.3.	Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan di Kota Depok, tahun 2008	IV-7



Tabel 4.4.	Produk Hukum Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kota Depok	IV-8
Tabel 4.5.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok, tahun 2008	IV-8
Tabel 4.6.	Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Kota Depok, tahun 2008.	IV-9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Suasana dan kondisi TPA Cipayung yang nampak dipenuhi dengan timbunan sampah, hingga menutupi saluran air, dan adanya pemulung yang sedang memilah sampah (Agustus, 2009).	I-7
Gambar 1.2.	Unit Pengelola Sampah (UPS). Kondisi fisik UPS dan suasana pemilahan sampah di dalam UPS, yang dilakukan secara manual, kemudian digiling menggunakan mesin, dan hasil penggilingan sampah organik diolah menjadi pupuk yang kemudian dijual ke masyarakat (Agustus, 2009).	I-8
Gambar 2.1.	Perkembangan Pusat-pusat Pertumbuhan di Kota Depok	II-3
Gambar 2.2.	Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan di Kota Depok	II-11
Gambar 2.3.	Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002	II-12
Gambar 2.4.	Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004	II-13
Gambar 2.5.	Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002.	II-14
Gambar 2.6.	Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004	II-15
Gambar 2.7.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010	II-17
Gambar 2.8.	Inkonsistensi Pemanfaatan Lahan tahun 2004 menurut RTRW Kota Depok	II-18
Gambar 2.9.	Pemanfaatan Lahan tahun 2005 - 2006 menurut RTRW Kota Depok	II-19
Gambar 2.10:	Taman Hutam Rakyat di Wilayah Kota Depok.	II-31
Gambar 2.11.	Gambar Situ di Kecamatan Cimanggis	II-40
Gambar 2.12.	Gambar Situ di kecamatan Pancoran Mas	II-44
Gambar 2.13.	Gambar Situ di Kecamatan Sawangan	II-46
Gambar 2.14.	Gambar Situ di Kecamatan Beji	II-47
Gambar 2.15.	Gambar Situ di Kecamatan di Sukmajaya	II-49
Gambar 2.16.	Nilai pH di Beberapa Situ di Depok, 2009	II-50
Gambar 2.17.	Konsentrasi TDS dan TSS di Beberapa Situ di Depok, 2009	II-51
Gambar 2.18.	Konsentrasi Nitrat dan Nitrit di Beberapa Situ di Depok, 2009	II-52
Gambar 2.19.	Konsentrasi BOD, dan COD di Beberapa Situ di Depok, 2009	II-53
Gambar 2.20.	Konsentrasi Total Fosfat di Beberapa Situ di Depok, 2009	II-54



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Depok

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan mewujudkan akuntabilitas publik, Pemerintah Kota Depok memiliki kewajiban dalam hal penyediaan informasi yang terkait dengan kondisi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat. Informasi yang seharusnya menggambarkan kondisi lingkungan hidup, baik penyebab maupun dampak permasalahannya, serta respon pemerintah kota, masyarakat maupun pihak lainnya tersebut, menjadi sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk beserta kualitas dan aktivitasnya dan tekanan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sosial ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.

Pelaporan status lingkungan hidup yang merupakan sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menilai dan menentukan prioritas masalah, serta menentukan rekomendasi terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah kota dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki pemerintah daerah, Pemerintah Kota Depok perlu memiliki dan memanfaatkan data serta informasi multisektoral yang didukung oleh ketersediaan data serta analisisnya yang aktual dan akurat, serta penyajian informasi tentang lingkungan hidup yang informatif dan efektif. Kumpulan data dan informasi multisektoral serta analisisnya tersebut, selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Depok, yang disusun dan diterbitkan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagai Badan Publik, Pemerintah Kota Depok memiliki kewajiban dalam hal menyediakan, serta memberikan dan atau mempublikasikan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan dipublikasikan



tersebut, sebaiknya disampaikan secara berkala, mudah didapatkan, dan mudah dipahami.

Tujuan umum penulisan Laporan SLHD Depok adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data, informasi, dokumentasi, serta analisis secara lengkap dan aktual, yang terkait dengan seluruh kegiatan, khususnya yang menjadi isu lingkungan hidup utama di Kota Depok;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang kondisi lingkungan hidup di Kota Depok, sebagai bentuk dari akuntabilitas kepada masyarakat;
3. Menyediakan sumber informasi bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi Pemerintah Kota Depok, serta bagi investor yang ingin berinvestasi di Kota Depok;
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai landasan bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance), dan berperanserta dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan.



1.2. Isu lingkungan hidup

a. Isu lingkungan hidup utama

Pembangunan di Kota Depok telah menimbulkan beberapa isu lingkungan hidup utama, yang mengakibatkan dibutuhkan perubahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Beberapa isu lingkungan hidup utama tersebut adalah:

(1) Kependudukan

Menurut BPS Kota Depok (2008), jumlah penduduk di Kota Depok pada tahun 2008 mencapai 1.503.677 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 102 (laki-laki 780.092 jiwa dan perempuan 723.585 jiwa). Adapun laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3 %. Jumlah penduduk tertinggi dapat dijumpai di Kecamatan Cimanggis, dan terendah di Kecamatan Beji. Sementara itu, dilihat dari kepadatan penduduk di Kota Depok yang telah mencapai 7.507,49 orang/km², kepadatan tertinggi dapat dijumpai di Kecamatan Cimanggis dan terendah di Kecamatan Sawangan.



Berdasarkan Kota Depok dalam Angka, 2008, didapatkan data penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja sebesar 54,5% dan sisanya merupakan penduduk yang bukan angkatan kerja. Sebagian besar penduduk yang tergolong angkatan kerja, bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan persentase masing-masing 29,14% dan 27,79%. Status pekerjaan didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai 69,58%, dan berusaha sendiri 21,81%.

Berdasarkan data kependudukan Kota Depok seperti tersebut di atas, dapat diperkirakan bahwa implikasi dari jumlah tertinggi penduduk di Kecamatan Cimanggis adalah, jumlah permukiman di kecamatan tersebut yang tertinggi pula. Konsekuensi dari kondisi tersebut, di kecamatan tersebut dapat ditemukan pemanfaatan ruang/lahan untuk kawasan terbangun yang tertinggi pula. Pembangunan perumahan yang semakin meningkat akan mengakibatkan menurunnya ruang terbuka hijau, di mana setiap 5 tahun ruang terbuka semakin menurun. Demikian pula mengenai masalah persampahan di Kota Depok, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, jumlah sampah yang tidak terangkut semakin meningkat.

Selain itu, banyaknya permukiman di sekitar Kota Depok tersebut juga telah membuat bermunculan beberapa kegiatan aktifitas ekonomi di sektor non formal, misalnya warung-warung makanan, toko-toko dari berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk di Kota Depok yang muncul di pinggir jalan dan tekanan penduduk yang besar tersebut juga sering mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran dari sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk dan terganggunya ketertiban dan keamanan umum serta kemacetan lalu lintas.

(2) Pemanfaatan ruang/lahan

Luas wilayah Kota Depok berdasarkan undang-undang pembentukannya, yaitu UU No. 15 Tahun 1999, adalah 200,29 km². Kota Depok dialiri oleh sungai-sungai besar, yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6°19'00"-6° 28'00" LS dan 106°43'00"-106°55'30" BT. Selain berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta, wilayah Kota Depok berbatasan pula dengan tiga kabupaten, yaitu:



- i. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan Wilayah DKI Jakarta;
- ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- iii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- iv. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data BAPEDA Kota Depok, untuk pemanfaatan ruang, dibagi menjadi 9 (sembilan) kawasan fungsional, yaitu:

- i. Kawasan permukiman
- ii. Kawasan perdagangan dan jasa
- iii. Kawasan industri
- iv. Kawasan hijau
- v. Kawasan khusus
- vi. Kawasan pendidikan
- vii. Kawasan potensial untuk pariwisata
- ix. Kawasan strategis potensial



Struktur tata ruang Kota Depok direalisasikan dengan fokus kepada aspek persebaran penduduk; pengembangan utama pembentukan ruang dan intensitas ruang yang diarahkan kepada sistem pelayanan dan interaksi sistem kegiatan kota agar dapat berdayaguna. Konsep struktur tata ruang Kota Depok dikembangkan melalui pengenalan potensi pengembangan infrastruktur, luasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota yang dituju serta pertimbangan dari sisi lingkungan. Dalam hal penataan ruang, Pemerintah Kota Depok memiliki kebijakan yang ditujukan untuk mengendalikan tata ruang dan bangunan secara efektif dan efisien, yang diupayakan melalui optimalisasi keseimbangan kawasan terbangun dengan ruang terbuka hijau (RTH) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Diharapkan dengan upaya optimalisasi tersebut, dapat menjamin terpeliharanya RTH dan memberikan insentif kepada pemilik sawah teknis.



Berdasarkan data kependudukan di mana ditemui nilai kepadatan tertinggi di Kecamatan Beji, maka dapat diperkirakan kawasan terbangun di kecamatan tersebut memiliki persentase tertinggi pula. Konsekuensi dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok dituntut untuk dapat mengupayakan optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Beji, mengingat fungsi Kota Depok yang antara lain adalah sebagai daerah resapan bagi DKI Jakarta.

Kondisi tersebut didasarkan pula pada data yang diperoleh sejak tahun 2005, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah permukiman di Kota Depok menyebabkan pemanfaatan ruang didominasi oleh permukiman dan mengakibatkan penurunan persentase ruang terbuka hijau (RTH). Pemanfaatan ruang menjadi kawasan terbangun tersebut mendominasi ke arah timur, tenggara, dan selatan, sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan. Untuk itulah, dalam kebijakannya, Pemerintah Kota Depok berupaya mengendalikan tata ruang dan bangunan secara efektif dan efisien, yang didukung strategi untuk menjaga keseimbangan kawasan terbangun dengan RTH, melalui optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Transportasi

Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok adalah upaya meningkatkan pelayanan transportasi. Hal tersebut mengingat, sejak tahun 2001 Kota Depok memiliki panjang dan lebar jalan yang terus meningkat; diperkirakan sampai tahun 2020, panjang jalan, yang meliputi jalan propinsi dan kota, akan bertambah 10 km/tahun.

Kebijakan yang terkait dengan peningkatan pelayanan transportasi tersebut didukung oleh beberapa strategi, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan transportasi melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur transportasi;
- b. Menurunkan titik kemacetan melalui pengembangan manajemen transportasi termasuk kemungkinan pengembangan moda transportasi massal.
- c. Mengembangkan alternatif jalan tol.

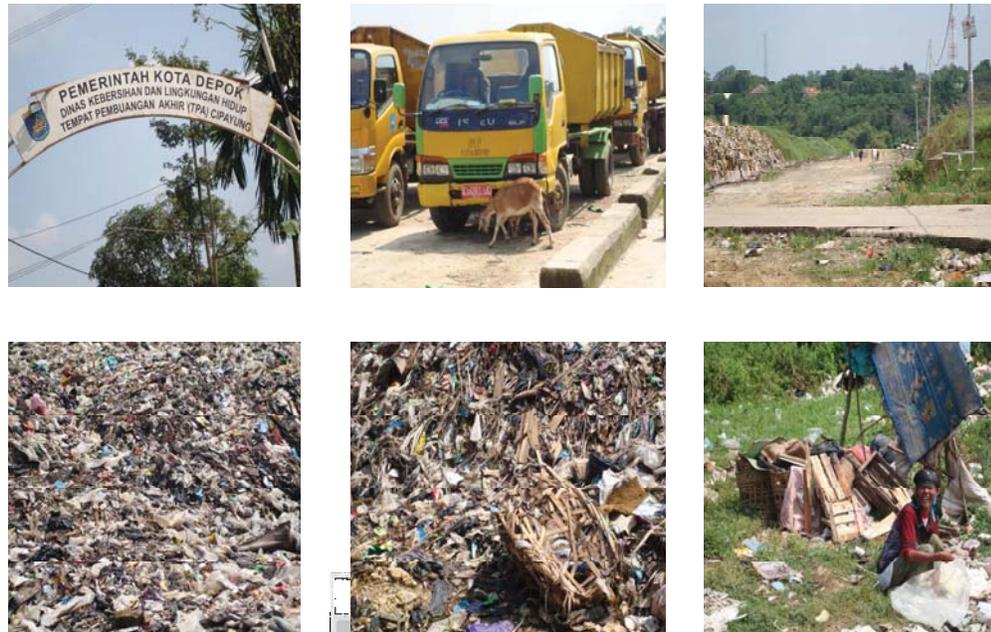


Berdasarkan data kependudukan Kota Depok di mana ditemui adanya peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat diperkirakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang kepadatan transportasi di Kota Depok dapat melampaui daya dukung, apabila tidak diantisipasi penanganannya sejak dini.

(4) Persampahan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Depok sampai dengan tahun 2008 telah terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap peningkatan jumlah sampah, yang terutama berasal dari rumah tangga dan pasar. Namun dengan adanya peningkatan jumlah penduduk nampaknya timbul tuntutan terhadap adanya peningkatan di bidang industri, yang dalam prosesnya akan menghasilkan sampah pula. Kondisi tersebut selanjutnya akan mengakibatkan peningkatan timbulan sampah di Kota Depok. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam upaya meningkatkan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup perlu didukung dengan strategi terwujudnya efisiensi pengelolaan sampah melalui perbaikan manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dalam hal ini TPA Cipayung dan peningkatan pengelolaan sampah pada sumbernya. Selain itu, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Depok telah membangun membangun Unit Pengelola Sampah (UPS) di beberapa lokasi di seluruh kecamatan dalam rangka mengantisipasi adanya peningkatan timbulan sampah. Dalam hal ini, selain berfungsi sebagai penampung sampah, UPS juga berfungsi sebagai pemilah dan pengolah sampah padat.

Pengelolaan sampah juga telah dilakukan oleh DKP Kota Depok dengan menempatkan beberapa UPS. Pada tahun 2008 telah ada 20 UPS, tahun 2009 telah ada 10 UPS dan tahun 2010 di prediksi akan ada sejumlah 15 UPS, sedangkan tahun 2011 diprediksi akan ada sejumlah 15 UPS. Bila 1 UPS menghasilkan 30 m³/hari, maka pada tahun 2011 diperkirakan akan terdapat 1800 m³/hari. Kemudian sampah yang di daur ulang sebanyak 20 % yaitu 360 m³/hari, bahan organik 65 % yaitu 1170 m³/hari, sehingga residu 15 % yaitu 270 m³/hari akan di buang ke TPA Cipayung.



Gambar 1.1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayang. Suasana dan kondisi TPA Cipayang yang tampak dipenuhi dengan timbunan sampah, hingga menutupi saluran air, dan adanya pemulung yang sedang memilah sampah (Agustus, 2009).

Di samping itu, upaya yang terus dilanjutkan oleh adalah monitoring terhadap implementasi kepedulian pengelolaan lingkungan oleh kegiatan usaha pabrik, pemukiman atau kegiatan lain yang ada di Kota Depok dan keharusan kepemilikan izin pembangunan yang dikaitkan dengan keharusan pembuatan Dokumen UKL/UPL atau AMDAL serta DPL pada kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan.

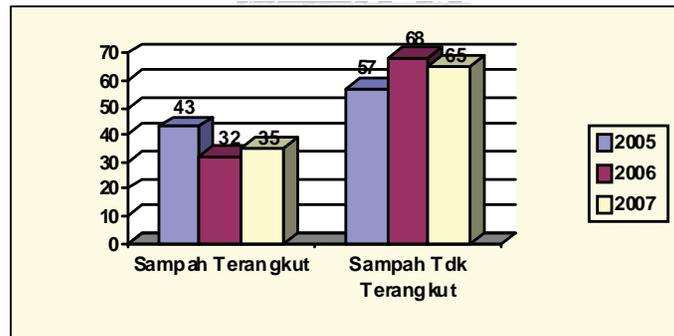
Untuk mempertahankan kelestarian lingkungan Kota Depok, kebiasaan menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan bahan buangan pabrik perlu diatur berdasarkan peraturan rundangan. Bahan buangan yang beracun perlu diberi perlakuan (*treatment*) terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan, dan perairan tempat pembuangan harus mempunyai kondisi air yang memadai. Setiap pabrik atau kegiatan usaha lain yang akan di bangun wajib memproses bahan-bahan buangnya untuk keperluan lain, sehingga dengan demikian dampak terhadap lingkungan dapat dibatasi.

Pada Tabel 1.1. terlihat bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, jumlah sampah yang tidak terangkut semakin meningkat, dan pada tahun 2008 sudah menurun karena ada daur ulang pada beberapa UPS, namun bila tidak tertangani dengan baik, maka akan menyebabkan sampah yang tidak terangkut semakin meningkat lagi.

Tabel 1.1. Penanganan Sampah Kota Depok

No	Penanganan	2005		2006		2007		2008	
		Vol (M3/hari)	%						
1	Sampah Terangkut	1.128	43	1.200	32	1.200	35	843	28
2	Sampah Tdk terangkut	1.472	57	2.510	68	2.245	65	1.557	52
3	Sampah di daur ulang	-		-		-		600	20
Timbulan Sampah		2.600		3.710		3.445		3.000	

Sumber: DKLH Kota Depok, 2007



Gambar 1.2. Unit Pengelola Sampah (UPS). Kondisi fisik UPS dan suasana pemilahan sampah di dalam UPS, yang dilakukan secara manual, kemudian digiling menggunakan mesin, dan hasil penggilingan sampah organik diolah menjadi pupuk yang kemudian dijual ke masyarakat (Agustus, 2009).

b. Isu lingkungan hidup lain

Isu lain yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Depok antara lain:

(1) Layanan air bersih

Salah satu misi Pemerintah Kota Depok adalah mengembangkan dan mengelola sarana prasarana air bersih, secara efisien dan efektif. Hal tersebut didasarkan pada jumlah pemukiman, industri, serta fasilitas umum lainnya, yang semakin meningkat. Sampai saat ini penyediaan air minum di Kota Depok masih dikelola oleh Kota Bogor. Berdasarkan data yang diperoleh, sejak tahun 2005 telah terjadi peningkatan jumlah pelanggan PDAM yang berimplikasi pada peningkatan konsumsi air bersih. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok berupaya melakukan pembatasan pemakaian air bersih, dalam rangka upaya konservasi air baku.

(2) Daerah Rawan Banjir

Berdasarkan topografi dan letak geografisnya, Kota Depok bukan merupakan daerah rawan banjir. Namun adanya peningkatan pembangunan kawasan terbangun yang mengakibatkan berkurangnya persentase RTH, sejak tahun 2005, dijumpai beberapa titik banjir di beberapa lokasi di Kota Depok. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok saat ini melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengendalikan banjir, dengan sasaran menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan dengan menata DAS melalui pengendalian sungai yang terpadu dengan sistem drainase wilayah. Pola perencanaan pengembangan pendalian banjir tersebut sebaiknya terintegrasi/terpadu dengan memperhatikan arah dan sistem drainase, pola DAS, keberadaan dan kondisi situ dan sungai, serta adanya daerah rawan banjir/genangan.

(3) Program Adipura

Pemerintah Kota Depok saat ini tengah berupaya kembali untuk meraih penghargaan Piala Adipura 2009, yang rangkaian penilaiannya telah dimulai dengan memantau beberapa titik, seperti:

- (a). Jalan: sampah, trotoar, dan drainase;
- (b). Ruang Terbuka Hijau (RTH): sebaran pohon, fungsi;
- (c). Pedagang Kaki Lima (PKL): fisik lapak, sampah, tempat sampah.

Selain itu, berdasarkan pengamatan dalam rangka penilaian Adipura di Kota Depok, ditemui kondisi yang merupakan permasalahan di berbagai sektor terkait, antara lain:

- (a). Dinas Perhubungan:
Kemacetan: disebabkan antara lain oleh angkot tidak tertib, volume kendaraan yang semakin meningkat, dan pejalan kaki tidak tertib;
- (b). Dinas Pekerjaan Umum:
Genangan air: disebabkan antara lain oleh persentase tutupan lahan semakin meningkat, dan kuantitas, maupun kualitas drainase yang tidak memadai;
- (c). Dinas Kebersihan dan Pertamanan:
 - (i). Pohon/estetika: disebabkan antara lain oleh pemeliharaan pohon-pohon penghijauan yang belum optimal, dan koordinasi antar sektor dalam pembangunan di Kota Depok yang juga belum optimal.
 - (ii). Kebersihan: warga membuang sampah tidak pada tempatnya

Sehubungan dengan penilaian dalam rangka Program Adipura tersebut, Kota Depok telah merencanakan langkah-langkah penanganan, antara lain:

- (a). Optimalisasi koordinasi antar sektor; dan
- (b). Pencanangan **Program Margonda Indah Tertib Bersih dan Nyaman.**

Adapun titik berat penilaian Program Adipura dilakukan pada aspek '**hijau dan bersih**'. Esensi dari keikutsertaan Pemerintah Kota Depok dalam Program Adipura 2009 tersebut adalah, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memperbaiki *image* kota Depok sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi, baik secara teknis maupun koordinasi antar sektor.

BAB II

KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA

A. LAHAN DAN HUTAN

1. Kondisi

Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi, hingga tahun 2008 secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri sebagai berikut:

- Wilayah Barat : Fungsi jasa perdagangan/agribisnis dan pergudangan, wisata, pemukiman kepadatan rendah sampai sedang.
- Wilayah Tengah : Fungsi perdagangan dan jasa perkantoran, pergudangan, pendidikan, wisata dan pemukiman kepadatan sedang sampai tinggi.
- Wilayah Timur : Fungsi pemukiman kepadatan rendah, sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa pergudangan, perkantoran, wisata dan industri yang ramah lingkungan.

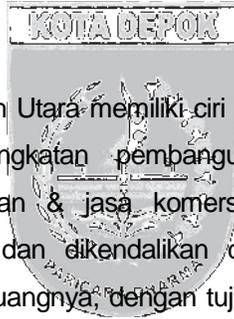
Adapun struktur tata ruang Kota Depok direalisasikan dengan menitikberatkan pada aspek persebaran penduduk, arahan pengembangan utama pembentukan ruang, dan arahan intensitas ruang yang diarahkan kepada sistem pelayanan dan interaksi sistem kegiatan kota agar dapat berdayaguna. Konsep struktur ruang Kota Depok dikembangkan melalui pengenalan potensi pengembangan infrastruktur, luasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota yang dituju.

1.1. Pemanfaatan lahan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapeda Kota Depok, pemanfaatan ruang di Kota Depok dibagi menjadi 9 (sembilan) kawasan fungsional, yaitu:

1.1.1. Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan dijumpai di seluruh kawasan kecamatan di Kota Depok dengan peranserta swasta dalam pembangunannya, karena pengembang merasakan kebutuhan tempat tinggal di Kota Depok sebagai peluang bisnis. Untuk pengembangan kawasan perumahan, ke depan perlu dilakukan secara hati-hati terutama pada kawasan lahan basah. Peraturan untuk tidak mengizinkan pembangunan perumahan di lahan basah perlu diimplementasikan secara lebih optimal dan terintegrasi. Sesuai dengan IPR yang diajukan perorangan maupun pengembang, dan yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Depok, untuk perumahan dari tahun 2003 sampai tahun 2008 berjumlah lebih dari 400 lokasi yang tersebar di tiap kecamatan di wilayah Kota Depok. (sampai saat ini Kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya merupakan kecamatan yang terbanyak mengajukan IPR guna pembangunan perumahan beserta sarana prasarannya).

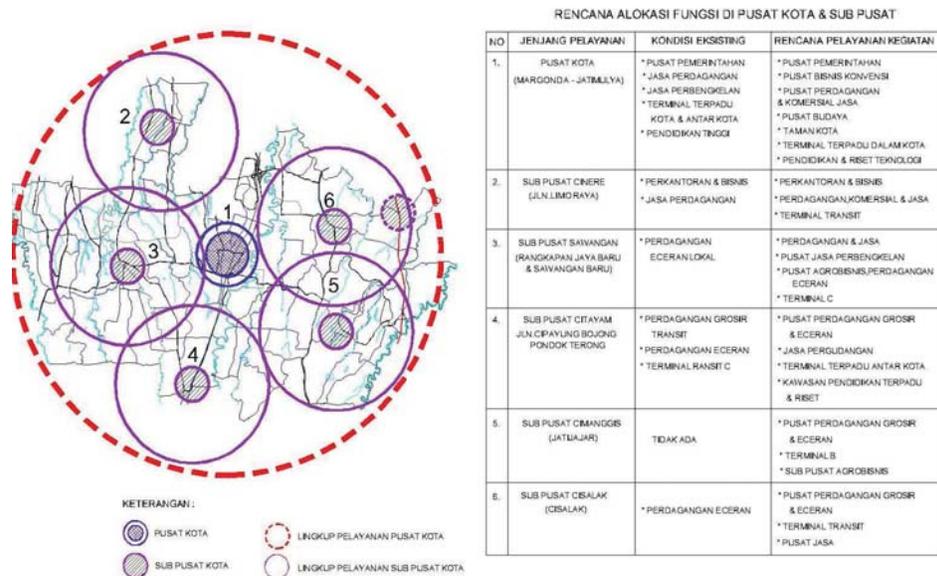


Pengembangan Wilayah Utara memiliki ciri kegiatan yang telah berkembang pesat dengan adanya peningkatan pembangunan permukiman, sarana kegiatan pendidikan, perdagangan & jasa komersial. Pengembangan Wilayah Utara selanjutnya diarahkan dan dikendalikan dengan memperhatikan efisiensi atau proporsi pemanfaatan ruangnya, dengan tujuan terciptanya perbandingan kawasan terbangun dengan kawasan hijau yang proporsional.

1.1.2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dapat dilihat diseluruh Kota Depok. Untuk daerah pinggiran kota seperti di Kecamatan Limo yang berbatasan dengan DKI Jakarta tumbuh kawasan perdagangan dan jasa yang relatif cepat, karena kawasan pinggir DKI Jakarta sudah mencapai titik jenuh. Di samping itu pedagang informal pun tumbuh di kawasan pendidikan dan kawasan permukiman sehingga pada saat ini perlu diantisipasi kebutuhan sarana dan prasarannya. Selain itu, di sepanjang Jalan Margonda, yang dikatakan sebagai pusat aktivitas Kota Depok, dapat pula ditemui kawasan perdagangan dan jasa yang beberapa telah memulai aktivitasnya sejak dini. Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Depok dapat dikatakan tumbuh secara relatif pesat, karena sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya yang

relatif pesat pula, yang sebagai konsekuensinya membutuhkan layanan perdagangan dan jasa untuk mendukung kehidupannya.



Gambar 2.1. Perkembangan Pusat-pusat Pertumbuhan di Kota Depok

1.1.3. Kawasan Industri

Di Kota Depok dapat ditemui kawasan industri baik dalam skala besar, menengah ataupun kecil. Konsentrasi kawasan industri besar tersebar di sekitar Jalan Raya Jakarta Bogor, yang tepatnya berada di Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cimanggis, karena akses ke jalan ini relatif mudah. Keberadaan industri menengah dan kecil yang tersebar di sekitar kawasan pemukiman di daerah Kecamatan Cimanggis berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena adanya pemanfaatan air tanah dan pembuangan limbah cair hasil kegiatan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999, perluasan kawasan industri di Kecamatan Cimanggis yang dikategorikan sebagai daerah konservasi, hanya bersifat mengisi lahan kosong dan tidak diperkenankan untuk diperluas.

Kegiatan industri merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kota Depok (sekitar 40% dari total PDRB Kota Depok), sehingga kegiatan industri tetap diarahkan untuk dipacu pertumbuhannya.

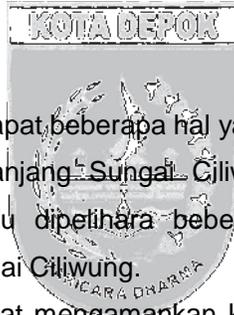
Laju pertumbuhan sektor industri menggunakan skenario laju pertumbuhan rendah yaitu sebesar 6,9 % per tahun.

Pada dasarnya, jenis industri yang diijinkan dikembangkan di Kota Depok adalah industri yang:

- a. Non polutan atau yang ramah lingkungan
- b. Dalam aktivitasnya tidak membutuhkan banyak air.

Kecenderungan perkembangan kawasan industri di Kota Depok terlihat di Jalan Raya Bogor. Sementara itu, rencana pengembangan kawasan industri ringan non polutan dan berorientasi pasar akan diarahkan di Kecamatan Sawangan, khususnya di bagian selatan Sawangan, Jalan Raya Parung, dan Jalan Raya Cinangka.

1.1.4. Kawasan Hijau



Pada kawasan ini terdapat beberapa hal yang perlu dilestarikan, di antaranya:

- a. Kawasan di sepanjang Sungai Ciliwung dengan bentuk *meander* dan rawan erosi, perlu dipelihara beberapa anak sungai/sumber air yang bermuara ke Sungai Ciliwung.
- b. Kawasan situ dapat mengamankan ketersediaan air tanah seperti di Situ Jemblung, Kecamatan Cimanggis.
- c. Kawasan lereng dapat melestarikan kondisi fisik kota, sehingga terhindar dari bencana longsor terutama di daerah yang berlereng terjal di sebelah selatan wilayah Kota Depok.
- d. Kawasan taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota perlu dilestarikan termasuk kawasan "*welcome area*" masuk ke Kota Depok dan di kawasan Universitas Indonesia serta taman Wiladatika Cibubur.
- e. Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagai kawasan konservasi baik untuk air, satwa dan vegetasi, yang termasuk langka dan dilindungi.

1.1.5. Kawasan Khusus

Terdapat beberapa kawasan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok, antara lain:

- a. Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas: merupakan suatu kawasan yang diperlakukan khusus guna dilestarikan dengan tujuan khusus konservasi berbagai macam satwa, vegetasi, dan air dengan luas sekitar 7 Ha yang terletak di Kecamatan Pancoran Mas;
- b. Studio Alam TVRI: merupakan suatu kawasan yang diperlakukan khusus dengan tujuan khusus konservasi air dan sebagai studio alam guna penyiaran TVRI yang bersifat nasional terletak di Kecamatan Sukmajaya;
- c. Kawasan pemancar RRI: merupakan suatu kawasan yang diperlakukan khusus guna dilestarikan dengan tujuan konservasi air (ruang terbuka hijau) dan sebagai pemancar RRI yang bersifat nasional yang terletak di Kecamatan Sukmajaya;
- d. Kawasan Divisi Infanteri I KOSTRAD:; merupakan suatu kawasan yang diperlakukan khusus guna kegiatan yang bersifat nasional guna kepentingan militer yang terletak di Kecamatan Sukmajaya;
- e. Kawasan Brigade Mobil: merupakan suatu kawasan yang diperlakukan khusus guna kegiatan yang bersifat nasional guna kepentingan militer yang terletak di Kecamatan Cimanggis.

Selain itu, terdapat pula beberapa kawasan khusus di Kota Depok yang dikelola oleh individu, antara lain:

- a. **Kampung Pepohonan 99**: merupakan kawasan seluas lebih kurang 10 Ha yang oleh pemiliknya dibangun untuk tujuan konservasi berbagai macam vegetasi dan satwa langka, konservasi air dan tanah, dengan konsep pengelolaan lingkungan secara alami dan terpadu.
- b. **Godong Ijo**: suatu kawasan yang selain bertujuan untuk konservasi juga untuk mempromosikan dan memasarkan berbagai tanaman hias, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

1.1.6. Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan di Kota Depok meliputi:

- a. Kawasan Universitas Indonesia, Kecamatan Beji.
- b. Kawasan Universitas Gunadarma, Kecamatan Beji dan Cimanggis.
- c. Kawasan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Kecamatan Limo.
- d. Kawasan Universitas Jayabaya, Kecamatan Cimanggis.
- e. Kawasan STIK Purnama, Kecamatan Sawangan.
- f. Kawasan FAJAL, Kecamatan Sawangan.
- g. STIK Arramiyah, Kecamatan Sawangan.
- h. STAI Alhamidiyah, Kecamatan Pancoran Mas.

Melihat keberadaan kawasan pendidikan saat ini sebagian besar pusat pendidikan berada di sebelah utara Kota Depok. Sesuai dengan revisi RTRW 2005, maka kawasan pendidikan akan dialihkan kearah selatan, sebagai pusatnya di Citayam.

1.1.7. Kawasan Potensial untuk Pariwisata

Kawasan pariwisata/rekreasi yang perlu dikembangkan adalah: Lapangan Golf Emerald, Lapangan Golf Sawangan, Kolam Renang Tirta Maya dan Tirta Sari I di Kecamatan Sawangan, Taman Hutan Raya di Kecamatan Pancoran Mas, Studio Alam TVRI di Kecamatan Sukmajaya, Kampung Pepohonan 99, Godong Ijo, Masjid Kubah Emas, situ-situ yang tersebar di Kota Depok, Arboretum Wiladatika Cibubur Kecamatan Cimanggis dan wisata religius berupa masjid Kubah Mas Dian Almahri di Kecamatan Sawangan..

1.1.8. Kawasan Strategis Potensial

Kawasan yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk perdagangan dan jasa. Identifikasi kawasan strategis potensial dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian tengah.

- a. Bagian utara dibagi menjadi tiga Bagian Wilayah Kerja (BWK), yaitu:
 - BWK barat laut di sebagian Kecamatan Sawangan batas Kabupaten Tangerang
 - BWK utara terletak di Kecamatan Beji berbatasan dengan DKI Jakarta
 - BWK timur laut terletak di Kecamatan Cimanggis bebatasan dengan DKI Jakarta

- b. Bagian tengah, meliputi Bagian Wilayah Pusat Kota sebagian di Kecamatan Pancoran Mas dan sebagian di Kecamatan Cimanggis.

Pada kawasan strategis potensial ini diidentifikasi pertumbuhannya akan cepat (*fast growing areas*) pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, karena di kawasan tersebut akan tumbuh pemukiman baru.

1.1.9. Kawasan Andalan sebagai Pusat Pertumbuhan

Kawasan andalan yang dipakai sebagai pusat pertumbuhan agar tidak terjadi kesenjangan pertumbuhan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. BWK utara di Kelurahan Kukusan
- b. BWK barat laut di Kelurahan Limo dan Kelurahan Kedaung sebagai sub pertumbuhan.
- c. BWK timur laut di Desa Harjamukti.
- d. BWK pusat Kota di Kelurahan Depok.
- e. BWK tenggara di Desa Tapos dan Kelurahan Cilangkap sebagai sub pusat pertumbuhan.
- f. BWK selatan di Kelurahan Cijodong dan Kelurahan Bojong Pondok Terong sebagai sub pusat pertumbuhan.
- g. BWK barat di Kelurahan Sawangan dan Kelurahan Pasir Putih sebagai sub pusat pertumbuhan.

Rencana pemanfaatan ruang Kota Depok hingga tahun 2010 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 12 Tahun 2001, yang ditetapkan secara terpadu, tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Nasional (Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan penyusunan RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010 adalah:

- a. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian pembangunan antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan,
- b. Mengarahkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,

- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya, dan
- d. Memuat kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah.

Seiring perkembangan dan pembangunan wilayah di Kota Depok yang pesat maka pemanfaatan sumberdaya lahan dan air menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, daerah yang seharusnya diarahkan untuk permukiman dengan kepadatan rendah menjadi kepadatan tinggi atau sangat tinggi, daerah pertanian lahan basah berubah menjadi industri atau permukiman dan kawasan lindung seperti: sempadan sungai dan situ, dimanfaatkan untuk permukiman atau penggunaan lainnya.

Sehubungan dengan itu, pada tahun 2005, Pemerintah Kota Depok melakukan Evaluasi terhadap RTRW (Perda No. 12 Tahun 2001).

Beberapa temuan dari hasil Evaluasi RTRW adalah :

- a. Faktor Eksternal BERUBAH
Faktor Eksternal adalah KEBIJAKAN yang diimbangkan kepada Kota Depok dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
- b. RTRW Kota Depok Sah, ditinjau dari proses analisis maupun keabsahan data yang digunakan dalam penyusunannya, RTRW Kota Depok dinilai sah.
- c. Simpangan Kecil
Pada implementasinya memang terjadi perubahan pemanfaatan ruang dari yang semula direncanakan, namun masih dalam batas-batas toleransi.

2. Pemanfaatan Ruang

- 2.1. Penggunaan lahan masih dalam koridor Rencana Pemanfaatan Ruang RTRW Kota Depok 2010, namun memerlukan pengendalian pola sebaran.
- 2.2. Belum berkembangnya kawasan komersil dan jasa di kompleks perumahan Kota Kembang perlu perhatian khusus;
- 2.3. Tumbuhnya bangunan berlantai banyak di sekitar Jalan Margonda;

- 2.4. Perlu pemantapan strategi normalisasi dan pemanfaatan kawasan situ/danau. Penekanan terutama untuk situ-situ yang hilang;
- 2.5. Pemantapan strategi pengembangan pertanian (kawasan sawah teknis);
- 2.6. Pemantapan strategi pengembangan terkait kawasan resapan air;
- 2.7. Merumuskan strategi pengembangan sentra niaga dan budaya (SNADA); Eco-turism;
- 2.8. Pemantapan strategi pengembangan zona industri;
- 2.9. Meningkatkan koordinasi pembangunan antar sektor dalam Pemerintah Kota Depok yang dikelola secara baik;
- 2.10. Memfungsikan lembaga Penataan Ruang Daerah (TKPRD) serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Sub Pusat Pelayanan

- 3.1. Belum berkembangnya sub pusat Sawangan dan Cimanggis (Jatijajar);
- 3.2. Belum berkembangnya kawasan pendidikan tinggi di Citayam;
- 3.3. Kawasan di sekitar kompleks perumahan Emeralda berkembang dengan pesat;
- 3.4. Berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan di sekitar Jalan Parung Raya.
- 3.5. Terdapat sub pusat yang sudah berkembang tetapi belum seperti arahan RTRW, yaitu Citayam dan Cisalak

Untuk melihat kecenderungan pemanfaatan ruang di Kota Depok atau kekonsistenan dari RTRW Kota Depok, dilakukan analisis penutupan lahan dengan menggunakan 2 data citra satelit LANDSAT (resolusi 30 x 30 m) dengan tanggal pengambilan 29 April 2002 dan 9 September 2004 serta citra satelit IKONOS (resolusi 1 x 1 m) untuk melihat skala yang lebih detil, serta hasil dari evaluasi revisi RTRW tahun 2005

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit LANDSAT tahun 2002, 2004 dan tahun 2006 (revisi) terhadap tutupan/pemanfaatan lahan bahwa terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada pada tahun 2005 dan tahun 2010 terutama seperti pada perumahan dan kampung, untuk lebih jelasnya lihat **Tabel 2.1 dan 2.2**

**Tabel 2.1.** Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Depok 2000 – 2010

Jenis Penggunaan	2000		2005		2005 (Revisi)		2010		2010 (Revisi)	
	Ha	(%)								
A. Kawasan Terbangun										
1. Perumahan & Kampung	7.084	35,37	7.455	37,22	8.874,85	44,31	7.919	39,54	9.111,19	45,49
2. Pendidikan Tinggi	224	1,12	336	1,68	230,33	1,15	448	2,24	230,33	1,15
3. Jasa & Perdagangan	125	0,63	241	1,20	300,44	1,50	296	1,48	799,16	3,99
4. Industri	980	4,89	1.040	5,19	308,45	1,54	1.100	5,49	632,92	3,16
4. Kawasan Strategis Nasional (Tertentu)	227	1,13	227	1,13	254,37	1,27	227	1,13	254,37	1,27
B. Ruang Terbuka Hijau										
1. Sawah Teknis & Non Teknis	1.131	6,56	1.313	6,56	967,40	4,83	1.313	6,56	1.153,67	5,76
2. Tegalan/ Ladang	4.630	23,11	3.808	19,01	3.723,80	18,59	3.360	16,78	2.923,80	14,61
3. Kebun	3.131	15,63	2.826	14,11	2.781,07	13,88	2.507	12,52	2.522,07	12,59
4. Rumput Tanah Kosong	1.635	8,16	457	2,28	573,38	2,87	457	2,28	241,37	1,21
5. Situ & Danau	119	0,60	131	0,65	168,24	0,84	139	0,69	168,24	0,84
6. Pariwisata & Lapangan Olahraga	311	1,55	767	3,83	388,56	1,94	836	4,18	514,75	2,57
7. Hutan Kota	7	0,04	7	0,04	26,04	0,13	7	0,04	26,04	0,13
8. Kaw. Tertentu (TVRI, RRI)	242	1,12	242	1,21	176,26	0,88	272	1,21	176,26	0,88
9. Garis Sempadan (Sungai, Tegangan Tinggi, Pipa Gas)	-		1.178	5,88	1.253,82	6,26	1.178	5,88	1.273,85	6,36
Total	20.029	100								

Sumber: Lampiran III, Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001

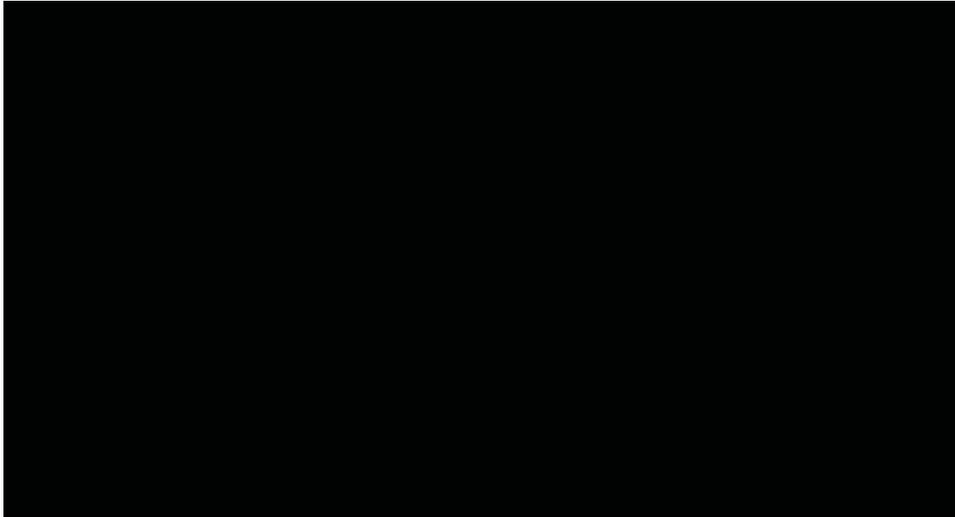
Lampiran IV, Hasil Revisi RTRW 2000 – 2010, Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001 (Tahun 2007)

Tabel 2.2. Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan di Kota Depok

No.	Tipe Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)				% Perubahan (Tahun)		
		Tahun 2002	Tahun 2004	Tahun 2006	Tahun 2007	2002-2004	2004-2006	2006-2007
1	Hutan/Veg. Hutan	2.088,00	1.897,68	414,60	410,58	-5,94	-2,41	-0,02
2	Semak belukar	1.266,14	765,35	3.723,80	3.658,76	-2,50	14,77	-0,32
3	Kebun	4.608,47	5.055,79	2.781,07	2.728,04	2,23	-11,36	-0,26
4	Rumput	753,97	516,24	573,38	567,36	-1,19	0,28	-0,03
5	Sawah	1.228,25	455,85	943,35	943,34	-3,86	24,26	0,0
6	Lahan kering/ladang	3.665,11	3.205,38	1.430,08	1.430,07	-2,30	-8,86	0,0
7	Lahan terbangun	6.054,99	8.196,96	9.968,44	10.098,57	-10,69	-8,84	-0,65
8	Badan air	342,32	837,55	168,24	168,24	2,47	-3,34	0,0
9	Lahan terbuka	21,75	98,19	26,04	24,04	0,38	-0,36	0,0
	Luas Total	20.029,00	20.029,00	20.029,00	20.029,00			

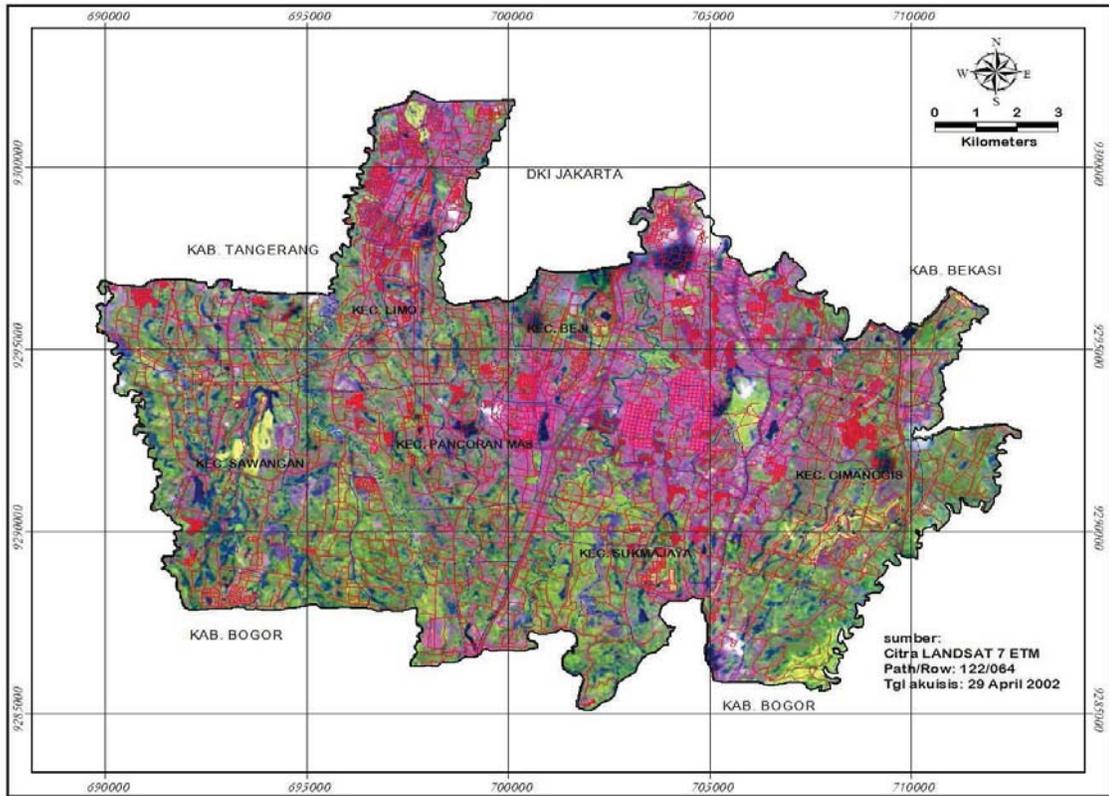
*) Sumber: Hasil interpretasi citra satelit LANDSAT (29 April 2002 dan 9 September 2004)

Lampiran IV, Hasil Revisi RTRW 2000 – 2010, Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001 dan Hasil Perhitungan (Tahun 2008)

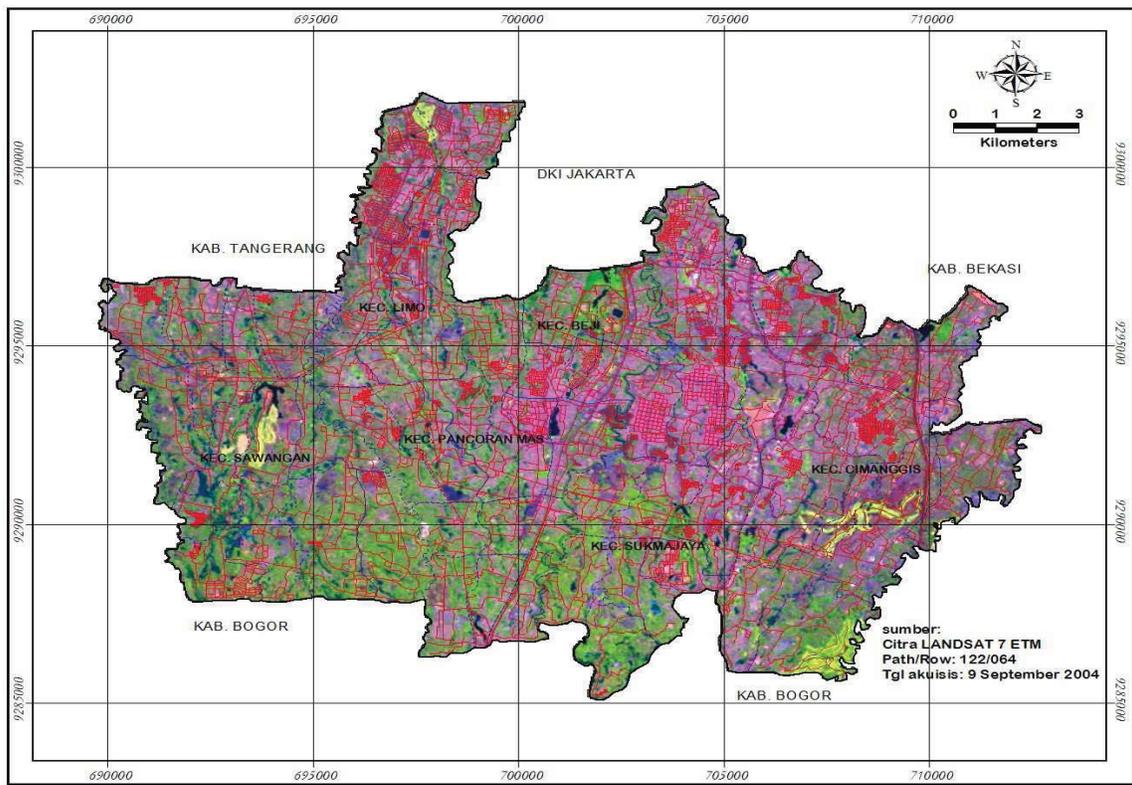


Gambar 2.2 Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan di Kota Depok

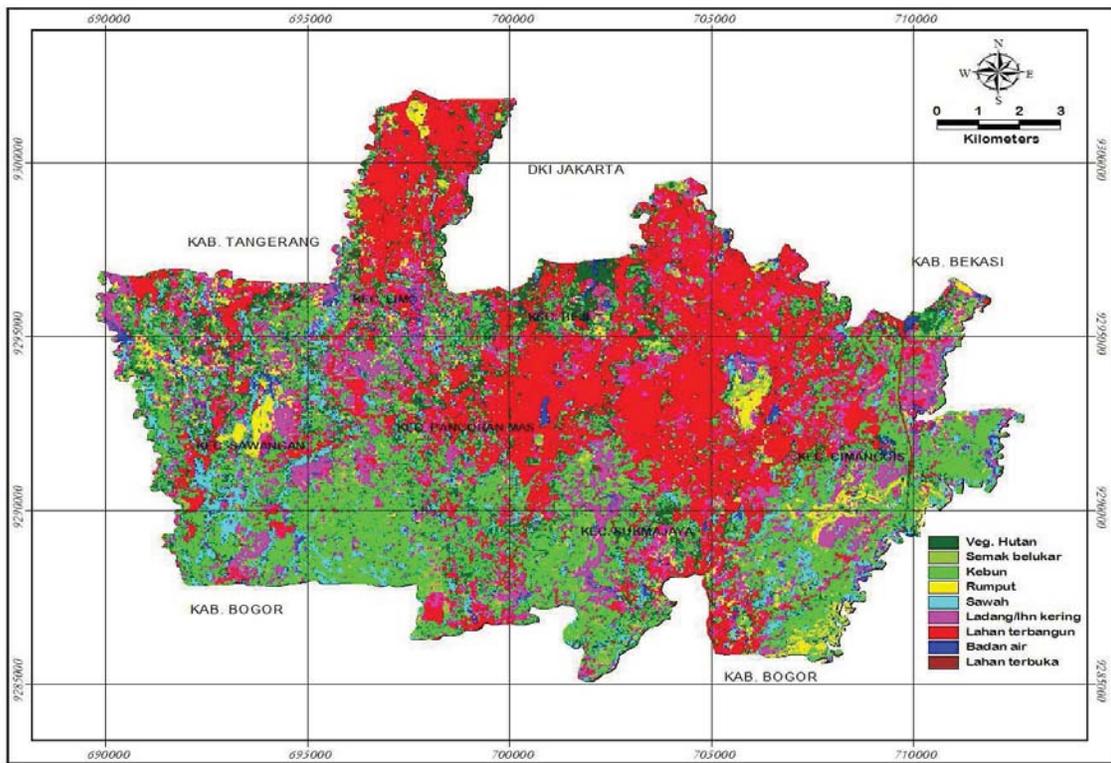




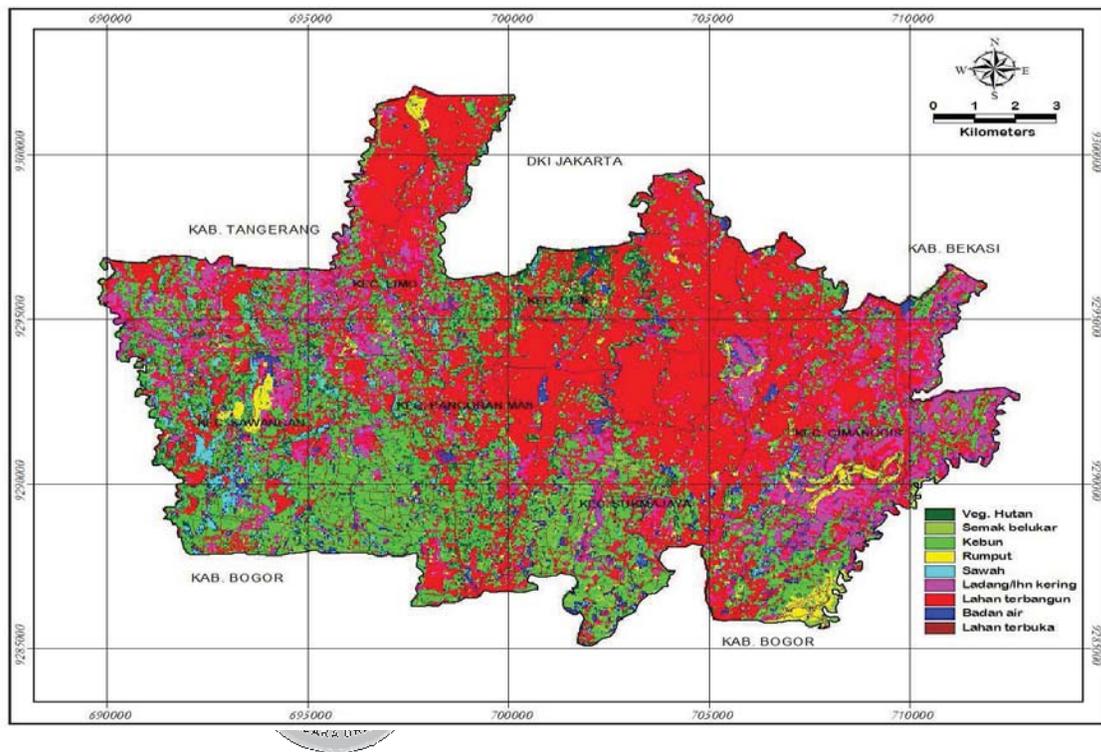
Gambar 2.3. Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002



Gambar 2.4. Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004



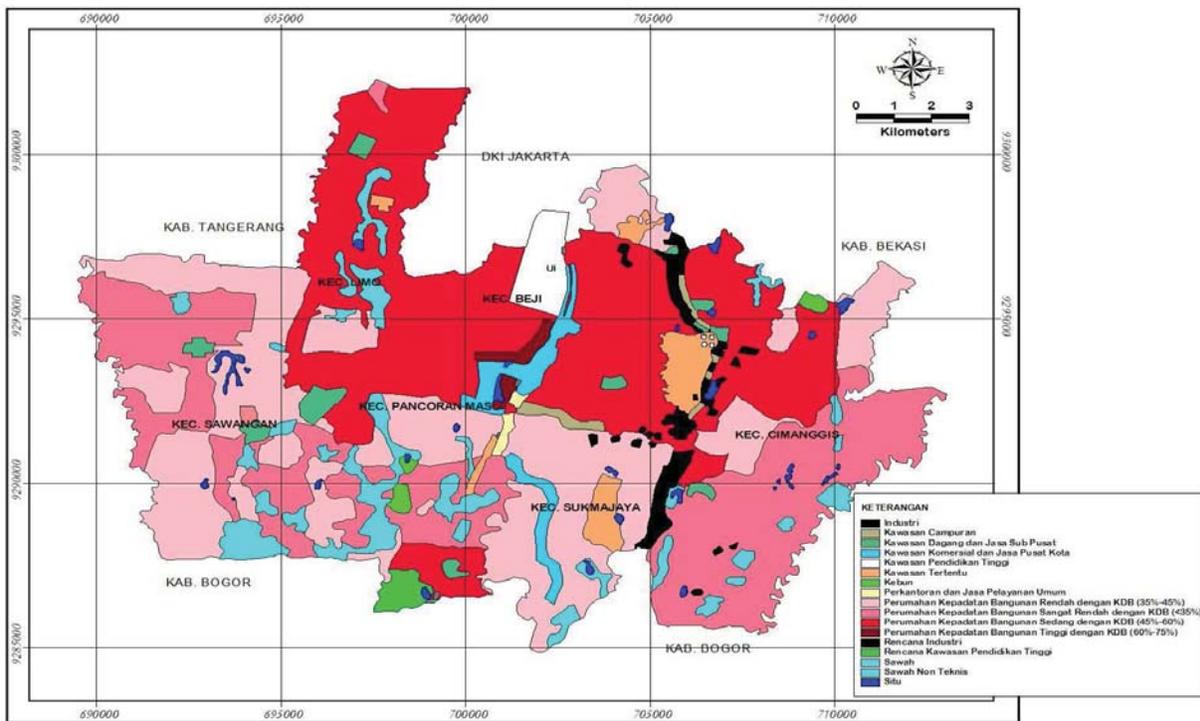
Gambar 2.5. Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002.



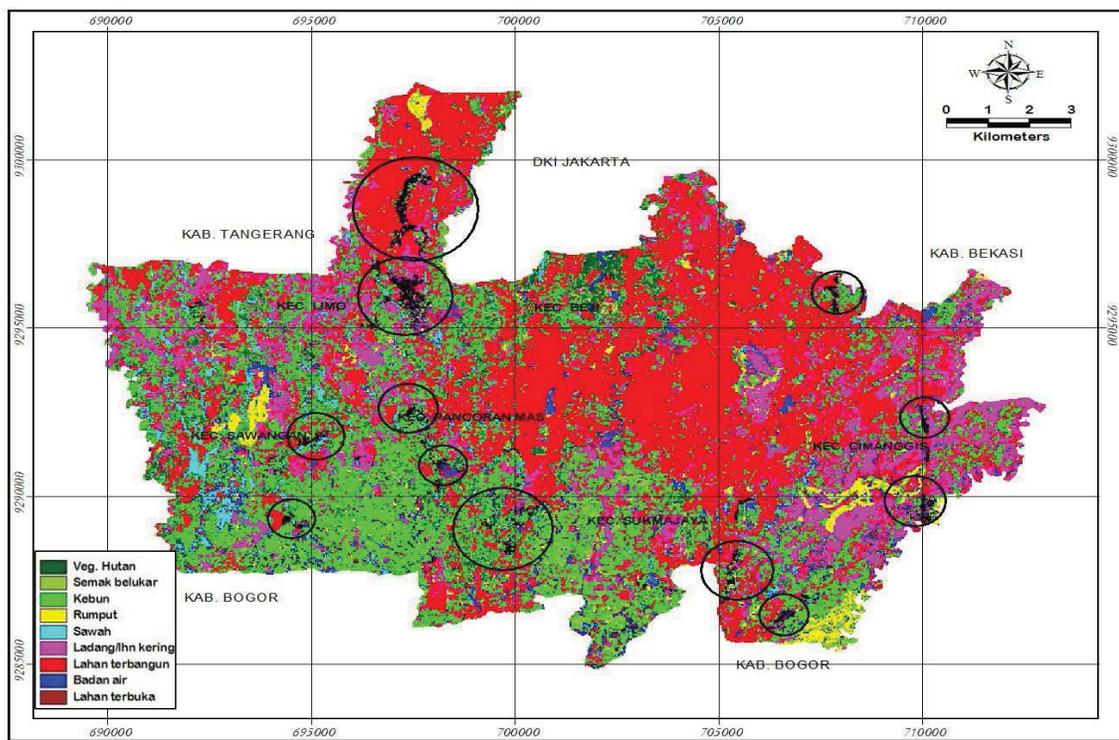
Gambar 2.6. Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004

Konsistensi pemanfaatan lahan antara RTRW Kota Depok dengan pemanfaatan lahan sebenarnya, dapat dilihat dengan membuat perbandingan antara Peta RTRW Tahun 2000 – 2010 Kota Depok dengan Peta Penutupan Lahan hasil interpretasi citra satelit LANDSAT tahun 2004.





Gambar 2.7. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010



Gambar 2.8. Inkonsistensi Pemanfaatan Lahan tahun 2004 menurut RTRW Kota Depok

Berdasarkan hasil *overlay* peta RTRW Kota Depok dengan peta pemanfaatan lahan tahun 2005 dan tahun 2007 kecenderungan terlihat bahwa di beberapa lokasi terjadi penyimpangan terhadap RTRW, terutama untuk pemanfaatan lahan semak belukar dan kebun menjadi areal permukiman.

Dari Gambar 2.7 terlihat bahwa inkonsistensi banyak terjadi pada lahan-lahan yang berada dekat dengan permukiman atau bahkan berada di tengah-tengah permukiman, sehingga tekanan pemanfaatan lahan menjadi permukiman menjadi lebih kuat.

Kota Depok dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) seperti yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan daerah, mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

1. Sebagai daerah penyangga dan pengimbang Ibu Kota Negara, yaitu sebagai penampung limbah penduduk, industri, perdagangan dan kegiatan lainnya yang tidak tertampung lagi di DKI Jakarta serta sebagai penyangga migrasi masuk ke DKI Jakarta.
2. Sebagai daerah konservasi dan resapan air.
3. Sebagai kawasan permukiman dan pendidikan.

Berdasarkan Keppres No. 114 tahun 1999, terdapat 3 kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi air dan tanah yaitu: Kecamatan Limo, Cimanggis dan Sawangan. Penetapan kawasan tersebut ditujukan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan menjamin tersedianya air dan penanggulangan banjir.

Namun demikian dengan fungsinya sebagai daerah penyangga migrasi masuk dan penampungan limbah penduduk serta sebagai kawasan permukiman dan pendidikan mengakibatkan kebutuhan akan lahan permukiman, perdagangan dan industri terus meningkat. Berdasarkan data perubahan penggunaan lahan terlihat adanya peningkatan luasan lahan terbangun. Berdasarkan citra Landsat menunjukkan bahwa peningkatan lahan terbangun sebagian besar merupakan hasil konversi dari lahan pertanian (ladang) dan kebun. Selain itu, adapula yang berasal dari sawah, semak belukar dan vegetasi hutan.

Berdasarkan hasil *overlay* peta RTRW Kota Depok dengan peta pemanfaatan lahan tahun 2005, terlihat bahwa di beberapa lokasi terjadi penyimpangan terhadap RTRW, terutama untuk pemanfaatan lahan pertanian/sawah menjadi areal permukiman.

Perubahan pemanfaatan lahan banyak terjadi pada lahan-lahan yang berada dekat dengan permukiman atau bahkan berada di tengah-tengah permukiman, sehingga tekanan pemanfaatan lahan menjadi permukiman menjadi lebih kuat.

Kota Depok sebagai daerah tangkapan air DAS Ciliwung mempunyai fungsi sebagai daerah konservasi dan resapan air. Namun demikian, berdasarkan data citra Landsat terjadi pula penyimpangan terhadap pemanfaatan lahan sekitar sempadan sungai dan situ, dimana di beberapa lokasi sempadan sungai dan situ dimanfaatkan untuk permukiman/perumahan. Kondisi fisik dari situ-situ juga mengalami penurunan jumlah luasan akibat pengurangan situ untuk dijadikan daerah permukiman, perdagangan dan jasa.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya lahan kawasan serapan air dan tempat penampungan air sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi kawasan sebagai sumber air bagi kehidupan, pengatur tata air dan pemasok air tanah, pengendali banjir, pengatur iklim mikro, pengendapan lumpur dan pengikat zat pencemar, habitat berbagai jenis flora dan fauna.

Faktor penyebab (*Pressure*) berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam di antaranya adalah:

- (i) Berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), kawasan lindung dan daerah resapan air
- (ii) Berkurangnya sumber air karena penurunan kualitasnya
- (iii) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan kebutuhan akan permukiman dan sarana-prasarana perkotaan meningkat
- (iv) Belum tersosialisasikannya RTRW dan Garis Sempadan ke seluruh *stakeholder*
- (v) Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang serta penegakan hukum terhadap pelanggar IMB dan IPR
- (vi) Penyalahgunaan pemanfaatan kawasan lindung oleh masyarakat dan swasta pelaku bisnis
- (vii) Belum jelasnya penanggung jawab dalam pengelolaan situ

Kondisi diatas menyebabkan dampak (*Impact*) terhadap kondisi lingkungan (*State*) Kota Depok, diantaranya adalah:

- (viii) Menurunnya daya dukung lingkungan
- (ix) Berkurangnya daerah resapan air dan *retarder*
- (x) Berkurangnya sumber air bersih

Upaya pencegahan dan penanggulangan (*Response*) penurunan ketersediaan sumberdaya alam yang lakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

- (xi) Koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan sumberdaya alam
- (xii) Sosialisasi dan penyuluhan dalam pemanfaatan ruang (RTRW dan Garis Sempadan) ke berbagai stakeholder melalui berbagai media informasi
- (xiii) Meningkatkan kegiatan Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Fungsi Situ-situ
- (xiv) Melakukan penegakan hukum pada beberapa pelaku pelanggar Perda
- (xv) Pemantauan kualitas air dan udara (ambien) di berbagai lokasi
- (xvi) Pemantauan pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan (Swasta dan Pemerintah).

1) Pemanfaatan Lahan dan Hutan

Masalah pemanfaatan lahan yang terjadi di Kota Depok, seperti: daerah yang seharusnya diarahkan untuk permukiman dengan kepadatan rendah menjadi kepadatan tinggi atau sangat tinggi, daerah pertanian lahan basah berubah menjadi industri atau permukiman dan kawasan lindung seperti: sempadan sungai dan situ, dimanfaatkan untuk permukiman atau penggunaan lainnya disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Semakin tingginya peningkatan jumlah penduduk Kota Depok, sehingga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhannya, termasuk kebutuhan tempat tinggal (Pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 7,3 %) ;
2. Penyalahgunaan pemanfaatan kawasan konservasi seperti sempadan sungai dan situ oleh masyarakat dan swasta sebagai kawasan permukiman dan usaha;
3. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan masih rendah;

4. Penyusunan RTRW Kota Depok kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh seringkali sulit sekali diaplikasikan di masyarakat;
5. Belum tersosialisasinya RTRW dengan baik kepada seluruh stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) terutama dalam konteks pemanfaatan ruang dan lahan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan,
6. Tidak adanya lembaga yang mengendalikan dan melakukan monitoring serta penegakan hukum pemanfaatan ruang.
7. Tidak terkontrolnya pemanfaatan ruang sebagai lahan terbangun/permukiman yang ada di wilayah Kota Depok lambat laun akan menimbulkan dampak lingkungan (Impact) seperti:
8. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan di wilayah Kota Depok;
9. Berkurangnya daerah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan resapan air yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, baik itu krisis air maupun banjir;
10. Keindahan kota menjadi terganggu dengan adanya permukiman ilegal di kawasan sempadan sungai dan situ seperti di sekitar Situ Rawa Besar dan situ-situ lainnya;

B. KEANEKARAGAMAN HAYATI

Indonesia dinyatakan sebagai satu di antara tujuh negara Mega Biodiversity di dunia dan merupakan negara yang memiliki hutan tropis ketiga setelah Brazil dan Zaire. Sementara itu diketahui bahwa kekayaan Indonesia meliputi tumbuhan berbunga, mamalia, reptilia, amphibia, burung, ikan, dan khusus marine biodiversity Indonesia menempatkan diri sebagai negara terkaya di dunia.

Terkait dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki negara Indonesia tersebut serta maraknya musibah kebakaran hutan di Indonesia akhir-akhir ini, dengan didasari oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang perubahan status kotif menjadi Kota Depok dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah berupaya menghimpun dan menginventarisasi aset-aset daerah agar dapat didayagunakan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal

sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

1. Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas

Salah satu aset keanekaragaman hayati yang dimiliki Kota Depok dan merupakan kebanggaan masyarakat Depok adalah Cagar Alam atau Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas seluas 7 ha yang kini tengah diupayakan untuk dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Depok. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 pula, Tahura Pancoran Mas diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Depok untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan azas-azas konservasi yang berlaku.

Tahura Pancoran Mas Depok merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai kawasan konservasi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Kawasan tersebut berfungsi pula sebagai kawasan penyangga bagi daerah sekitarnya. Seperti halnya kawasan konservasi lainnya, tahura pun dapat dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan koleksi tumbuhan asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Sehubungan dengan upaya optimalisasi fungsi, pada akhir 2008, Pemerintah Kota Depok telah mengadakan gerakan penanaman sebanyak 43 jenis tanaman di tahura Pancoran Mas. Diharapkan dengan adanya penambahan koleksi tanaman ini, selain sebagai kawasan hijau, Tahura Pancoran Mas dapat pula membantu dalam upaya konservasi berbagai macam tanaman langka dan dilindungi.

Taman Hutan Raya Pancoran Mas juga merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih dikenal dengan nama hutan kota yang berfungsi meminimalisasi pencemaran udara yang berlebihan, peningkatan suhu, keterbatasan air bersih, terganggunya siklus hidrologi dan lain sebagainya, yang timbul sebagai konsekuensi dari pembangunan dan kemajuan teknologi.

Sejalan dengan perjalanan waktu, kemajuan teknologi dan pembangunan wilayah, Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas yang dahulu merupakan kawasan hutan yang lebat, pada saat ini terhimpit oleh gedung-gedung dan pemukiman penduduk, sehingga sebagian besar dari masyarakat banyak melupakan arti penting keberadaan Tahura Pancoran Mas tersebut. Hal tersebut tentu saja pada

akhirnya dapat menurunkan minat dan kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Depok, terhadap keberadaan dan fungsi tahura tersebut.

Disadari atau tidak, dengan semakin padatnya kota dan sejalan dengan proses pembangunan, kawasan ini akan memiliki nilai yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan perkotaan baik sebagai penyedia air tanah, pencegah banjir, penyerap dan penjerap karbon, penghasil udara segar, pengatur iklim mikro serta tempat rekreasi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu pengembangan Taman Hutan Raya Pancoran Mas dalam jangka panjang harus mampu memberikan manfaat yang nyata.

Sebagaimana layaknya kawasan hutan, Taman Hutan Raya Pancoran Mas belum memberikan manfaat yang optimal bagi keseimbangan lingkungan perkotaan. Kondisi penutupan lahan berupa semak belukar yang hanya didominasi oleh liana dengan sedikit pepohonan, sebagian area ditanami oleh tanaman perkebunan, pagar kawasan beralih fungsi menjadi tempat menjemur pakaian dan di beberapa sudut menjadi tempat pembuangan sampah, menjadikan kawasan terlihat kumuh dan kotor. Sehingga fungsi kawasan sebagai kawasan pelestarian alam dan juga RTH atau hutan kota milik Kota Depok menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis di lapangan, diketahui beberapa potensi dan kendala yang dimiliki Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas Depok. Potensi (state) dan kendala (pressure) yang dimiliki merupakan faktor yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan tersebut.

Tahura Pancoran Mas memiliki potensi yang didukung oleh keberadaan keanekaragaman hayati di dalamnya, yaitu:

a. Vegetasi (struktur dan komposisi vegetasi)

Bila dilihat dari struktur dan komposisi vegetasi yang ada di dalam Kawasan Tahura Pancoran Mas dapat dilihat bahwa kawasan ini mempunyai tipe penutupan lahan strata B yaitu mempunyai ketinggian antara 14 – 18 meter, untuk jenis tumbuhan berkayu didominasi oleh jenis dari famili Dipterocarpaceae, yaitu untuk jenis *Meranti* sp. Jika dilihat dari penutupan tajuk yang ada di dalam kawasan ini memiliki tajuk yang begitu terbuka sehingga

sinar matahari langsung masuk kedalam kawasan dan berfungsi sebagai perangsang laju pertumbuhan bagi tingkat tumbuhan bawah, liana serta tingkat anakan sehingga banyak sekali tumbuhan bawah yang menutupi permukaan hutan atau lantai hutan. Dari hasil analisis vegetasi yang dilakukan di kawasan ini dihasilkan ± 254 jenis ditemukan di dalam kawasan ini dari semua tingkat pertumbuhan, dimana dari 23 jenis merupakan Liana dan mendominasi 90 % dari luas kawasan.

a) Tumbuhan bawah dan liana

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2006 dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun SLHD Depok 2009 dari Universitas Indonesia pada pertengahan tahun 2009, didapat jenis-jenis tumbuhan liana yang tumbuh di kawasan Tahura Pancoran Mas sebagai berikut: Seserehan, Rarambatan, Gadung, dan Cipatuheur. Sedangkan pada tingkat pertumbuhan tumbuhan bawah yang telah teridentifikasi adalah: rotan, pakis hutan, dan rumput gagajahan.

b) Semai

Pada tingkat semai terdapat beberapa jenis yang telah teridentifikasi, dari kurang lebih 33 jenis yang ditemukan, seperti: meranti, waru, kanyere.

c) Pancang

Pada pertumbuhan tingkat pancang, diketemukan kurang lebih 22 jenis, dimana jenis-jenis yang mendominasi dan sudah teridentifikasi meliputi: waru, meranti, kanyere, dan jambu air.

d) Tiang

Pada pertumbuhan tingkat tiang diketemukan kurang lebih 12 jenis, dimana yang mendominasi dan sudah teridentifikasi adalah: meranti, waru, dan laban.

e) Pohon

Pada pertumbuhan tingkat pohon diketemukan kurang lebih 24 jenis, dengan jenis-jenis yang mendominasi dan sudah teridentifikasi adalah: meranti, waru, jambu, dan kluwih.

b. Satwa Liar

Satwa liar yang hidup Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas sebagian besar adalah dari jenis-jenis burung dan beberapa dari kelas mamalia kecil maupun besar seperti monyet, reptilia dan amfibi. Jenis burung yang terdapat di kawasan Tahura Pancoran Mas merupakan jenis umum yang biasanya terdapat di daerah hutan dataran rendah dan semak. Rendahnya keanekaragaman jenis satwa tersebut sangat dimungkinkan akibat rusaknya atau hilangnya sebagian dari habitat satwaliar tersebut.

Jenis-jenis burung yang masih bisa dijumpai adalah burung jogjog, ciblek, cingcuang, kipasan, dan perenjak. Jenis reptilia yang ditemukan adalah jenis ular tanah dan ular sanca. Jenis mamalia khususnya mamalia kecil yang banyak diketemukan adalah jenis kelelawar. Dari klas amfibi, di kawasan Tahura Pancoran Mas saat ini masih ditemukan katak pohon/katak terbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, di dalam kawasan ini banyak terdapat jenis ular kobra, phyton, ular pucuk kepala merah dan kucing hutan, serta masih banyak lagi jenis lainnya seperti biawak dan musang. Menurut informasi lainnya, kawasan ini dahulunya pernah menjadi habitat bagi satwaliar lain seperti kijang, harimau Jawa, monyet, kancil, rusa, bangau putih, atau kelinci hutan. Tetapi sekarang mereka hanya kerap melihat puluhan ekor ular (kebayakan sanca putih), kadal, tupai, dan burung-burung.

Selain memiliki potensi keanekaragaman hayati, Taman Hutan Raya Pancoran Mas juga memiliki potensi lain yang pada hakekatnya sangat mendukung keberadaannya sebagai kawasan konservasi, seperti:

- a) Keberadaan Tahura Pancoran Mas bagi Kota Depok sebagai hutan kota bagi kota tersebut, seiring dengan semakin berkembangnya Kota Depok dan semakin meningkatnya kebutuhan penduduk kota akan suatu ruang hijau yang menyediakan suatu produk dalam menunjang lingkungan hidup yang bersih, sejuk, indah dan sehat.
- b) Memiliki topografi relatif datar serta ruang yang proposional sehingga memudahkan dalam mobilitas pengelolaan serta pengembangan kawasan.
- c) Aksesibilitas yang mudah dijangkau dari pusat Kota Depok.
- d) Letaknya yang berada pada wilayah pengembangan Kota Depok, serta kota besar DKI Jakarta dan kota lainnya seperti Bogor, dan Bekasi, maka

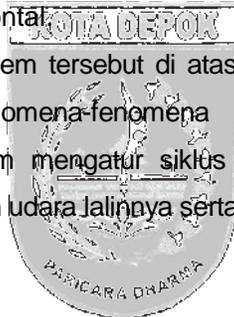
tidak mustahil apabila kedepannya kawasan tersebut menjadi tujuan wisata khususnya ekowisata.

- e) Besarnya motivasi masyarakat sekitar tahura untuk terlibat dalam menjaga kawasan, apabila pengembangannya kearah yang lebih baik dan sudah diimplementasikan dengan sebenarnya.

Namun dalam upaya optimalisasi fungsi, Pemerintah Kota Depok menemui beberapa kendala dan permasalahan yang terdapat di kawasan Tahura Pancoran Mas, antara lain meliputi:

a) Ekosistem

- i. Kondisi ekosistem di Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas kurang mendukung keseimbangan struktur vegetasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- ii. Kondisi ekosistem tersebut di atas, pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya fenomena-fenomena seperti: berkurangnya kemampuan kawasan dalam mengatur siklus hidrologi, penyerap gas karbon dan polutan-polutan udara lainnya serta kebisingan, dan pengatur iklim mikro.



b) Vegetasi

- i. Rendahnya keekaragaman vegetasi dengan struktur tegakan pohon sehingga kawasan Tahura Pancoran Mas didominasi oleh tumbuhan bawah dan liana yang tumbuh subur, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan semai.
- ii. Proses pertumbuhan pohon-pohon terhambat karena yang tempat tumbuhnya yang sebagian besar diselimuti oleh liana (dengan penutupan 90 %).

c) Satwa Liar

Banyaknya kegiatan perburuan, khususnya perburuan terhadap jenis burung dan ular, mengakibatkan rendahnya tingkat keanekaan keduanya, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan ekosistem di kawasan Tahura Pancoran Mas .

d) Pariwisata

Pemerintah Kota Depok nampaknya belum memiliki perencanaan dan kebijakan serta strategi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pariwisata di kawasan Tahura Pancoran Mas. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengakibatkan kawasan tersebut tidak dapat berfungsi lagi, baik secara ekonomis maupun ekologis. Hal tersebut dimungkinkan, karena dengan kondisi yang tidak tertata, akan mengakibatkan terganggunya kestabilan ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalam kawasan pun menjadi tidak seimbang, sehingga ditinjau secara estetis kawasan tersebut tidak lagi memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, dan fungsi ekologisnya pun menjadi tidak optimal. Selain itu, karena struktur sosial masyarakat yang beragam, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, mata pencaharian, maupun asal tempat tinggal, mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap kawasan cukup beragam pula. Rendahnya bentuk persepsi masyarakat, khususnya dari para kaum muda, terhadap kawasan menyebabkan kawasan ini terlepas dari pandangan mereka tentang fungsi dan manfaat dari kawasan tersebut.

e) Pola Penggunaan Lahan

- i. Sebagian masyarakat sekitar mengadakan kegiatan pembukaan lahan untuk dijadikan lahan kebun serta pekarangan masyarakat.
- ii. Masyarakat sekitar ada yang memanfaatkan lahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangganya, sehingga menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap.
- iii. Pada beberapa sudut kawasan, terlihat pagar pembatas kawasan dijadikan tempat menjemur pakaian dan memelihara ternak.
- iv. Pemanfaatan yang bersifat negatif yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu sebagai tempat menjemur pakaian, tempat pembuangan sampah, sebagai pangkalan roda tiga maupun roda empat, serta kebun. Hal tersebut tentu saja dapat menjadi ancaman bagi keutuhan kawasan pada masa sekarang maupun akan datang.

f) Aksesibilitas

Akses menuju Tahura Pancoran Mas harus melewati beberapa lokasi kemacetan di Kota Depok; selain itu lokasi kawasan juga tidak nampak dari jalan utama di Kota Depok, sehingga kawasan tersebut sulit dijangkau dan ditemui oleh masyarakat luar maupun dalam Kota Depok sendiri.



Gambar 2.10: Taman Hutan Rakyat di Wilayah Kota Depok.



Pintu gerbang masuk Taman Hutan Raya (Tahura) Pancoran Mas dan papan peringatan yang dapat ditemui di dalam lingkungan Tahura



Beberapa jenis vegetasi yang dilindungi, yang dapat dijumpai di Tahura Pancoran Mas-Kota Depok (Agustus, 2009)



Beberapa jenis tanaman yang baru ditanam di lingkungan Tahura, dalam rangka program penghijauan di Kota Depok (Agustus 2009)



Meskipun sudah terdapat peraturan untuk tidak membuang sampah di lokasi Tahura namun kenyataannya masih ada warga yang menjemur pakaian bahkan membuang sampah padahal telah disediakan tempat sampah (Agustus, 2009)

2. Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Wilayah DAS Ciliwung secara geografis terletak antara 06°05' Lintang Selatan sampai 06°40' Bujur Timur. Bagian hulu Sungai Ciliwung berada di Gunung Telaga Mandalawangi (Kabupaten Bogor) dan bagian hilir bermuara di Teluk Jakarta dengan panjang bentang mencapai 76 km dan luas DAS mencapai 322 km². Batas wilayah DAS Ciliwung adalah DAS Cisadane di sebelah barat dan DAS Citarum di sebelah timur.

Wilayah DAS Ciliwung di Kota Depok melingkupi aliran sepanjang 24 km dan sempadan 100 meter (luas 413,38 ha), yang secara administratif menagaliri 10 (sepuluh) kelurahan yang berada di sisi kanan-kiri sungai.

Untuk menyusun status ekologis keanekaragaman hayati ini di wilayah perairan Sungai Ciliwung digunakan data keanekaragaman hayati makrozoobentos, plankton, vegetasi, lichenes, arthropoda dan cacing tanah di DAS Ciliwung Kota Depok.

Secara keseluruhan, dari semua stasiun pencuplikan di wilayah Kota Depok, ditemukan 34 jenis makrozoobentos yang terdiri dari 9 kelas yaitu Annelida, Coleoptera, Crustacea, Diptera, Ephemeroptera, Gastropoda, Odonata, Pelecypoda, dan Trichoptera. Terdapat 7 jenis spesies yang predominan di delapan stasiun pencuplikan sepanjang DAS Ciliwung wilayah Kota Depok. Ketujuh jenis spesies predominan tersebut termasuk kelas Annelida, Diptera, Gastropoda dan Trichoptera.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lempalhi (2006), di sekitar bantaran Ciliwung dapat dijumpai ikan gabus (*Chana chana striata*), sapu-sapu (*Lyporascus pardalis*), yang dapat dijadikan sebagai bioindikator di perairan yang tercemar limbah domestik. Selain itu, dapat dijumpai pula lele (*Clarias batrachus*) dan mujair (*Oreochromis mossambicus*).

Pada saat-saat tertentu kandungan oksigen terlarut di dalam perairan Sungai Ciliwung mengalami penurunan akibat tingginya tingkat pencemaran di perairan tersebut. Tingkat pencemaran yang tinggi tersebut dapat diakibatkan oleh semakin

meningkatnya aktivitas domestik di sekitar DAS Ciliwung. Seperti diketahui, di sepanjang DAS Ciliwung dapat ditemukan beberapa sumber pencemar, seperti:

- a. Anak sungai (Curug Nganten dan Kali Panus)
- b. Perumahan
- c. Saluran drainase kota
- d. Outlet pengolahan air bersih PDAM
- e. Kelompok industri kecil (tahu dan tempe)
- f. Pertanian lahan kering dan sampah
- g. Tempat pembuangan sampah rumah tangga.

Berdasarkan kondisi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan terdapat kecenderungan bahwa, keanekaragaman hayati makrozoobentos di Sungai Ciliwung dapat mengalami penurunan pada saat terjadi penurunan kandungan oksigen terlarut.

Mengingat pencemaran oleh limbah domestik cenderung mengalami peningkatan, maka dirasakan perlu upaya pemantauan secara berkala terhadap biota air, dalam rangka menentukan spesies indikator yang bermanfaat bagi sistem peringatan dini secara kualitatif.

C. AIR

1. Sungai Ciliwung

Sumberdaya air merupakan sumberdaya terpenting bagi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas yang dilakukannya termasuk kegiatan pembangunan. Salah satu sumberdaya air yang penting bagi kehidupan manusia adalah sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan daerah pergerakan dan sebaran air dalam batas hidrologis yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dimana makhluk hidup dan lingkungannya berinteraksi secara dinamik dan terdapat saling ketergantungan (interdependensi) antara komponen-komponen penyusunnya.

Letak wilayah DAS Ciliwung secara geografis adalah antara 06o05' Lintang Selatan sampai 06o40' Bujur Timur. Bagian hulu Sungai Ciliwung berada di Gunung Telaga Mandalawangi (Kabupaten Bogor) dan bagian hilir bermuara di Teluk Jakarta

dengan panjang bentang mencapai 76 km dan luas DAS mencapai 322 km². Batas wilayah DAS Ciliwung adalah DAS Cisadane di sebelah barat dan DAS Citarum di sebelah timur.

Kota Depok yang memiliki luas wilayah 200,29 km² dan jumlah penduduk 1.530.000 (Proyeksi tahun 2008) dilalui oleh aliran Sungai Ciliwung. Populasi penduduk yang cukup tinggi di sepanjang DAS Ciliwung tersebut, mengakibatkan peningkatan kebutuhan manusia akan sumberdaya, sehingga berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan setempat, yang meliputi juga lingkungan perairannya yaitu sungai. Hal tersebut disebabkan pada umumnya sungai digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta aktivitas manusia sehari-hari. Selain itu juga dengan adanya tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan, baik untuk aktivitas pertanian, perumahan, industri, rekreasi, maupun aktivitas lain akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang paling berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya air adalah perubahan dari kawasan resapan air ke penggunaan lainnya seperti pertanian, perumahan ataupun industri. Berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kelebihan air (banjir) pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Selain itu juga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di perairan sungai tidak dapat dihindarkan lagi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan keanekaragaman hayati baik yang ada di atasnya, di sepanjang bantaran sungai maupun kehidupan biota di perairan tersebut.

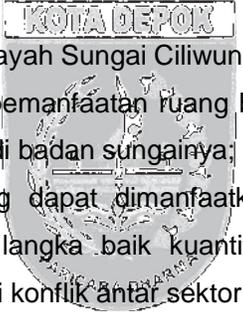
Perubahan kualitas lingkungan perairan diakibatkan oleh berbagai polutan yang bersumber antara lain dari industri dan limbah rumah tangga. Umumnya, polutan di dalam sungai terdiri dari senyawa organik maupun inorganik. Pengaruh keberadaan senyawa-senyawa polutan tersebut pada badan perairan dapat dideteksi melalui faktor kimia fisika air maupun kondisi ekologis ekosistem perairan.

Hasil kajian pada tahun 2001 yang dilakukan oleh DKLH Kota Depok, menunjukkan bahwa kondisi DAS Ciliwung sangat kritis, di mana rasio aliran mantap atau perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air atau kondisi debit aliran sungai yang diharapkan selalu ada sepanjang tahun telah jauh melebihi 100%.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan, dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS-DAS dalam kawasan tersebut, sehingga fungsi ekologis, sosial dan ekonomis sungai menjadi optimal.

Permasalahan di sepanjang DAS Ciliwung timbul karena adanya peningkatan aktivitas domestik, pertanian, perikanan dan industri serta perubahan penggunaan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai Ciliwung wilayah Kota Depok, yang mengakibatkan dalam beberapa dekade terakhir ini aktivitas-aktivitas tersebut sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas air permukaan. Seperti diketahui, wilayah Sungai Ciliwung sebagai pemasok air baku bagi Jakarta sangat berkorelasi dengan permasalahan ekosistem di wilayah sekitarnya, yaitu Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya air Ciliwung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 
- a. Ketersediaan air di wilayah Sungai Ciliwung secara umum sangat kritis;
 - b. Belum terkendalinya pemanfaatan ruang baik di sepanjang sempadan sungai maupun pengelolaan di badan sungainya;
 - c. Ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan semakin mahal dan langka baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga menimbulkan berbagai konflik antar sektor maupun antar wilayah;
 - d. Fluktuasi ketersediaan air permukaan sangat tinggi, sehingga sering terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Hal tersebut merupakan wujud dari hulu DAS yang fungsi konservasinya telah jauh berkurang;
 - e. Belum terjalinnya sinergi antar wilayah antara Propinsi/Kabupaten/Kota di daerah hulu dengan Propinsi/Kabupaten/Kota di daerah hilir dalam rangka penanganan hulu DAS. Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang telah terjadinya kerusakan DAS yang berdampak terhadap permasalahan surplus/defisit neraca air sepanjang tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Depok yang dilalui oleh Sungai Ciliwung, selain diperlukan upaya penataan ruang yang optimal dan koordinasi antar pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui oleh sungai tersebut. Di samping itu diperlukan pula sosialisasi kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar DAS Ciliwung untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mencemari perairan dan lahan

dan mengakibatkan degradasi dalam kuantitas dan kualitas ekosistem perairan Sungai Ciliwung.

Situ

Kota Depok memiliki 30 buah situ dengan luas total 147,42 ha. Selain berperan sebagai kawasan resapan air di Kota Depok, situ di Kota Depok berperan pula sebagai kawasan resapan air bagi DKI Jakarta. Keseluruhan situ tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Depok (termasuk 4 situ yang terdapat di dalam Kampus UI Depok), dengan karakter dan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan data dan pengamatan, diketahui bahwa, dari 26 situ yang ada di Kota Depok diperkirakan sebagian besar situ berada dalam kondisi kritis, seperti: mengalami pendangkalan, penyusutan volume air, berbau, ditumbuhi gulma. Sekitar 19 situ memiliki kelompok kerja (pokja) yang pada prinsipnya bertugas membantu Pemerintah Kota Depok dalam fungsi pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan situ. Dalam hal ini, dari ke-19 situ yang telah memiliki pokja tersebut, hanya 6 situ (36,45 ha) yang kondisi fisiknya tergolong baik, lainnya tergolong kurang baik 4 situ (26 ha), kondisi rusak/kualitas buruk ada 4 situ (33,30 ha) dan yang tidak berfungsi ada 5 situ (23,25 ha). Secara umum, kondisi situ sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di sekitarnya dan kurangnya campur tangan Pemerintah Kota Depok dalam hal upaya pengelolaan dan pemeliharaannya.

Untuk lebih jelasnya tentang kondisi keseluruhan situ di Kota Depok dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.3.** Inventarisasi Kondisi Situ di Kota Depok

Kecamatan/ Kelurahan	Nama Situ	Luas (ha)	Kedalaman (m)	Keterangan/Kondisi Permasalahan
I. Cimanggis				
1. Harjamukti	1. Gede	1	-	Akan dikembangkan Pondok Pesantren
	2. Buperta	7,2	2 – 4	Kondisi situ terawat, perlu pengerukan, <i>retaining wall</i> & saluran gendong.
2. Mekarsari	3. Tipar/Cicadas	11,32	2 – 3	Pencemaran limbah domestik & industri, banyak sampah & gulma air, pendangkalan situ
3. Tugu	4. Pedongkelan	6,25	2 – 5	Sebagian situ untuk karamba, pencemaran limbah industri & domestik, banyak sampah & gulma air
4. Cislak Pasar	5. Gadog	1,3	1 – 5	Sebagian untuk karamba, pencemaran sampah & limbah domestik, RPH, pendangkalan situ & gulma air
5. Curug	6. Rawa Kalong	8,25	1 – 3	Sebagian situ untuk karamba, pencemaran oleh limbah industri & domestik, banyak gulma air
6. Tapos	7. Patinggi	5,5	1	Eksplorasi penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar, pendangkalan,
7. Jatijajar	8. Jatijajar	6,5	1 – 4	sebagian untuk karamba & saung apung, pencemaran limbah domestik, banyak sampah & gulma air
8. Cilangkap	9. Cilangkap	6	1 – 2	Sebagian lahan situ untuk karamba, pencemaran limbah domestik, pendangkalan situ & banyak sampah.
<i>Jumlah Situ</i>		9		
II. Pancoran Mas				
1. Rangkaan Jaya	1. Asih Pulo*	2	2–3	Perlu <i>retaining wall</i> , perbaikan inlet/outlet & pengerukan
2. Depok	2. Rawa Besar	17	1 – 2	Pencemaran limbah domestik, air hitam, banyak sampah & gulma air. Perlu pengembangan untuk wisata & pembebasan tahanan sempadan ± 50 m
3. Bojong Pondok Terong	3. Citayam	6	2 – 4	Penggunaan sebagian badan air untuk karamba, sempadan menjadi rumah masyarakat sekitar
4. Pancoran Mas	4. Pitara	0,20	-	Air bersih, tidak pernah kering, ada mata air, sampah, batas tidak jelas
	5. Pancoran Mas	0,60	1 – 4	Pencemaran limbah domestik, pendangkalan, masih dapat dijumpai mata air.
<i>Jumlah Situ</i>		5		



III. Sawangan				
1. Sawangan	1. Bojong Sari/Sawangan	28,25	3 – 4	Ditumbuhi eceng gondok & gulma air
2. Pengasinan	2. Pengasinan	± 6	1 – 4	Sudah direhabilitasi, terawat, air bersih, sarana rekreasi, sempadan dimanfaatkan untuk usaha tanaman hias
	<i>Jumlah Situ</i>	2		
IV. Beji				
1. Beji	1. Pladen	1,5	0,3 – 1	Tercemar, air hitam, tidak pernah kering, limbah domestik berserakan di bantaran situ
2. Pondok Cina	2. Kenanga	2	1 – 4	Di Kampus UI, situ tidak terawat, kontribusi limbah domestik dari Pasar Kemiri, dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi dan memancing.
	3. Puspita	2	1 – 4	
	4. Mahoni	4	1 – 4	
5. Agathis	4	1 – 4		
	<i>Jumlah Situ</i>	5		
V. Sukmajaya				
1. Kalibaru	1. Cilodong	9,5	1–3	Pencemaran limbah domestik, pendangkalan, gulma air (teratai), akan dibangun perumahan di sekitar sempadan
2. Sukmajaya	2. Bahar	1,25		Pencemaran limbah & sampah domestik, dan gulma air
3. Sukmajaya (Studio Alam TVRI)	3. Studio Alam	7,5	1 – 2	Pencemaran limbah domestik, pendangkalan & gulma air
4. Bhakti Jaya	4. Pangarengan	2	3	Sebagian situ untuk karamba, pendangkalan, alih fungsi lahan oleh masyarakat & gulma air
	<i>Jumlah Situ</i>	20,25		
VI. Limo				
1. Cinere	1. Krukut	-		Telah diuruk menjadi perumahan kumuh masyarakat, dilalui pipa gas alam
	<i>Jumlah Situ</i>	1		
	<i>Total Situ</i>	26		
	<i>Kisaran Luas</i>	0,2 – 28,25 ha		

Sumber: Diolah dari Basis data SLHD Kota Depok, 2004; LGSP-USAID-Pemko Depok, Mei 2006 & Lempalhi Kota Depok, Oktober 2006.

Keterangan: *) Situ Asih Pulo direhabilitasi oleh masyarakat Situ Asih Pulo dan LSM Lempalhi Kota Depok pada tahun 2005 – 2006.

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa penyebab terdegradasinya kualitas dan kondisi situ-situ tersebut, sebagian besar adalah akibat aktivitas masyarakat di sekitarnya, seperti membuang sampah domestik di sekitar bantaran situ, membuat jaring apung dalam jumlah yang telah melewati daya dukung situ, menguruk perairan situ untuk dijadikan perumahan kumuh (alih fungsi lahan) di bantaran situ. Bahkan dapat dijumpai pula aktivitas beberapa industri di sekitar situ, seperti di Situ Tipar, Situ Asih Pulo, dan sebagainya. Disinyalir pula, kondisi Situ Gadog yang permukaannya dipenuhi dengan gulma air dan sampah domestik serta kerap menimbulkan bau busuk terhadap lingkungan di sekitarnya, diakibatkan oleh aktivitas salah satu Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang berlokasi di sekitar Pasar Cisalak. Secara umum, keberadaan pabrik di sekeliling situ-situ tersebut menyebabkan penumpukan limbah cair maupun padat yang merupakan hasil aktivitasnya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya situ karena telah terjadi pendangkalan. Demikian pula halnya dengan kondisi keempat situ yang berada di lingkungan kampus UI Depok, yang meskipun lokasinya ‘terisolasi’ dari aktivitas masyarakat luar kampus, nampak permukaan perairannya dipenuhi oleh sampah plastik sisa bungkus makanan dan minuman, puntung rokok, dan sebagainya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan banyaknya pengunjung dari luar kampus yang datang untuk sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan di sekitar situ, memancing, piknik dan sebagainya, yang tidak peduli dengan keberadaan dan fungsi situ-situ tersebut. Bahkan di bagian *inlet* Situ Kenanga yang berlokasi di depan Gedung Rektorat UI, dapat dijumpai sampah-sampah plastik, kertas bungkus dan sebagainya yang mengalir bersama aliran air yang berasal dari Pasar Kemiri Muka.

Mengingat fungsi situ di Kota Depok sebagai kawasan resapan air bagi Kota Depok dan DKI Jakarta, maka disarankan untuk dilakukan pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut mengingat, berdasarkan pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2005, hampir sebagian besar situ di Kota Depok mengalami degradasi, baik ditinjau dari luasan, kedalaman, kebersihan, maupun pemanfaatannya. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat sekitar situ agar mereka tidak berperilaku yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gangguan terhadap situ.

Gambar 2.11. Gambar Situ di Kecamatan Cimanggis



Situ Buperta. Permukaan perairan di bagian tengah situ tampak agak jernih dan bersih, walaupun di bagian tepi situ masih tampak permukaan air yang keruh dan terdapat limbah padat hasil aktivitas masyarakat di sekitarnya (Agustus, 2009)



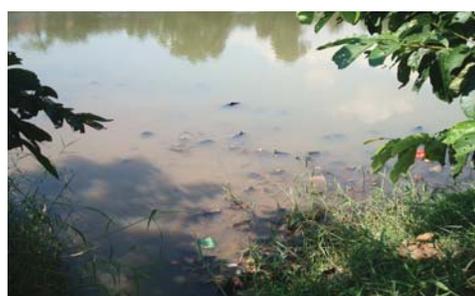
Situ Gadog. Kondisi permukaan Situ Gadog sudah tidak kelihatan bentuknya sebagai situ karena dipadati oleh gulma dan limbah organik, yang selain berasal dari aktivitas masyarakat juga dari Tempat Pemotongan Hewan di Cisalak yang seringkali juga menimbulkan bau busuk ke lingkungan sekelilingnya (Agustus, 2009).



Situ Patinggi. Permukaan air di Situ Patinggi bersih dan jernih, tidak nampak sampah, sangat terawat (Agustus, 2009)



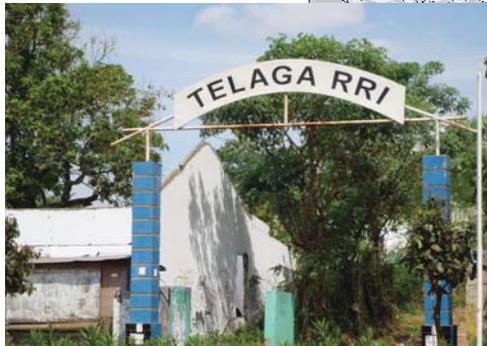
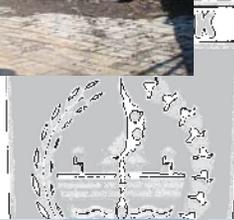
Situ Tipar. Kondisi permukaan perairan di Situ Tipar kotor, air keruh, terdapat lumut dan dipenuhi sampah padat yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat sekitar. Oleh karena itu dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya pendangkalan kedalaman serta penyusutan luasan situ



Situ Cilangkap. Kondisi permukaan perairan Situ Cilangkap relatif jernih dan bersih. Namun di sisi lain dari Situ Cilangkap masih terdapat jaring apung yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya pendangkalan kedalaman serta penyusutan luasan situ tersebut. Di sisi lain terdapat daun-daunan serta sampah padat hasil aktivitas masyarakat sekitar (Juli , 2009)



Situ Jatijajar. Kondisi permukaan Situ Jatijajar relatif jernih, dan di tepi situ telah didirikan saung bagi pengunjung yang ingin berwisata di situ tersebut Juli, 2009



Situ Pengarengan (Situ Telaga RRI). Permukaan air di Situ Pengarengan bersih dan jernih, tidak nampak sampah (Agustus, 2009)



Situ Pedongkelan. Tampak bersih dan terawat, serta dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata (rekreasi sepeda air) (September, 2009).



Gambar 2.12. Gambar Situ di kecamatan Pancoran Mas

Situ Asih Pulo. Suasana dan kondisi Situ Asih Pulo yang telah tertata apik dan dimanfaatkan sebagai kawasan rekreasi air. Permukaan air jernih dan bersih, tidak nampak sampah karena di lokasi situ disiapkan tempat sampah. Bangunan sejenis pendopo yang terdapat di lokasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Depok (Agustus, 2009)



Situ Pancoran Mas. Situ Pancoran Mas memiliki beberapa mata air yang nampak semakin tidak terawat. Mata air tersebut terkesan tidak terawat karena terlihat begitu banyak serasah dan sampah padat hasil aktivitas masyarakat sekitar. Bahkan saluran airnya kelihatan berlumut. Permukaan air Situ Pancoran Mas kecoklat-coklatan, masih terdapat keramba ikan. Bahkan di sisi lain terlihat begitu banyak sampah daun-daunan dan juga sampah hasil aktivitas masyarakat sekitar (Agustus, 2009)



Situ Citayam. Permukaan perairan Situ Citayam yang dipadati dengan sampah dan lumut, dan sebagian dari sisi situ terdapat keramba ikan yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pendangkalan, kedalaman serta penyusutan luasan situ tersebut. Saluran airnya dipadati limbah padat hasil aktivitas masyarakat sekitar. Namun di sisi lain dari situ tersebut, sudah di keruk, sehingga permukaan airnya terlihat agak jernih (Juli, 2009).



Situ Rawa Besar. Permukaan air di Situ Rawa Besar sudah terlihat lebih jernih, tidak terlihat adanya sampah. Namun pada sisi lain dari situ tersebut masih terdapat keramba ikan yang belum dibebaskan. Begitu juga dengan saluran airnya, terlihat masih dipenuhi dengan limbah padat hasil aktivitas masyarakat setempat (Agustus, 2009)

Gambar 2.13. Gambar Situ di Kecamatan Sawangan

Situ Pengasinan. Suasana dan kondisi di Situ Pengasinan yang telah dinormalisasi. Telihat permukaan air yang bersih, dan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan rekreasi, serta dan sempadan yang ditanami pepohonan sebagai fungsi penghijauan (September, 2009)



Situ Sawangan. Kondisi permukaan perairan Situ Sawangan tampak relatif jernih, karena sebagian sudah dikeruk sehingga kelihatan bersih. Namun di sisi lain dari Situ Sawangan masih terdapat kerambah ikan / jaring apung yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya pendangkalan kedalaman serta penyusutan luasan situ tersebut (Agustus, 2009)

Gambar 2.14. Gambar Situ di Kecamatan Beji



Situ Kenanga. Permukaan perairan situ yang terletak di depan Gedung Rektorat Universitas Indonesia tampak jernih dan bebas dari tumpukan limbah domestik seperti situ lain di kampus UI Depok. (Agustus, 2009)



Situ Agathis. Permukaan perairan tampak berwarna hijau, terdapat lumut, ganggang, dan daun-daun yang berguguran dari pohon-pohon yang terdapat di sekitarnya (Agustus, 2009)



Situ Mahoni. Permukaan perairan tidak terawat, keruh, dipenuhi oleh limbah domestik, dan tampak berbuih, yang diduga akibat aktivitas domestik di sekitarnya (Agustus, 2009)



Situ Puspa. Permukaan perairan di bagian tengah situ tampak agak jernih dan bersih, tidak seperti yang nampak di bagian tepi yang keruh dan terdapat limbah padat hasil aktivitas masyarakat di sekitarnya (Agustus, 2009)



Permukaan air di situ Pladen kotor agak kehitam-hitaman, dipenuhi sampah padat hasil aktivitas masyarakat sekitar. Sedangkan disisi lain dari situ Pladen ditumbuhi gulma (Juli, 2009)

Gambar 2.15. Gambar Situ di Kecamatan di Sukmajaya

Situ Bahar. Kondisi permukaan air di Situ Bahar nampak agak coklat kehijauan pada sempadannya telah dibangun jalan setapak yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung dan masyarakat sekitar (Agustus, 2009)



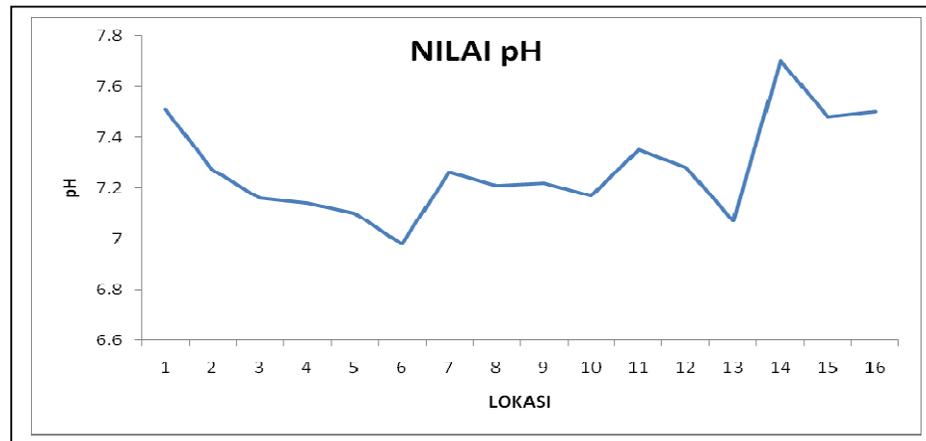
Situ Studio Alam. Permukaan air di Situ Studio Alam cenderung berwarna coklat, pada sisi lain dari situ tersebut masih terdapat sampah yang berasal dari daun-daunan dan juga sampah padat yang berasal dari aktivitas masyarakat (Agustus, 2009)



Situ Cilodong. Permukaan perairan Situ Cilodong terlihat bersih dan jernih, namun pada sisi lain terdapat sampah padat hasil aktivitas masyarakat sekitar. Pada sempadannya telah dibangun jalan setapak yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung dan masyarakat sekitar (Agustus, 2009)

D. KUALITAS AIR SITU

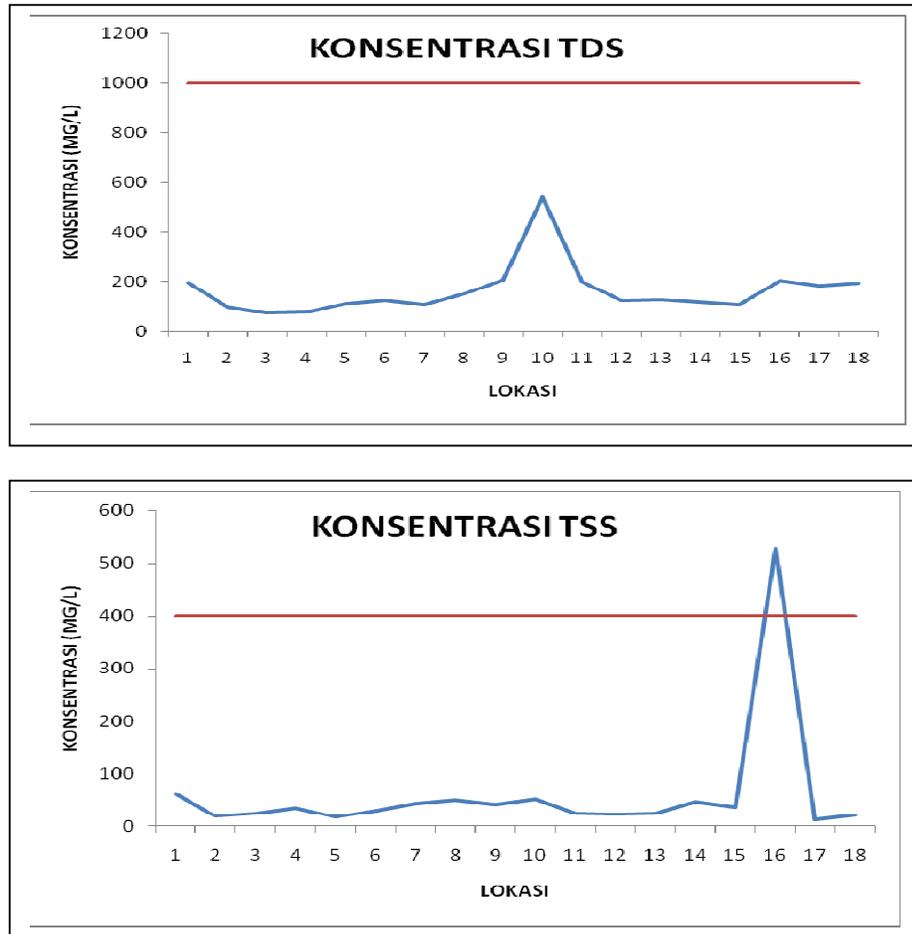
Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai parameter pH pada kualitas air situ di beberapa lokasi di Depok diketahui bahwa nilai pH masih berada pada kisaran yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan yaitu antara 6-9.



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Situ Bahar | 10. Situ Gadog |
| 2. Situ Asih | 11. Situ Pancoran Mas |
| 3. Situ Bojong Sari | 12. Situ Cilodong |
| 4. Situ Pengasinan | 13. Situ Buperta |
| 5. Situ Jatijajar | 14. Situ Rawa Kalong |
| 6. Situ Cilangkap | 15. Situ Studio Alam |
| 7. Situ Rawa Besar | 16. Situ Tipar |
| 8. Situ Pladen | 17. Situ UI |
| 9. Situ Pengarengan | 18. Situ Pendongkelan |

Gambar 2.16. Nilai pH di Beberapa Situ di Depok, 2009



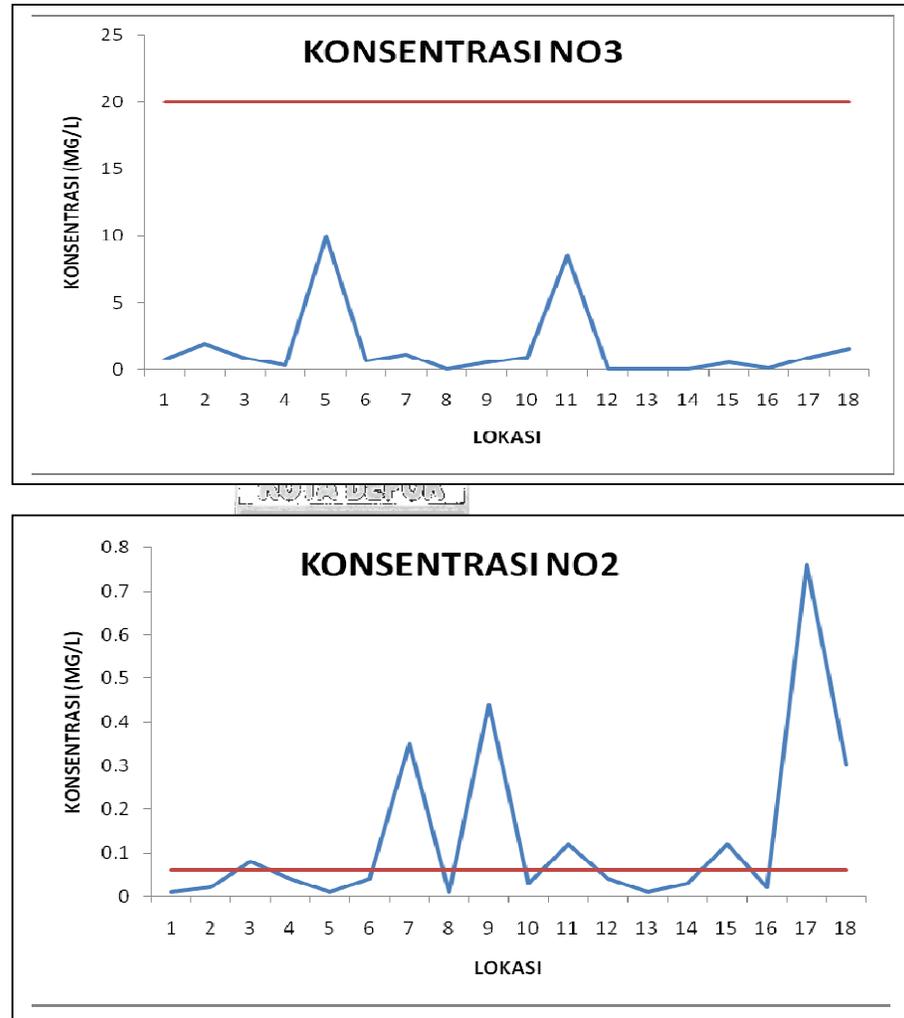
Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Situ Bahar | 10. Situ Gadog |
| 2. Situ Asih | 11. Situ Pancoran Mas |
| 3. Situ Bojong Sari | 12. Situ Cilodong |
| 4. Situ Pengasinan | 13. Situ Buperta |
| 5. Situ Jatijajar | 14. Situ Rawa Kalong |
| 6. Situ Cilangkap | 15. Situ Studio Alam |
| 7. Situ Rawa Besar | 16. Situ Tipar |
| 8. Situ Pladen | 17. Situ UI |
| 9. Situ Pengarengan | 18. Situ Pendongkelan |

Gambar 2.17. Konsentrasi TDS dan TSS di Beberapa Situ di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter TDS (*total dissolved solid*) dan TSS (*total suspended solid*) pada kualitas air situ di beberapa lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, kecuali konsentrasi TSS di lokasi pengamatan Situ Tipar yang telah melampaui nilai baku mutu. TDS biasanya disebabkan oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Nilai TDS perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri). Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan alami tidak bersifat toksik,

akan tetapi jika berlebihan, terutama TSS, dapat meningkatkan nilai kekeruhan, yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan.



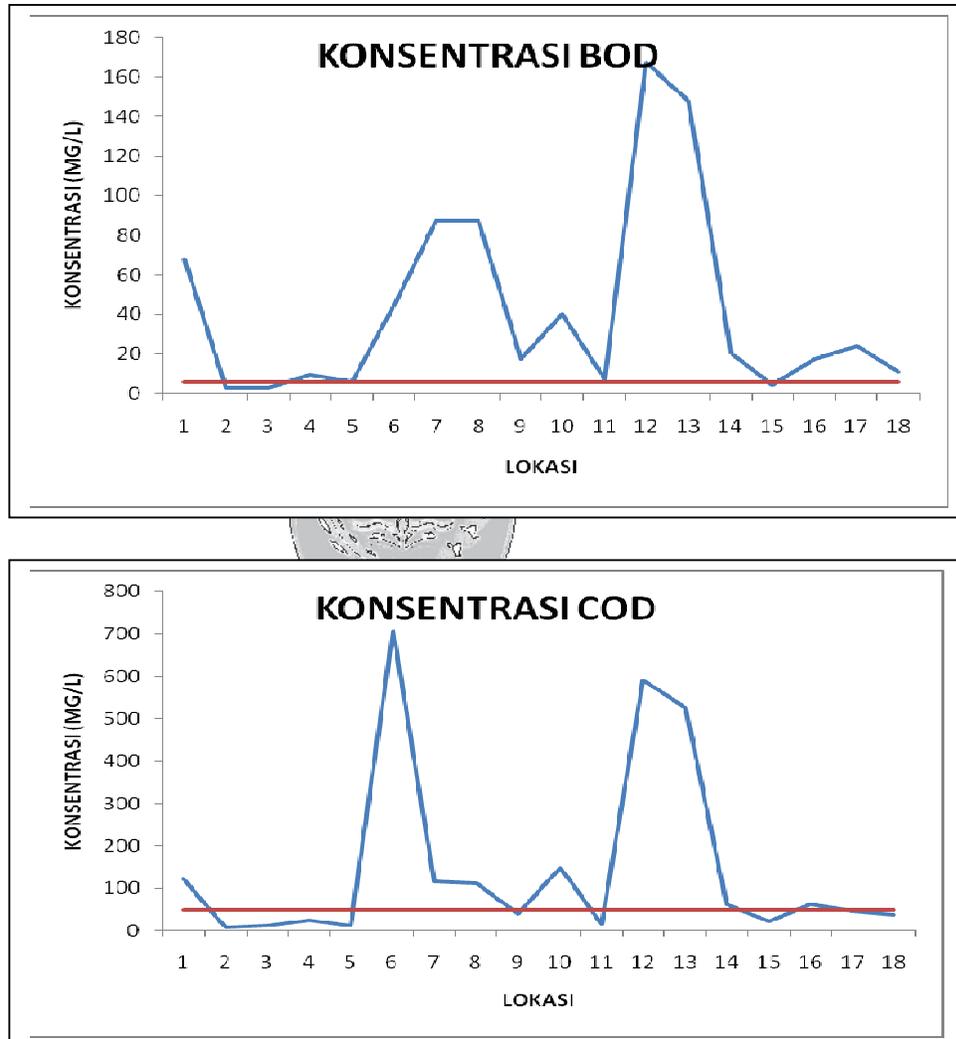
Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Situ Bahar | 10. Situ Gadog |
| 2. Situ Asih | 11. Situ Pancoran Mas |
| 3. Situ Bojong Sari | 12. Situ Cilodong |
| 4. Situ Pengasinan | 13. Situ Buperta |
| 5. Situ Jatijajar | 14. Situ Rawa Kalong |
| 6. Situ Cilangkap | 15. Situ Studio Alam |
| 7. Situ Rawa Besar | 16. Situ Tipar |
| 8. Situ Pladen | 17. Situ UI |
| 9. Situ Pengarengan | 18. Situ Pendongkelan |

Gambar 2.18. Konsentrasi Nitrat dan Nitrit di Beberapa Situ di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis parameter Nitrat dan Nitrit pada kualitas air situ di beberapa lokasi pengamatan di sekitar Depok diketahui bahwa konsentrasi Nitrat di semua lokasi pengamatan masih di bawah baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan untuk konsentrasi Nitrit pada umumnya telah melampaui baku mutu yang

ditetapkan. Tingginya konsentrasi Nitrit biasanya disebabkan oleh terganggunya proses reduksi nitrat atau denitrifikasi pada kondisi anoksik (tidak ada oksigen). Proses ini juga melibatkan jamur dan bakteri. Dinitrogen oksida adalah produk utama dari denitrifikasi pada perairan dengan kadar oksigen sangat rendah, sedangkan molekul nitrogen adalah produk utama dari proses denitrifikasi pada perairan dengan kondisi anaerob.

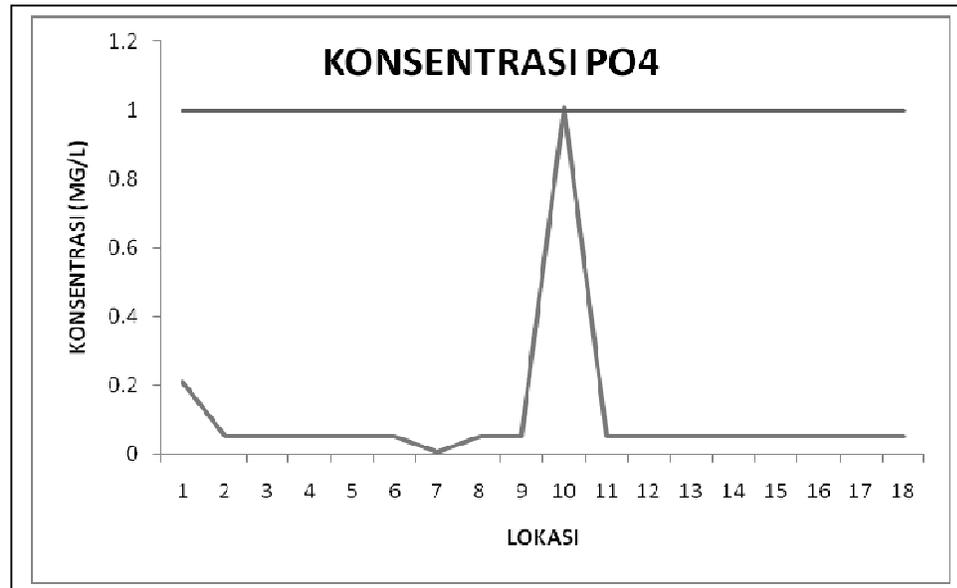


Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Situ Bahar | 10. Situ Gadog |
| 2. Situ Asih | 11. Situ Pancoran Mas |
| 3. Situ Bojong Sari | 12. Situ Cilodong |
| 4. Situ Pengasinan | 13. Situ Buperta |
| 5. Situ Jatijajar | 14. Situ Rawa Kalong |
| 6. Situ Cilangkap | 15. Situ Studio Alam |
| 7. Situ Rawa Besar | 16. Situ Tipar |
| 8. Situ Pladen | 17. Situ UI |
| 9. Situ Pengarengan | 18. Situ Pendongkelan |

Gambar 2.19. Konsentrasi BOD, dan COD di Beberapa Situ di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter BOD dan COD di semua lokasi pengamatan pada umumnya telah melampaui baku mutu yang ditetapkan. Hal ini diduga disebabkan karena telah terjadi pencemaran bahan organik baik oleh kegiatan domestik maupun industri.



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Situ Bahar | 10. Situ Gadog |
| 2. Situ Asih | 11. Situ Pancoran Mas |
| 3. Situ Bojong Sari | 12. Situ Cilodong |
| 4. Situ Pengasinan | 13. Situ Buperta |
| 5. Situ Jatijajar | 14. Situ Rawa Kalong |
| 6. Situ Cilangkap | 15. Situ Studio Alam |
| 7. Situ Rawa Besar | 16. Situ Tipar |
| 8. Situ Pladen | 17. Situ UI |
| 9. Situ Pengarengan | 18. Situ Pendongkelan |

Gambar 2.20. Konsentrasi Total Fosfat di Beberapa Situ di Depok, 2009

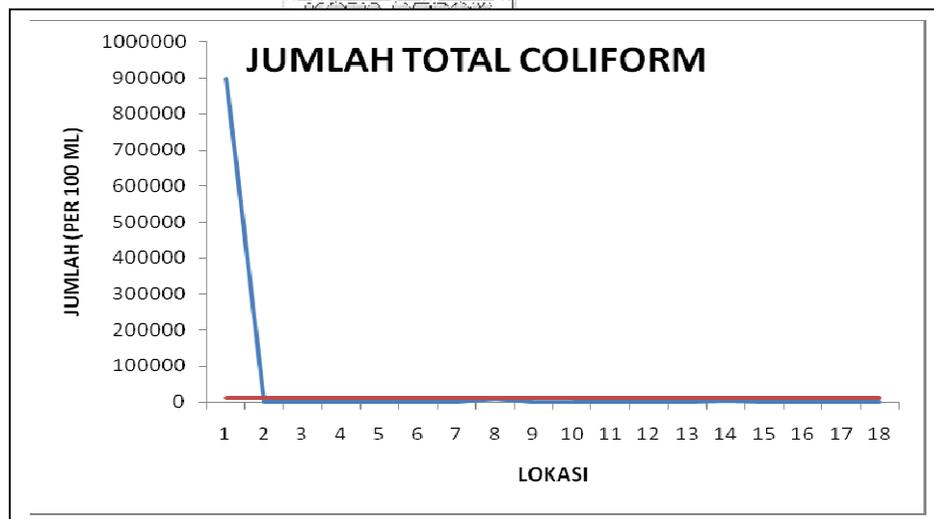
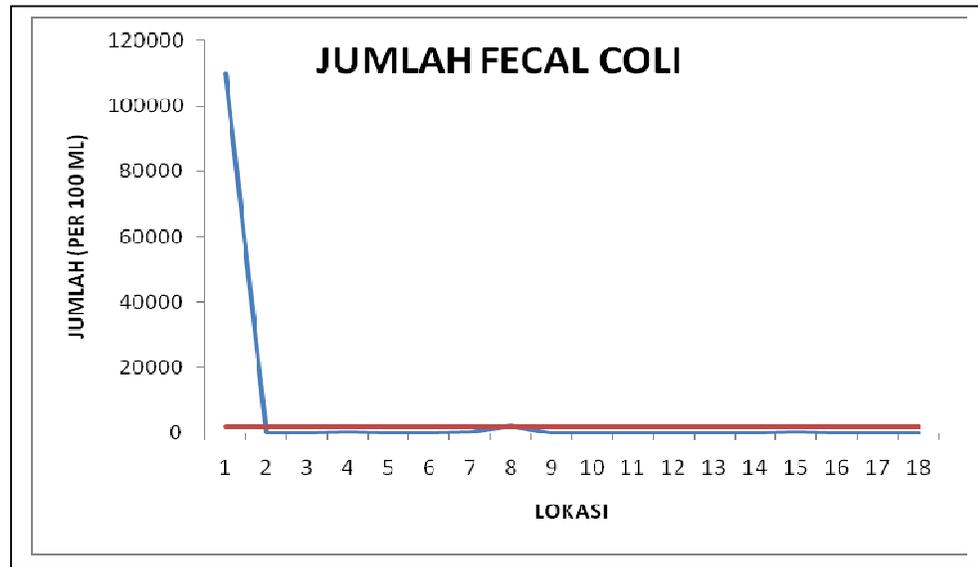
Konsentrasi Total Fosfat berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2009 menunjukkan nilai konsentrasi yang masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Selain berasal dari dekomposisi bahan organik, sumber antropogenik sumber fosfor adalah limbah industri dan domestik, yakni fosfor yang berasal dari deterjen. Limpasan dari daerah pertanian yang menggunakan pupuk juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberadaan fosfor.

Fosfor banyak digunakan sebagai pupuk, sabun, atau deterjen, bahan industri keramik, minyak pelumas, produk minuman dan makanan, katalis, dan sebagainya. Dalam industri, polifosfat ditambahkan secara langsung untuk mencegah terjadinya pembentukan karat dan korosi pada peralatan logam. Namun demikian, fosfor tidak bersifat toksik bagi manusia, hewan, dan ikan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter lainnya seperti Zn, Fenol, amonia, klorida, sulfat, deterjen, Fe, Co, F, dan Mn pada semua lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan. Senyawa fenol yang merupakan senyawa aromatik dengan satu atau beberapa gugus hidroksil yang terikat secara langsung pada cincin benzena, dihasilkan dari proses pemurnian minyak, industri kimia, tekstil, plastik, dan lain-lain. Kondisi tercemarnya sungai-sungai di sekitar Depok oleh hal-hal tersebut di atas dapat diduga sebagai penyebab tingginya konsentrasi fenol.

Sedangkan Zn termasuk unsur yang terdapat dalam jumlah berlimpah di alam. Ion seng mudah terserap ke dalam sedimen dan tanah. Seng termasuk unsur yang esensial bagi makhluk hidup, yakni berfungsi untuk membantu kerja enzim. Seng juga diperlukan dalam proses fotosintesis sebagai agen bagi transfer hidrogen dan berperan dalam pembentukan protein. Davis dan Cornwell (1991) menyatakan bahwa seng tidak bersifat toksik pada manusia, akan tetapi pada kadar yang tinggi dapat menimbulkan pada air.

Untuk Amonia, walaupun tidak ada baku mutu yang mengaturnya tetapi tetap perlu mendapat perhatian mengingat keberadaan senyawa ini terkait dengan masalah kebauan yang dapat ditimbulkannya.



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Situ Bahar | 10. Situ Gadog |
| 2. Situ Asih | 11. Situ Pancoran Mas |
| 3. Situ Bojong Sari | 12. Situ Cilodong |
| 4. Situ Pengasinan | 13. Situ Buperta |
| 5. Situ Jatijajar | 14. Situ Rawa Kalong |
| 6. Situ Cilangkap | 15. Situ Studio Alam |
| 7. Situ Rawa Besar | 16. Situ Tipar |
| 8. Situ Pladen | 17. Situ UI |
| 9. Situ Pengarengan | 18. Situ Pendongkelan |

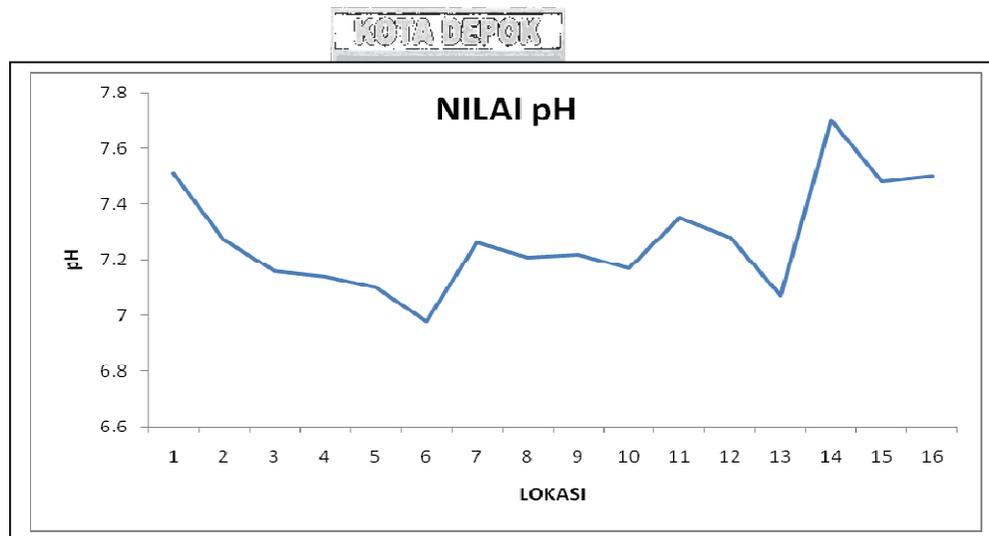
Gambar 2.21. Konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di Beberapa Situ di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter mikrobiologi konsentrasi Fecal Coliform dan Total coliform di semua lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, kecuali di lokasi Situ Bahar. Keberadaan Total

Coliform mengindikasikan adanya pencemaran dari limbah domestik, selain itu keberadaan bakteri E.coli juga menunjukkan adanya pencemaran dari limbah ekskreta manusia. Hal ini perlu diperhatikan karena mengindikasikan adanya bakteri patogen di perairan tersebut dan mengingat fungsi badan air tersebut sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya sebagai sumber air bersih dapat dilakukan asalkan telah melalui proses sterilisasi untuk meniadakan keberadaan bakteri patogen.

3.3 Kualitas Air Sungai di Beberapa Lokasi Di Depok

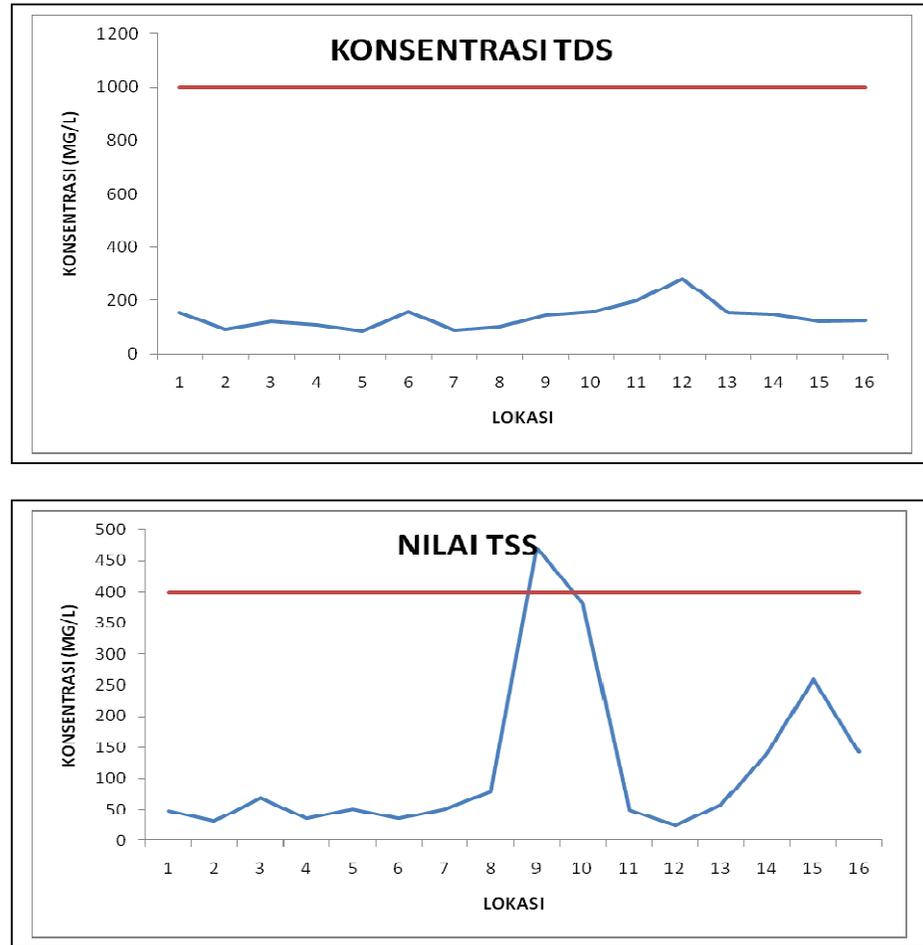
Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai parameter pH pada kualitas air sungai di beberapa lokasi di sekitar Depok diketahui bahwa nilai pH masih berada pada kisaran yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan yaitu antara 6-9.



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kali Ciliwung | 9. Kali Baru |
| 2. Kali Cabang Barat | 10. Kali Grogol |
| 3. Kali Cabang Tengah | 11. Kali Laya |
| 4. Kali Krukut | 12. Kali Sugutamu |
| 5. Kali Angsana | 13. Kali Cipinang |
| 6. Kali Angke | 14. Kali Cabang Timur |
| 7. Kali Pesanggrahan | 15. Kali Manggis |
| 8. Kali Caringin | 16. Kali Cikumpa |

Gambar 2.22. Nilai pH di Beberapa Sungai di Depok, 2009



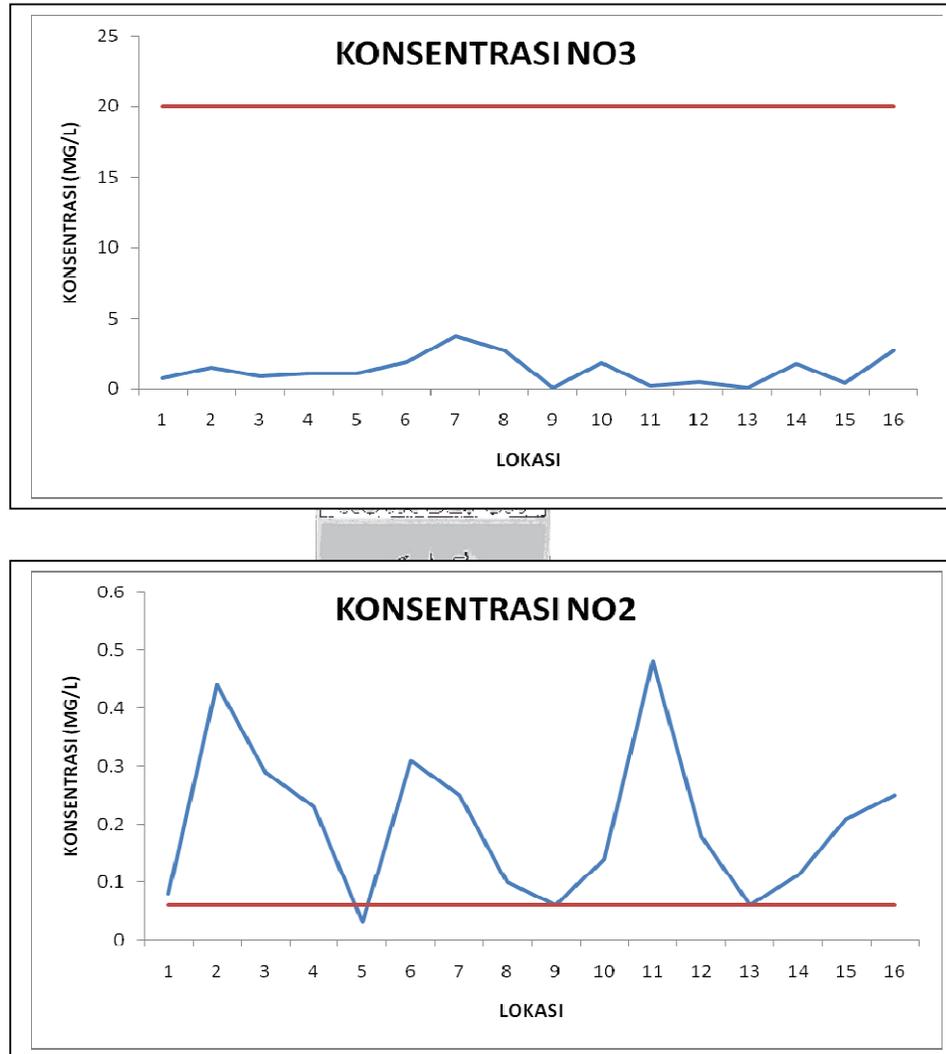
Keterangan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kali Ciliwung | 9. Kali Baru |
| 2. Kali Cabang Barat | 10. Kali Grogol |
| 3. Kali Cabang Tengah | 11. Kali Laya |
| 4. Kali Krukut | 12. Kali Sugutamu |
| 5. Kali Angsana | 13. Kali Cipinang |
| 6. Kali Angke | 14. Kali Cabang Timur |
| 7. Kali Pesanggrahan | 15. Kali Manggis |
| 8. Kali Caringin | 16. Kali Cikumpa |

Gambar 2.23. Konsentrasi TDS dan TSS di Beberapa Sungai di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter TDS (*total dissolved solid*) dan TSS (*total suspended solid*) pada kualitas air sungai di beberapa lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, kecuali konsentrasi TSS di lokasi pengamatan Kali Baru yang telah melampaui nilai baku mutu. TDS biasanya disebabkan oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Nilai TDS perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri). Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan, terutama TSS, dapat meningkatkan nilai

kekeruhan, yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan.



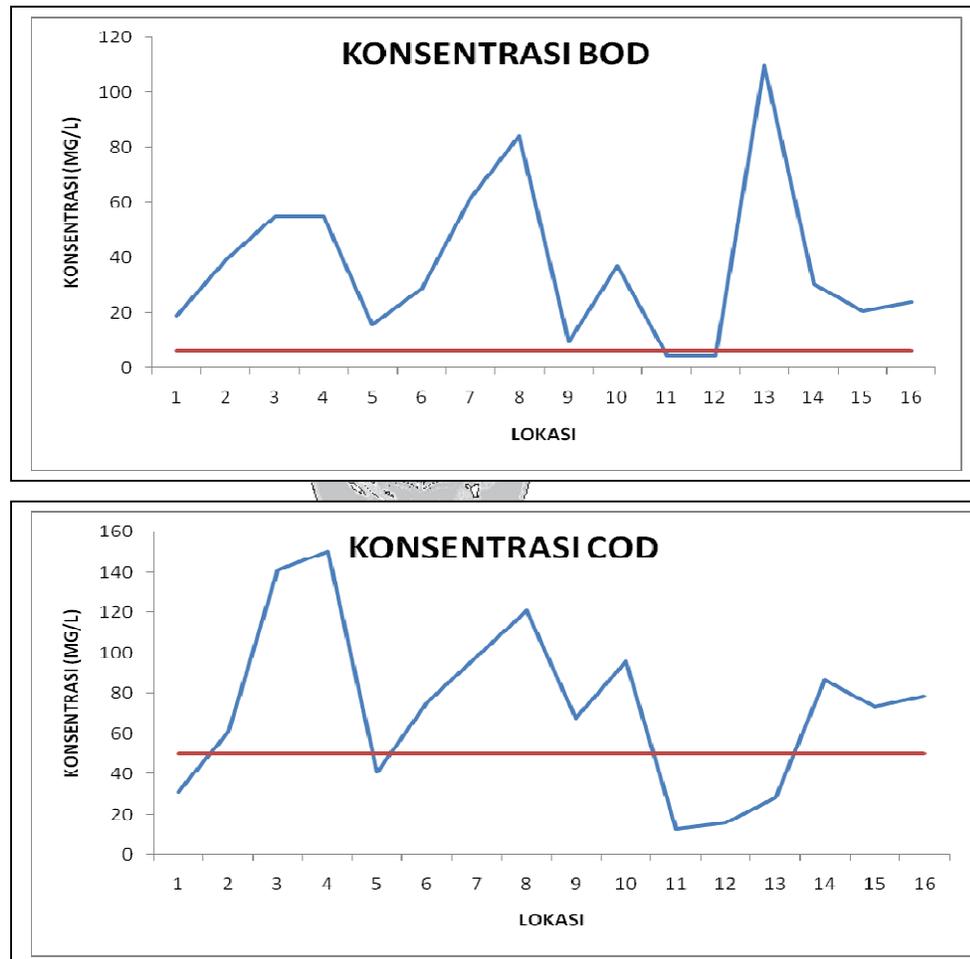
Keterangan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kali Ciliwung | 9. Kali Baru |
| 2. Kali Cabang Barat | 10. Kali Grogol |
| 3. Kali Cabang Tengah | 11. Kali Laya |
| 4. Kali Krukut | 12. Kali Sugutamu |
| 5. Kali Angsana | 13. Kali Cipinang |
| 6. Kali Angke | 14. Kali Cabang Timur |
| 7. Kali Pesanggrahan | 15. Kali Manggis |
| 8. Kali Caringin | 16. Kali Cikumpa |

Gambar 2.24. Konsentrasi Nitrat dan Nitrit di Beberapa Sungai di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis parameter Nitrat dan Nitrit pada kualitas air sungai di beberapa lokasi pengamatan di sekitar Depok diketahui bahwa konsentrasi Nitrat di semua lokasi pengamatan masih di bawah baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan

untuk konsentrasi Nitrit pada umumnya telah melampaui baku mutu yang ditetapkan. Tingginya konsentrasi Nitrit biasanya disebabkan oleh terganggunya proses reduksi nitrat atau denitrifikasi pada kondisi anoksik (tidak ada oksigen). Proses ini juga melibatkan jamur dan bakteri. Dinitrogen oksida adalah produk utama dari denitrifikasi pada perairan dengan kadar oksigen sangat rendah, sedangkan molekul nitrogen adalah produk utama dari proses denitrifikasi pada perairan dengan kondisi anaerob.

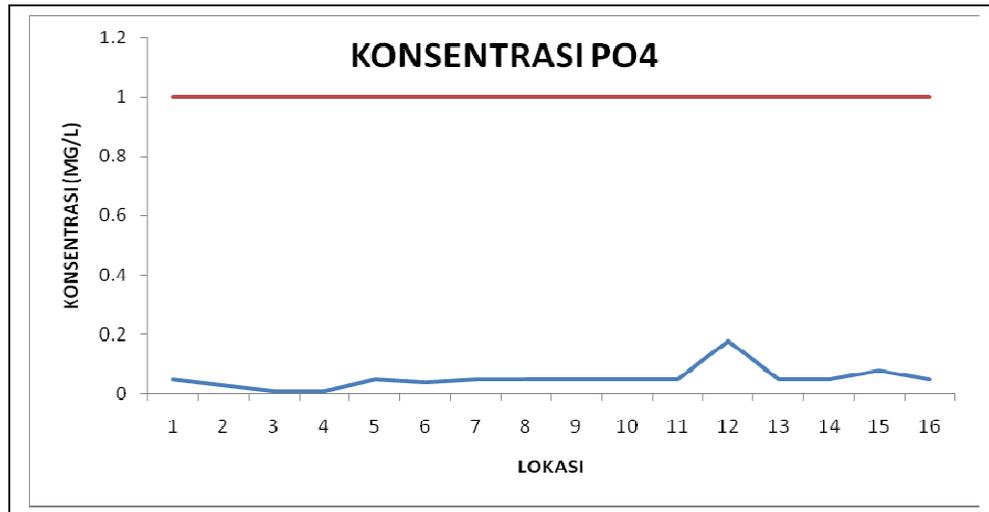


Keterangan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kali Ciliwung | 9. Kali Baru |
| 2. Kali Cabang Barat | 10. Kali Grogol |
| 3. Kali Cabang Tengah | 11. Kali Laya |
| 4. Kali Krukut | 12. Kali Sugutamu |
| 5. Kali Angsana | 13. Kali Cipinang |
| 6. Kali Angke | 14. Kali Cabang Timur |
| 7. Kali Pesanggrahan | 15. Kali Manggis |
| 8. Kali Caringin | 16. Kali Cikumpa |

Gambar 2.25. Konsentrasi BOD, dan COD di Beberapa Sungai di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter BOD dan COD di semua lokasi pengamatan pada umumnya telah melampaui baku mutu yang ditetapkan. Hal ini diduga disebabkan karena telah terjadi pencemaran bahan organik baik oleh kegiatan domestik maupun industri.



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kali Ciliwung | 9. Kali Baru |
| 2. Kali Cabang Barat | 10. Kali Grogol |
| 3. Kali Cabang Tengah | 11. Kali Laya |
| 4. Kali Krukut | 12. Kali Sugutamu |
| 5. Kali Angsana | 13. Kali Cipinang |
| 6. Kali Angke | 14. Kali Cabang Timur |
| 7. Kali Pesanggrahan | 15. Kali Manggis |
| 8. Kali Caringin | 16. Kali Cikumpa |

Gambar 2.26. Konsentrasi Total Fosfat di Beberapa Sungai di Depok, 2009

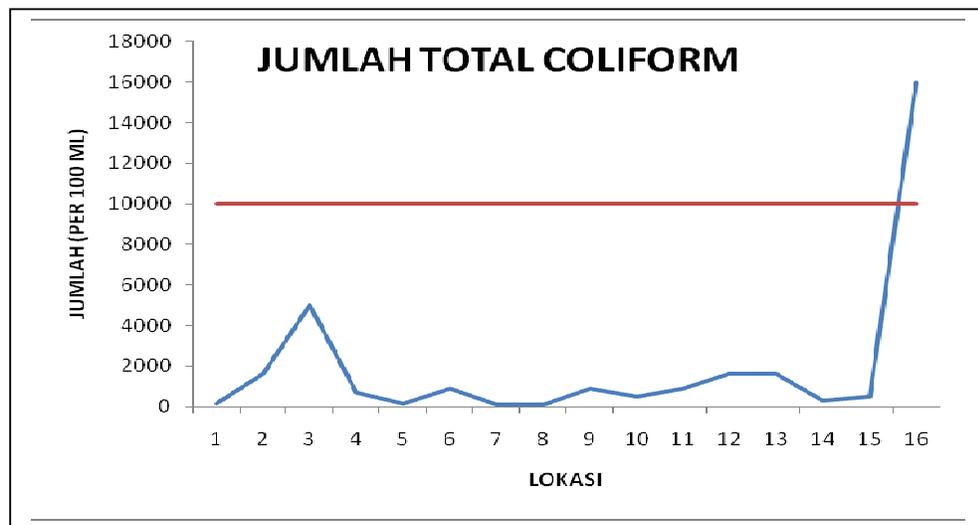
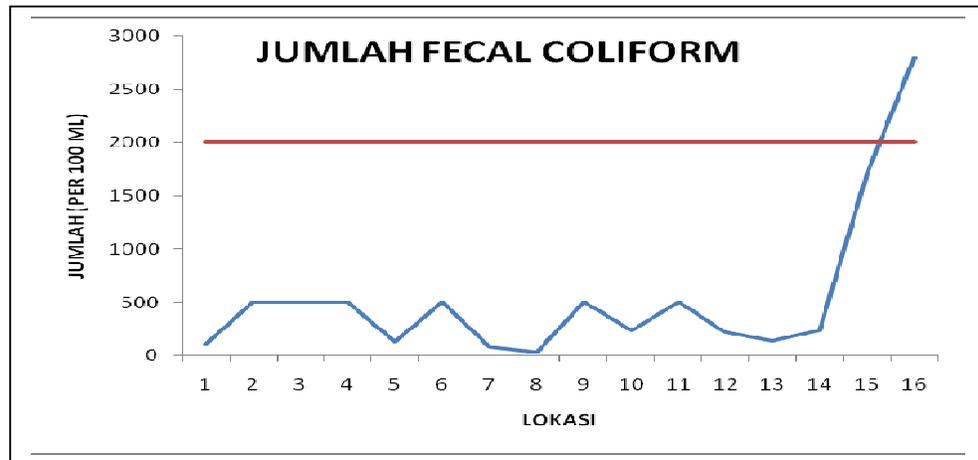
Konsentrasi Total Fosfat berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2009 menunjukkan nilai konsentrasi yang masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Selain berasal dari dekomposisi bahan organik, sumber antropogenik sumber fosfor adalah limbah industri dan domestik, yakni fosfor yang berasal dari deterjen. Limpasan dari daerah pertanian yang menggunakan pupuk juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberadaan fosfor.

Fosfor banyak digunakan sebagai pupuk, sabun, atau deterjen, bahan industri keramik, minyak pelumas, produk minuman dan makanan, katalis, dan sebagainya. Dalam industri, polifosfat ditambahkan secara langsung untuk mencegah terjadinya pembentukan karat dan korosi pada peralatan logam. Namun demikian, fosfor tidak bersifat toksik bagi manusia, hewan, dan ikan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter lainnya seperti Zn, Fenol, amonia, klorida, sulfat, deterjen, Fe, Co, F, dan Mn pada semua lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan. Senyawa fenol yang merupakan senyawa aromatik dengan satu atau beberapa gugus hidroksil yang terikat secara langsung pada cincin benzena, dihasilkan dari proses pemurnian minyak, industri kimia, tekstil, plastik, dan lain-lain. Kondisi tercemarnya sungai-sungai di sekitar Depok oleh hal-hal tersebut di atas dapat diduga sebagai penyebab tingginya konsentrasi fenol.

Sedangkan Zn termasuk unsur yang terdapat dalam jumlah berlimpah di alam. Ion seng mudah terserap ke dalam sedimen dan tanah. Seng termasuk unsur yang esensial bagi makhluk hidup, yakni berfungsi untuk membantu kerja enzim. Seng juga diperlukan dalam proses fotosintesis sebagai agen bagi transfer hidrogen dan berperan dalam pembentukan protein. Davis dan Cornwell (1991) menyatakan bahwa seng tidak bersifat toksik pada manusia, akan tetapi pada kadar yang tinggi dapat menimbulkan pada air.

Untuk Amonia, walaupun tidak ada baku mutu yang mengaturnya tetapi tetap perlu mendapat perhatian mengingat keberadaan senyawa ini terkait dengan masalah kebauan yang dapat ditimbulkannya.



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kali Ciliwung | 9. Kali Baru |
| 2. Kali Cabang Barat | 10. Kali Grogol |
| 3. Kali Cabang Tengah | 11. Kali Laya |
| 4. Kali Krukut | 12. Kali Sugutamu |
| 5. Kali Angsana | 13. Kali Cipinang |
| 6. Kali Angke | 14. Kali Cabang Timur |
| 7. Kali Pesanggrahan | 15. Kali Manggis |
| 8. Kali Caringin | 16. Kali Cikumpa |

Gambar 2.27. Konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di Beberapa Sungai di Depok, 2009

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter mikrobiologi konsentrasi Fecal Coliform dan Total coliform di semua lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, kecuali di Kali Cikumpa. Keberadaan Total Coliform mengindikasikan adanya pencemaran dari limbah domestik, selain itu keberadaan bakteri E.coli juga menunjukkan adanya pencemaran dari limbah ekskreta manusia. Hal ini perlu diperhatikan karena mengindikasikan adanya

bakteri patogen di perairan tersebut dan mengingat fungsi badan air tersebut sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya sebagai sumber air bersih dapat dilakukan asalkan telah melalui proses sterilisasi untuk meniadakan keberadaan bakteri patogen.

D. UDARA

Kualitas udara ambien di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor nilai konsentrasi pencemar di lokasi tersebut. Kondisi tersebut akan sangat bergantung pada faktor meteorologis dan orologis daerah tersebut. Sumber emisi adalah dari kegiatan industri, transportasi darat, pembakaran sampah, dan kegiatan domestik lainnya. Kondisi transportasi darat yang semakin padat akhir-akhir ini kian memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsentrasi polutan pencemar di udara ambien. Demikian halnya dengan kondisi kualitas udara ambien Kota Depok yang sangat dipengaruhi oleh kondisi transportasi darat.

Tujuan pemantauan kualitas udara ambien adalah:

- a. mengetahui tingkat pencemaran yang ada di suatu daerah, dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. data base dalam evaluasi pengaruh (pengembangan kota, tata guna lahan, transportasi, evaluasi penerapan strategi pengendalian pencemaran).
- c. pengamatan kecenderungan tingkat pencemaran.
- d. mengaktifkan & menentukan prosedur pengendalian darurat.

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di Kota Depok bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang ada di Kota Depok dan pengamatan kecenderungan tingkat pencemaran. Dengan mengetahui tingkat pencemaran, maka upaya-upaya yang dilakukan akan lebih terarah.

Penetapan titik lokasi pengambilan contoh udara harus memenuhi persyaratan, diantaranya bahwa harus mewakili kondisi lingkungan yang akan diukur, penetapan jarak dari sumber emisi, dan arah angin. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan daerah dan hasil pemetaan itulah yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan titik lokasi pengambilan contoh udara.

Sehubungan dengan kualitas udara ambien, maka dilakukan beberapa pengukuran untuk memantau kualitas udara ambien di beberapa lokasi di Kota Depok. Lokasi-lokasi tersebut adalah di TPA Cipayung, RPH, RSUD Sawangan, IPLT, Jalan Margonda, dan Bundaran UI.

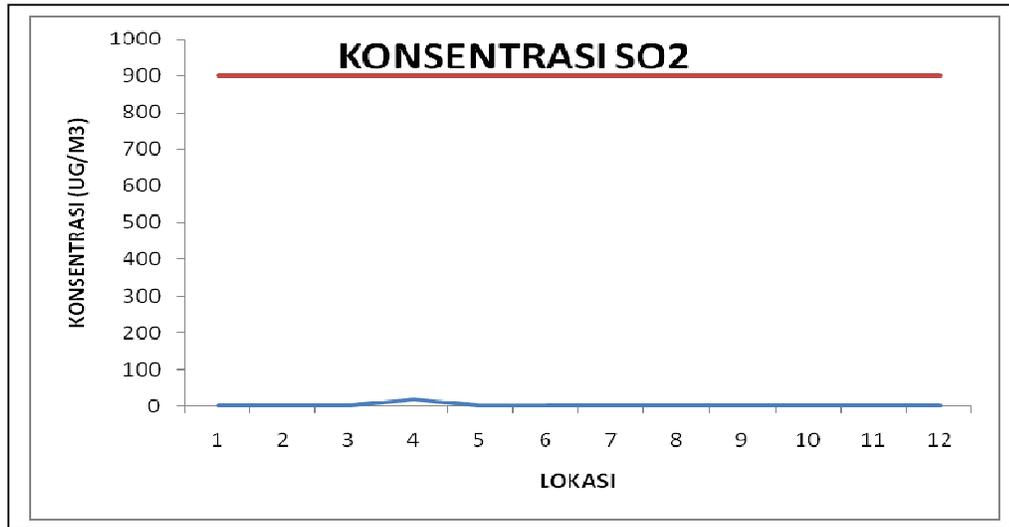
Hasil pengukuran terhadap kualitas udara pada Tahun 2009 menunjukkan bahwa konsentrasi parameter SO₂, NO₂, Pb, dan CO pada semua lokasi pengamatan masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan untuk parameter partikulat di lokasi area RPH, Jl. Juanda-Margonda, dan Bundaran UI menunjukkan hasil yang telah melampaui baku mutu. Hal ini terkait dengan adanya kenaikan bangkitan kendaraan di sekitar lokasi tersebut. Hal ini merefleksikan emisi dari kegiatan transportasi darat yang semakin padat.

Hasil pengukuran kebisingan di lokasi pengamatan pada umumnya masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, kecuali di lokasi Jl. Juanda-Margonda, Jl. Juanda-Raya Bogor, Margonda Raya, dan Bundaran UI telah melampaui baku mutu kebisingan.

Upaya pengelolaan kebisingan yang dapat dilakukan adalah

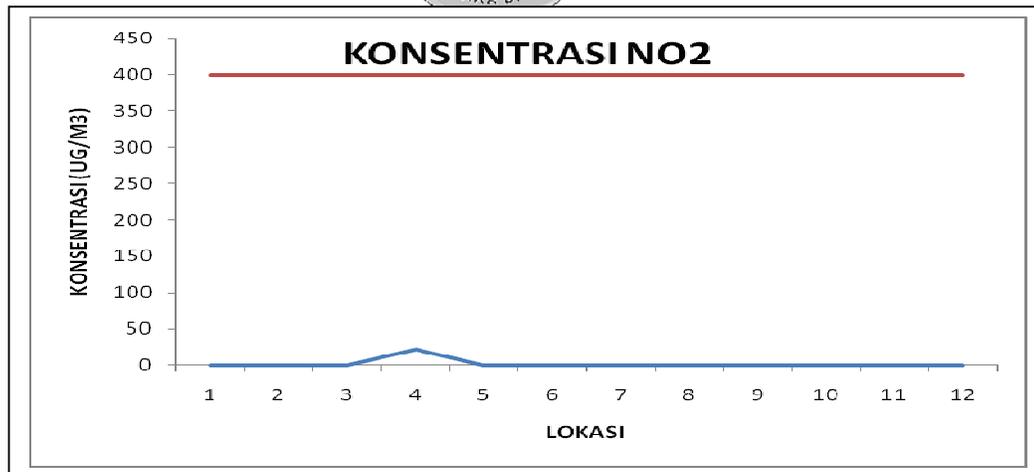
- a. Mengurangi kepadatan lalu lintas
- b. Membuat *landscaping* yang dapat meredam suara, misalnya dengan menanam pohon, semak dan perdu di kiri-kanan jalan.
- c. Membuat badan jalan yang meredam dan permukaan jalan yang halus.
- d. Penanaman pagar dan tanaman peredam suara (tanaman hanya mampu mereduksi kebisingan hingga 2,23 dB(A)).

Pada gambar berikut disajikan tentang konsentrasi SO₂, NO₂, CO, partikulat, dan kebisingan di beberapa lokasi di Depok pada tahun 2009.



Keterangan:

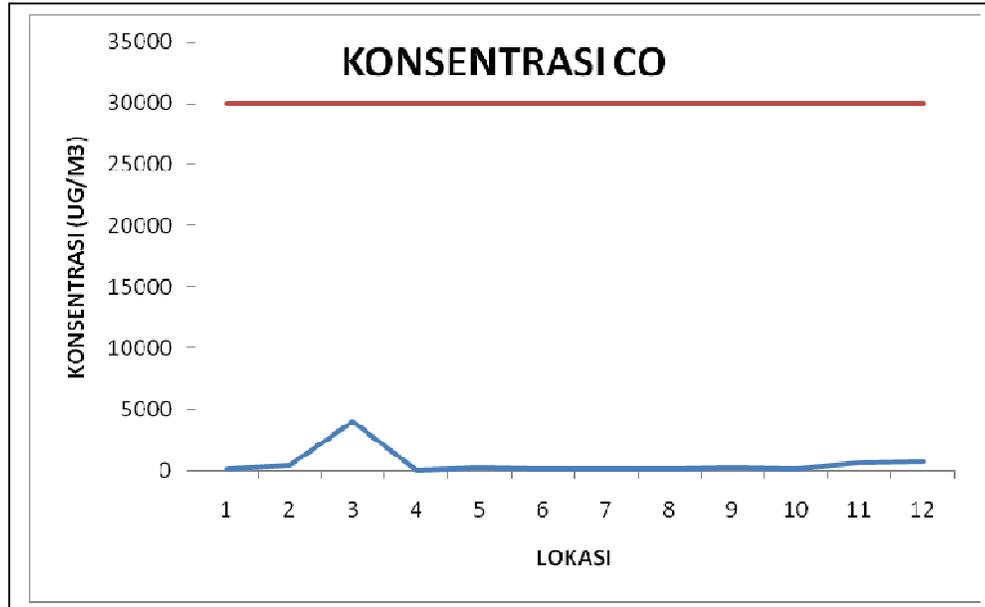
1. Pintu Masuk TPA Cipayung
2. Area TPA Cipayung
3. TPA (Kolam C)
4. TPA (Pipa Pantau)
5. RSUD Sawangan
6. RPH (Pintu Masuk)
7. Area RPH
8. Jl. Juanda-Margonda
9. Jl. Juanda-Raya Bogor
10. IPLT
11. Margonda Raya
12. Bundaran UI

**Gambar 2.28.** Konsentrasi SO₂ di Beberapa Lokasi di Depok, 2009

Keterangan:

1. Pintu Masuk TPA Cipayung
2. Area TPA Cipayung
3. TPA (Kolam C)
4. TPA (Pipa Pantau)
5. RSUD Sawangan
6. RPH (Pintu Masuk)
7. Area RPH
8. Jl. Juanda-Margonda
9. Jl. Juanda-Raya Bogor
10. IPLT
11. Margonda Raya
12. Bundaran UI

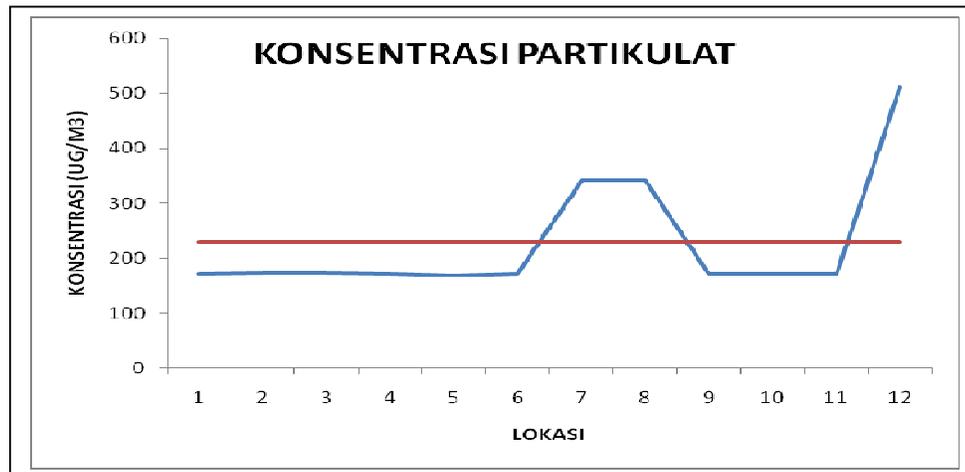
Gambar 2.29. Konsentrasi NO₂ di Beberapa Lokasi di Depok, 2009



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Pintu Masuk TPA Cipayung | 7. Area RPH |
| 2. Area TPA Cipayung | 8. Jl. Juanda-Margonda |
| 3. TPA (Kolam C) | 9. Jl. Juanda-Raya Bogor |
| 4. TPA (Pipa Pantau) | 10. IPLT |
| 5. RSUD Sawangan | 11. Margonda Raya |
| 6. RPH (Pintu Masuk) | 12. Bundaran UI |

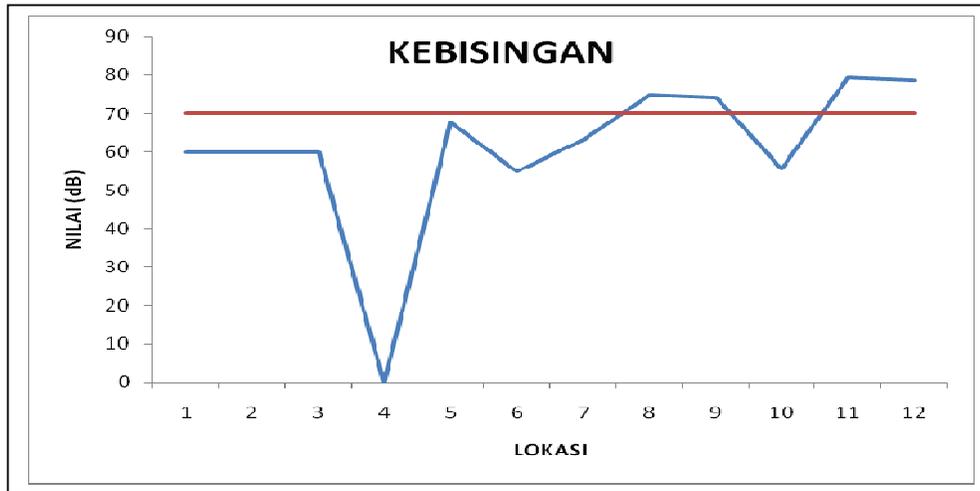
Gambar 2.30. Konsentrasi CO di Beberapa Lokasi di Depok, 2009



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Pintu Masuk TPA Cipayung | 7. Area RPH |
| 2. Area TPA Cipayung | 8. Jl. Juanda-Margonda |
| 3. TPA (Kolam C) | 9. Jl. Juanda-Raya Bogor |
| 4. TPA (Pipa Pantau) | 10. IPLT |
| 5. RSUD Sawangan | 11. Margonda Raya |
| 6. RPH (Pintu Masuk) | 12. Bundaran UI |

Gambar 2.31. Konsentrasi Partikulat di Beberapa Lokasi di Depok, 2009



Keterangan:

1. Pintu Masuk TPA Cipayung
2. Area TPA Cipayung
3. TPA (Kolam C)
4. TPA (Pipa Pantau)
5. RSUD Sawangan
6. RPH (Pintu Masuk)
7. Area RPH
8. JI. Juanda-Margonda
9. JI. Juanda-Raya Bogor
10. IPLT
11. Margonda Raya
12. Bundaran UI



Gambar 2.32. Nilai Kebisingan di Beberapa Lokasi di Depok, 2009

E. Laut, Pesisir dan Pantai

Di Depok tidak terdapat laut, pesisir dan pantai maka tidak dapat diuraikan tentang ketiga komponen lingkungan tersebut.

F. Iklim

Kondisi iklim di Kota Depok seperti umumnya wilayah Jawa Barat, beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim musim, sehingga secara normatif terdapat dua musim di wilayah ini, yaitu musim hujan antara Oktober-Maret dan kemarau antara April-September. Kota Depok memiliki kondisi iklim yang relatif stabil. Berdasarkan pemeriksaan data hujan pada tahun 2008 di stasiun pengamatan hujan Dermaga didapatkan data sebagai berikut:

Suhu rata-rata : 22- 29 °C

Curah hujan rata-rata: 50-80 mm.

BAB III

TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN

A. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk

Populasi penduduk di Kota Depok terlihat meningkat secara eksponensial, hal ini didukung oleh kemudahan akses dan sarana transportasi menuju Kota Jakarta., sehingga meningkatkan aktifitas ekonomi dan kesejahteraan manusia Hal ini akan mengakselerasi meningkatnya permintaan (*demand*) terhadap kebutuhan sumberdaya dan jasa lingkungan. Sementara itu ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang dan tidak lagi mencukupi, maka opsi berikutnya diarahkan untuk mempertahankan sumberdaya yang ada dan sekaligus melanjutkan pertumbuhan yang ada. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah Kota Depok, bagi berbagai peruntukan, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya alam akan semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya alam yang masih tersisa.

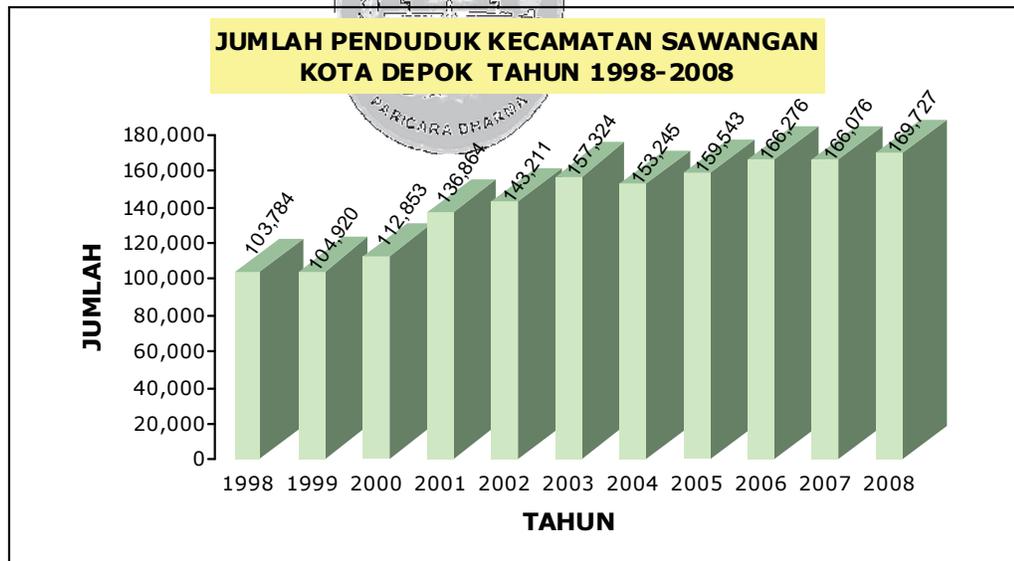
Di Kota Depok terdapat 6 (enam) kecamatan yang penduduknya sebagian besar berasal dari Kota Jakarta dan kota lainnya, dimana Kecamatan Cimanggis dengan 13 kelurahan berada di antara jalan Tol Jagorawi, dan jalan Raya Bogor adalah kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk ter besar yaitu 412.388 jiwa. Sebagian besar penduduknya berada di Kelurahan Tugu, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Mekarsasi dengan jumlah penduduk di masing-masing 5 kelurahan tersebut berkisar antara 32.000 – 79.000 jiwa, sedangkan kelurahan lainnya hanya berkisar antara 10.000 – 28.000 jiwa. Adapun kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Beji dengan 6 kelurahan. Sebagian besar penduduknya berada di kelurahan Beji, Kelurahan Kemiri Muka dan Kelurahan Tanah Baru dengan jumlah penduduk berkisar antara 20.000 – 34.000 jiwa, sedangkan kelurahan lainnya mempunyai

jumlah penduduk yaitu antara 7.000 – 13.000 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk per kecamatan Kota Depok dapat disajikan pada Tabel 3.1. berikut.

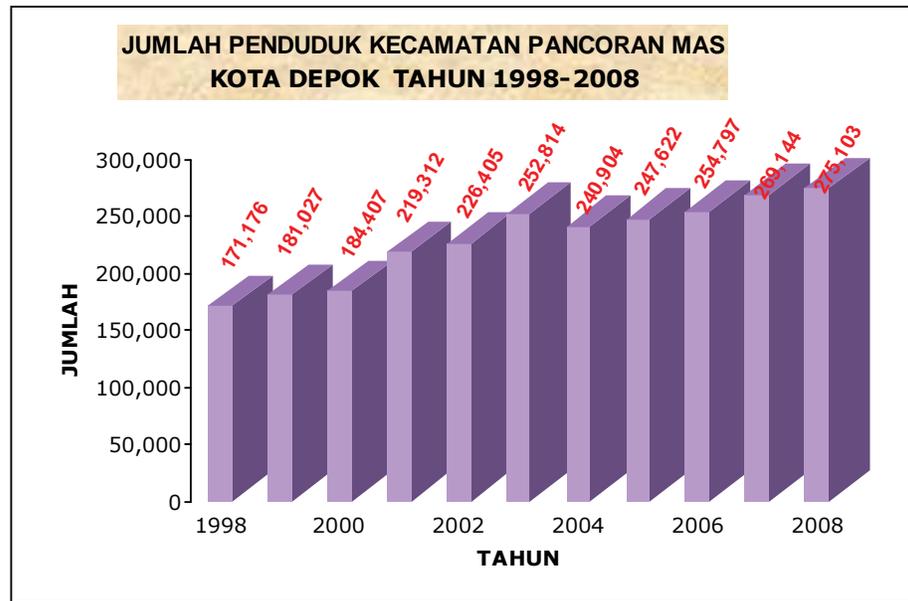
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Depok Tahun 1998–2008

No	Kecamatan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Sawangan	143.211	157.324	153.245	159.543	166.276	166.076	169.727
2.	Pancoran Mas	226.405	252.814	240.904	247.622	254.797	269.144	275.103
3.	Sukmajaya	285.928	297.098	301.809	307.753	314.147	342.447	350.331
4.	Cimanggis	343.399	363.545	367.283	379.487	392.512	403.037	412.388
5.	Beji	120.462	129.184	130.656	136.899	143.592	139.888	143.190
6.	Limo	127.828	135.769	137.662	143.218	149.156	149.410	152.938
JUMLAH		1.247.233	1.335.734	1.331.559	1.374.522	1.420.480	1.470.002	1.503.677

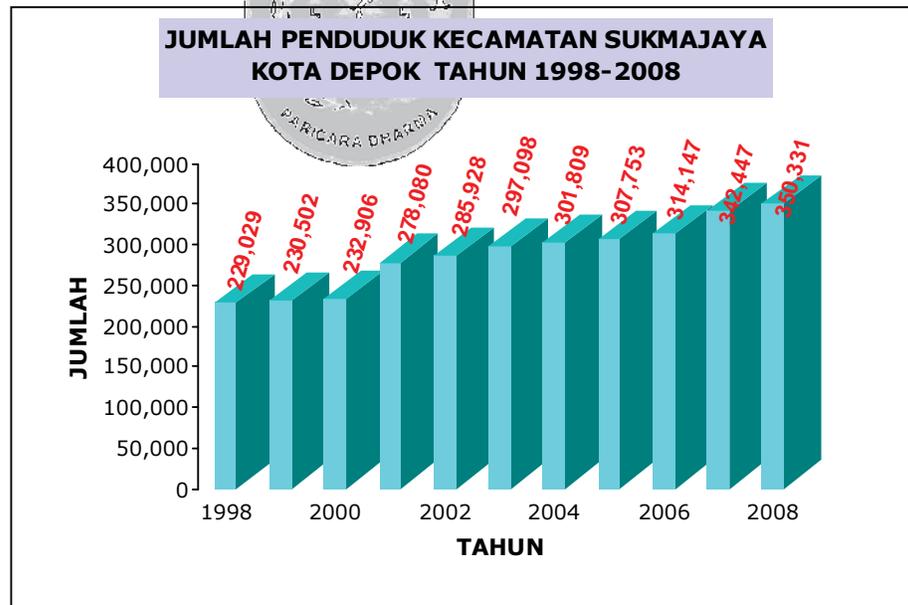
Sumber: BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1998 – 2006 (1998-2003)
 BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 2008 (2004 – 2008)



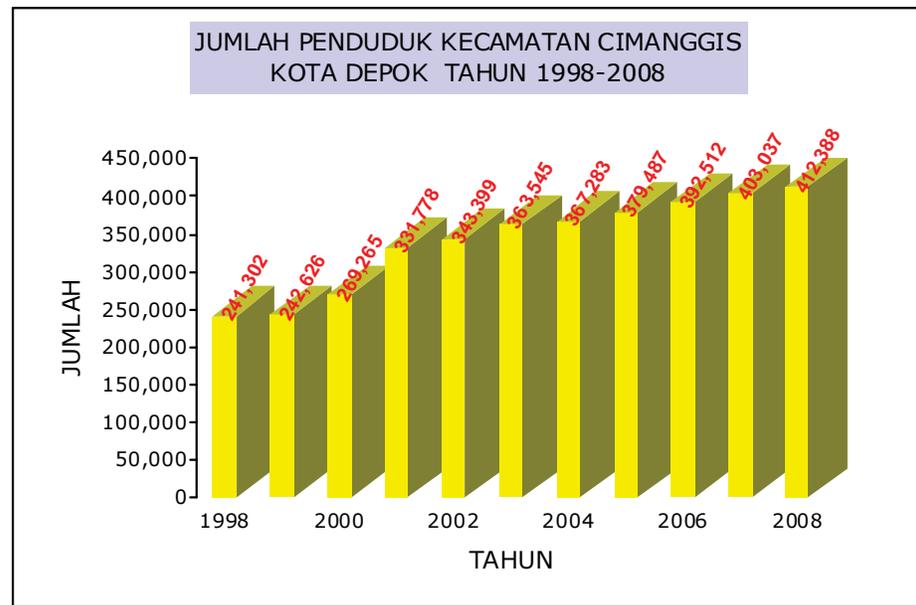
Gambar 3.1. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Sawangan Kota Depok Tahun 1998 - 2008



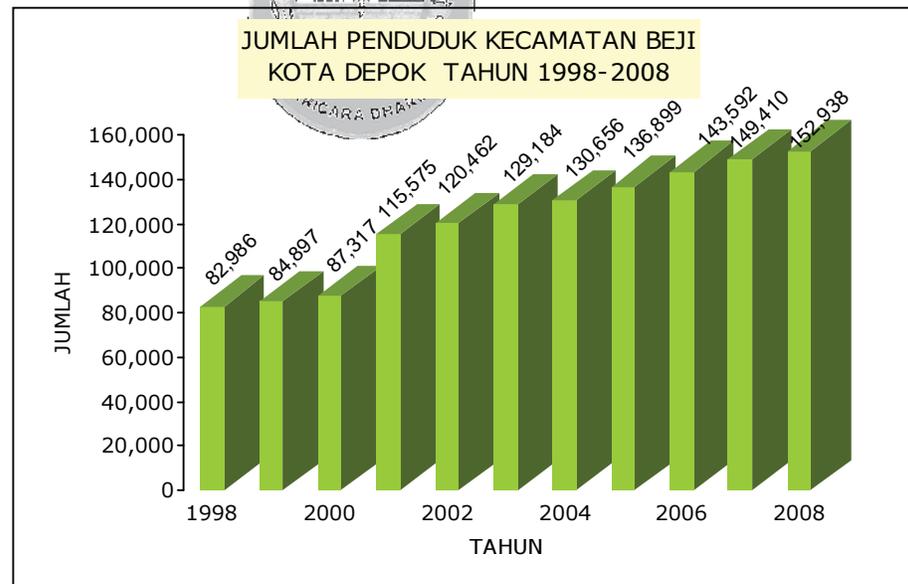
Gambar 3.2. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 1998-2008.



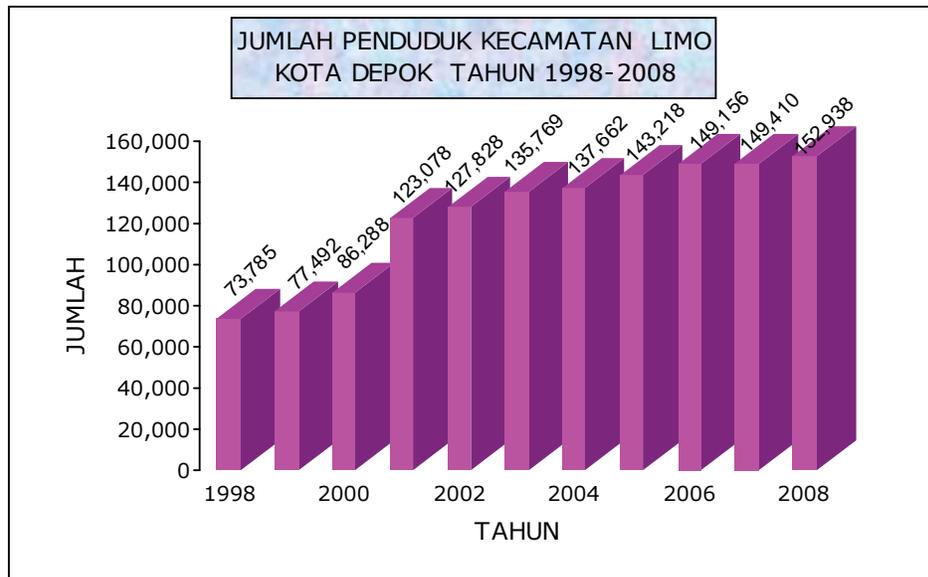
Gambar 3.3. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 1998-2008.



Gambar 3.4. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun 1998-2008.



Gambar 3.5. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Beji Kota Depok Tahun 1998-2008.



Gambar : 3.6. Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Limo Kota Depok Tahun 1998-2008

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kota Depok

No.	Kecamatan/ Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Sex Ratio	Σ Penduduk
1	Sawangan	88.692	81.035	109	169.727
2	Pancoran Mas	143.153	131.950	108	275.103
3	Sukmajaya	179.361	170.970	105	350.331
4	Cimanggis	214.221	198.167	108	412.388
5	Beji	73.303	67.887	111	143.190
6	Limo	79.362	73.576	108	152.938
	Total	780.092	723.585	102	1.503.677

Keterangan : Berdasarkan sensus Penduduk, 2000 (proyeksi penduduk BPS Kota Depok)

Sumber : Kota Depok dalam Angka, 2008

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk laki-laki di Kota Depok adalah 52 % lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan (48 %). Sedangkan pada tabel berikut di bawah ini terlihat bahwa di kecamatan Cimanggis, kecamatan Sukmajaya dan Pancoran Mas di dominasi oleh usia penduduk laki-laki dan perempuan yang masih berusia muda yaitu antara 0 – 39 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan 3.4.berikut.

**Tabel 3.3.** Penduduk Laki-Laki Menurut Kecamatan, dan Golongan Umur Kota Depok

No.	Kecamatan	0-14	15-39	40-54	55-64	65+	Jumlah
1	Sawangan	26.121	39.772	14.205	4.388	4.206	88.692
2	Pancoran Mas	39.414	65.235	22.722	8.513	7.269	143.153
3	Sukmajaya	46.602	82.118	31.136	11.841	7.664	179.361
4	Cimanggis	58.998	100.330	37.629	10.117	7.147	214.221
5	Beji	19.285	36.543	12.327	3.875	3.273	75.303
6	Limo	21.574	37.030	13.239	4.209	3.310	79.362
Total		209.535	350.333	132.456	43.062	32.142	767.528

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2008

Tabel 3.4. Penduduk Perempuan Menurut Kecamatan, dan Golongan Umur di Kota Depok

No.	Kecamatan	0-14	15-39	40-54	55-64	65+	Jumlah
1	Sawangan	23.691	36.831	12.242	4.255	4.016	81.035
2	Pancoran Mas	34.665	59.769	21.575	9.076	7269	132.354
3	Sukmajaya	42.358	78.456	31.290	10.860	8006	170.970
4	Cimanggis	53.987	94.560	33.698	9.446	7376	199.067
5	Beji	17.375	23.108	7.623	9.972	4.141	62.219
6	Limo	19.331	35.089	12.231	4.062	2.863	73.576
Total		191.407	327.813	118.659	47.691	33.671	719.221

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2008

Tabel 3.5. Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kecamatan, dan Golongan Umur

No.	Kecamatan	0-14	15-39	40-54	55-64	65+	Jumlah
1	Sawangan	49.812	76.603	26.447	8.643	8.222	169.727
2	Pancoran Mas	74.079	125.004	44.297	17.589	14.134	275.103
3	Sukmajaya	88.960	160.574	62.426	22.701	15.670	350.331
4	Cimanggis	112.985	194.890	71.327	19.563	14.523	413.288
5	Beji	36.460	68.978	23.658	7.720	6.374	143.190
6	Limo	40.005	72.119	25.470	8.271	6.173	152.938
Total		400.942	678.146	251.115	90.733	65.813	1.486.749

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2008

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kecamatan	Belum sekolah	Tdk tamat SD/ sederajat	Tamat					Jumlah
				SD	SLTP	SLTA	Akademi	Universitas	
1	Beji	19.369	13.771	19.757	22.469	23.692	8.164	9.106	116.327
2	Sawangan	21.787	9.808	43.077	40.086	32.970	3.009	1.735	152.473
3	Pancoran Mas	23.885	15.440	35.126	48.270	75.712	11.759	7.499	217.690
4	Sukmajaya	76.893	15.541	49.279	50.224	91.021	10.649	11.119	304.726
5	Cimanggis	64.692	555	33.442	40.094	49.224	5.035	4.948	197.990
6	Limo	17.135	12.349	22.644	23.050	29.821	10.069	9.380	124.448

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2008

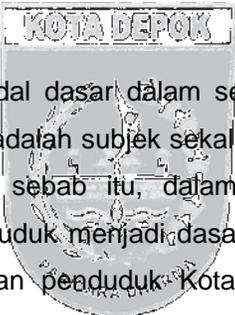
Tabel 3.7. Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Jumlah Sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (km ²)	SD (unit)	SLTP (unit)	SLTA (unit)
1	Beji	116.327	14,30	34	10	8
2	Cimanggis	357.173	53,54	101	29	12
3	Limo	124.448	22,80	30	13	10
4	Sawangan	155.288	45,69	49	26	12
5	Pancoran Mas	247.077	29,83	92	44	36
6	Sukmajaya	304.726	34,13	78	21	14

Sumber: Kecamatan dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 3.7. terlihat bahwa di Kecamatan Sukmajaya masih terdapat banyak penduduk yang belum bersekolah yaitu sejumlah 76.893 jiwa, demikian pula penduduk yang lulus Perguruan Tinggi yaitu sejumlah 11.119 jiwa.

2. Tekanan

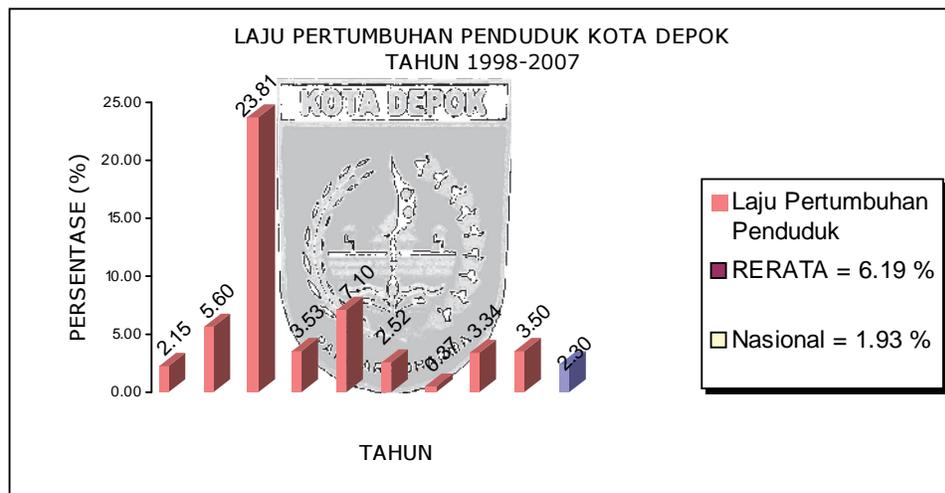


Penduduk merupakan modal dasar dalam setiap proses pembangunan di suatu Negara karena penduduk adalah subjek sekaligus objek bagi upaya pembangunan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan faktor penduduk menjadi dasar yang memegang peranan penting. Penyebaran dan kepadatan penduduk Kota Depok terlihat tidak merata antar wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan yang merupakan daerah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Cimanggis. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi tersebut merupakan kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu di atas rata-rata kepadatan penduduk Kota Depok. Pertambahan penduduk kota yang semakin meningkat tajam tentu membutuhkan sarana dan prasarana permukiman yang lebih banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah. Jumlah penduduk dan kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, serta ditunjang dengan keberadaan Kota Depok sebagai pusat transaksi ekonomi dan jasa (pasar dan aktivitas perkotaan) maka tingginya aktivitas tersebut sebanding pula dengan hasil samping yang akan dihasilkannya seperti limbah padat berupa sampah (organik dan anorganik) dan limbah cair serta hasil samping lainnya. Untuk mengetahui perkembangan Kota Depok baik sekarang maupun masa yang akan datang maka perlu dilakukan kajian dan analisis kependudukan. Berikut ini merupakan tabel jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Depok tahun 1998 dan 2008.

Tabel 3.8. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Depok

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1998	902.062	2,15	4.356,52
1999	921.464	5,60	4.450,23
2000	973.036	23,81	4.699,29
2001	1.204.687	3,53	6.014,71
2002	1.247.233	7,10	6.227,14
2003	1.335.734	2,52	6.669,00
2004	1.369.461	0,37	6.837,39
2005	1.374.522	3,34	6.862,66
2006	1.420.480	3,50	7.092,12
2007	1.470.002	2,3	7.507,05
2008	1.503.677		

Sumber: BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1998 – 2007;
BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 2008



Gambar : 3.7. Grafik Laju pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 1998-2008.

Tabel 3.9. Migrasi Selama Hidup Menurut Jenis Kelamin

No.	Kecamatan/Kabupaten/Kota	Datang		Pindah	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Sawangan	818	756	197	205
2	Pancoran Mas	645	495	244	304
3	Sukmajaya	7005	6192	691	677
4	Cimanggis	539	382	220	184
5	Beji	1.774	1.579	723	646
6	Limo	2609	2518	474	440
	Total	13.390	11.922	2549	2456

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 3.9. terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak datang dan pindah ke Kota Depok, di mana kecamatan yang paling banyak penduduk yang datang dan pindah adalah kecamatan Sukmajaya yaitu sebanyak 7.005 laki-laki datang ke Kota Depok dan perempuan sebanyak 6.192.

3. Respon

Jumlah penduduk di Kota Depok yang meningkat secara pesat mengakibatkan kepadatan penduduk yang meningkat pesat pula. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah tuntutan yang semakin tinggi terhadap kebutuhan hidup penduduk, seperti ruang, lahan, pangan, permukiman dan air bersih. Terkait dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatasi pertumbuhan penduduk, seperti; membatasi arus masuk penduduk baru (migrasi) ke Kota Depok, membatasi perijinan IPR, dan meningkatkan program Keluarga Berencana. Sementara itu, dalam kondisi kepadatan penduduk Kota Depok saat ini, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan beberapa upaya, seperti: pembangunan infrastruktur kota secara merata di enam kecamatan, penanganan *squatter*, dan pengelolaan sosial budaya masyarakat.

B. PERMUKIMAN

1. Tekanan



Penyebab utama kerusakan lingkungan di Kota Depok adalah akibat dari beberapa kegiatan manusia di Kota Depok, antara lain seperti yang terlihat pada tabel-tabel yang terkait dengan jumlah penduduk di enam kecamatan di Kota Depok yang semakin meningkat. Semakin pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Depok akan mengakibatkan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Depok akan semakin meningkat pula. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, pembangunan di bidang perumahan dan bangunan lainnya. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan perumahan dan bangunan tersebut adalah semakin berkurangnya lahan terbuka di Kota Depok.

Selain itu, banyaknya pemukiman di sekitar Kota Depok tersebut juga telah membuat bermunculan beberapa kegiatan aktifitas ekonomi di sektor non formal, misalnya warung-warung makanan, toko-toko dari berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk di Kota Depok yang muncul di pinggir jalan dan tekanan penduduk yang besar tersebut juga sering mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran dari sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk dan terganggunya ketertiban dan keamanan umum serta

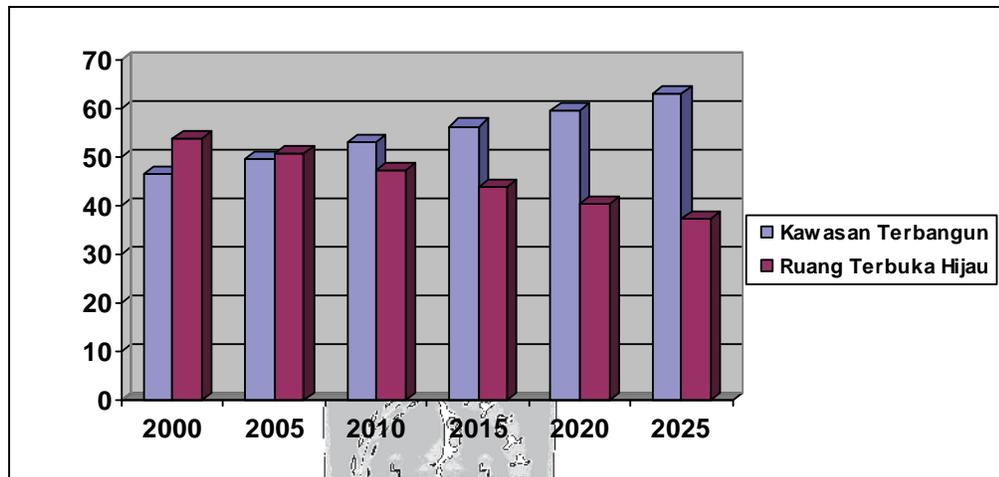
kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu perlu diperoleh dipahami dengan baik pengertian dasar tentang proses perubahan yang terjadi di Kota Depok melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Perlu dihayati pula bahwa habitat atau suatu ekosistem yang telah mengalami kerusakan, maka akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk pemulihannya.

Berdasarkan survey dan data yang ada, di wilayah Kota Depok memiliki kawasan Taman Hutan Raya, Hutan Kota, Taman Kota yang terdapat di sebelah Utara Kota Depok serta beberapa situ-situ yang tersebar di enam kecamatan. Ekosistem hutan dan ekosistem situ ini mengandung berbagai bentuk kehidupan (sumberdaya hayati) dan baik untuk kebersihan udara dan peresapan air karena akan memberikan banyak oksigen dan sumber air bersih yang dibutuhkan bagi manusia. Selain hal yang baik dan menggembirakan ini dilain pihak juga akan dapat melahirkan permasalahan dan tekanan terhadap kelestarian lingkungan di Kota Depok yaitu adanya tekanan yang mungkin timbul antara lain: pengurangan lahan terbuka, pendangkalan situ dan masalah sampah serta kemacetan lalu lintas. Peraturan yang mengatur masalah pembangunan pemukiman agak lemah, atau kurang tegasnya perizinan untuk pembangunan perumahan di Kota Depok, demikian pula terhadap kelestarian fungsi ekosistem situ masih agak kurang karena masih banyak situ-situ yang kondisinya masih buruk. Indikasi kearah tersebut tampak dari keberadaan situ-situ yang masih kotor dan dangkal karena banyak sampah.

Akibat pengaruh aktivitas manusia yang meningkat seperti masalah persampahan, pembangunan perumahan dan bangunan lainnya yang berlebihan akan mengalami tekanan (*stress*), yang cenderung mengarah pada menurunnya kualitas lingkungan Kota Depok. Pembangunan perumahan yang semakin meningkat akan mengakibatkan menurunnya ruang terbuka hijau, dan hal ini dapat terlihat pada tabel Rencana dan proyeksi pemanfaatan ruang, di mana setiap 5 tahun ruang terbuka semakin menurun dan pemanfaatan lahan semakin meningkat.

Tabel 3.10. Rencana dan Proyeksi Pemanfaatan Ruang 2005- 2025

No.	Pemanfaatan Ruang	2000	2005	2010 (Rencana)	2015 (Proyeksi)	2020 (Proyeksi)	2025 (Proyeksi)
1	Kawasan Terbangun	46,48 %	49,46 %	52,90 %	56,23 %	59,59 %	62,83 %
2	Ruang Terbuka Hijau	53,82 %	50,54 %	47,10 %	43,77 %	40,41 %	37,17 %

**Gambar : 3.8.** Grafik Rencana dan Proyeksi Pemanfaatan Ruang 2005- 2025

2. Respon

Kecenderungan semakin mengarahnya penduduk ke arah pinggiran kota ini, disatu sisi akan berdampak pada semakin menyempitnya lahan pertanian yang banyak tersebar di daerah-daerah pinggiran kota tersebut. Namun sebagai sebuah kota yang cenderung semakin berkembang, konsekuensi ini memang harus dihadapi. Selain itu, permasalahan lain yang cenderung akan mengiringinya adalah semakin tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup akibat penumpukan limbah sampah rumah tangga yang ada di daerah tersebut. Artinya semakin tingginya tingkat hunian di pinggiran kota maka kecenderungan juga akan membuat pencemaran limbah juga akan semakin bertambah dan mengarah ke pinggiran kota. Sementara daerah pinggiran kota tersebut adalah daerah yang dipakai sebagai daerah resapan air Kota Depok.

Pemukiman yang layak huni dengan sarana dan prasarana yang memadai merupakan dasar untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Berkembangnya berbagai fasilitas pemukiman di sepanjang jalan utama

menunjukkan adanya perkembangan fasilitas kota. Akan tetapi perkembangan tersebut seringkali tidak sesuai dengan konsep lingkungan pemukiman yang seharusnya seluruh fasilitas pemukiman tersebut berkelompok pada pusat-pusat pemukiman sehingga dapat diperoleh efektifitas pemanfaatan lahan dan fasilitas kota yang optimal. Perkembangan real estate, kawasan pemukiman, kegiatan perdagangan dan jasa belum efektif pengelolaannya. Kondisi ini akan berimplementasi pada penyebaran dan produksi hasil sampingan aktivitas diatas terutama limbah padat (sampah) dan limbah yang sulit untuk dikelola secara optimal pula.

Penanganan sampah juga mempunyai potensi yang besar dalam mendukung pengembangan Kota Depok. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan penanganan masalah kebersihan kota yang diakibatkan oleh berkembangnya aktivitas perekonomian kota dan pemukiman. Masih banyaknya pemukiman yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai antara lain disebabkan oleh :

- a. pembangunan perumahan, oleh pengembang tanpa adanya kewajiban dari pemerintah untuk melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang memadai,
- b. pengembangan kawasan pemukiman yang tidak mempunyai konsep yang jelas sehingga banyak fassos dan fasum yang harusnya tersedia menjadi terabaikan,
- c. pembangunan kawasan pemukiman dilakukan secara bertahap sehingga sarana dan prasarana yang awalnya tersedia dan mencukupi dengan adanya pengembangan kawasan menjadi tidak berimbang dengan penghuni kawasan yang memanfaatkannya.

Masih terdapatnya kawasan kumuh dengan kondisi rumah yang tidak layak huni. Hal ini disebabkan oleh (1) perencanaan kota yang telah dibuat tidak dilaksanakan sesuai aturan, (2) Belum adanya ebijakan, fasilitasi, dan stimulasi dari pemerintah dalam hal penyediaan pemukiman yang layak dan sehat terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, (3) resesi ekonomi dan tingkat inflasi yang jauh meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin menurunnya daya beli masyarakat, (4) kebijakan dari pemerintah yang masih membolehkan pembangunan kompleks perumahan tipe RS dan RSS tanpa harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti drainase yang memadai, jalan

beraspal, tempat pembuangan sampah dan sistem pembuangan sampah yang sesuai. Komplek pemukiman dengan kondisi seperti ini biasanya berkembang menjadi pemukiman kumuh. Kawasan kumuh dengan kondisi pemukiman yang layak huni akan menghambat peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kota Depok. Karena kualitas sumberdaya manusia diukur dari kompetensi dasar yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan wahana pembinaan bermasyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui pembangunan pemukiman sebagai wadah untuk pendidikan keluarga dan persemaian budaya kearah peningkatan insan mandiri dan penunjang kelancaran proses pembelajaran. Kesenjangan sosial antara yang tinggal kota dan di desa menyebabkan urbanisasi terus terjadi tanpa antisipasi yang baik. Banyaknya kawasan perumahan yang terdapat di daerah resapan air perlu segera di atur. Pada umumnya pemukiman ini terdapat di daerah yang masih banyak pohon atau pinggir sungai. Masyarakat tertarik untuk membuat pemukiman di kawasan sejenis ini karena umumnya harga tanah murah sekali dan biasanya didapatkan dengan cara hanya membersihkan lahan dari pepohonan atau semak belukar. Banyaknya pembangunan komplek perumahan pada kawasan resapan air tersebut terjadi karena belum adanya penetapan kawasan yang menjadi kawasan resapan air serta belum adanya perangkat hukum yang melarang masyarakat membangun di kawasan resapan air. Berkurangnya kawasan resapan air akan menyebabkan terhambatnya gerak air larian ke Drainase kota yang pada akhirnya dapat meningkatkan timbulnya banjir di Kota Depok.

Disamping itu berkurangnya jumlah air yang beresap ke dalam tanah akan mengurangi sumberdaya air dalam tanah. Pembangunan lingkungan pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan. Berkembangannya *real estate*, kawasan pemukiman serta kegiatan perdagangan dan jasa secara tidak terarah mengindikasikan belum efektifnya pengelolaan pemanfaatan lahan sebagaimana telah dibuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. Kegagalan dalam menata dan mentaati konsep penataan ruang dan kawasan kota akan menyebabkan kesemrautan kota. Ini akan berdampak pada semua kegiatan ekonomi dan sosial yang terkait dengan kebijakan tersebut sehingga dapat terkendala perkembangannya.

C. KESEHATAN

Berdasarkan survey yang dilakukan, didapatkan data seperti tercantum dalam Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11. Pentahapan Keluarga Sejahtera

No.	Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus
1.	Sawangan	4.608	7.071	18.532	9.140	2.868
2.	Pancoran Mas	2.491	14.781	23.632	14.467	4.753
3.	Sukmajaya	927	10.956	31.084	21.961	4.887
4.	Cimanggis	418	6.946	36.599	31.982	13.062
5.	Beji	98	3.670	13.625	10.410	1.119
6.	Limo	378	2.415	9.361	15.172	6.196
	Total	8.920	45.839	132.833	103.132	32.885

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2008

Berdasarkan Tabel 3.11 terlihat bahwa di kecamatan di Depok keluarga sejahtera I, II, III, III plus, masih mendominasi sedangkan keluarga sejahtera banyak tersapat di kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, dan Sukmajaya.

Tabel 3.12 . Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Sumber Air Minum

No.	Kota	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya	Sumur Tak Terlindung
1	Depok	6,42%	15,46%	0%	0%	7,46%	0,3%	0,70%

Sumber : Depok Dalam Angka, 2008

Tabel 3.13. Jumlah Kelahiran dan Kematian Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Lahir			Mati		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Beji	455	375	830	247	249	496
2	Sawangan	501	450	975	182	190	372
3	Pancoran Mas	581	636	1.217	354	386	740
4	Sukmajaya	622	619	1.241	254	213	467
5	Cimanggis	421	580	1030	265	309	582
6	Limo	393	338	731	293	192	485

Sumber: Kecamatan dalam Angka 2008

Tabel 3.14. Jumlah Kematian menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

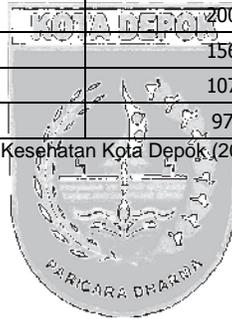
No.	Umur	Jumlah Kematian (jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 14	471	370
2.	15 – 39	403	318
3.	40 – 54	470	462
4.	55 – 64	131	242
5.	> 65	120	147

Sumber: Kota Depok dalam Angka 2008

Tabel 3.15. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita	% terhadap Total Penderita
1.	ISPA	4052	2,8
2.	Penyakit pulpa dan periodontal	2621	1,8
3.	Hipertensi	2493	1,7
4.	Myalgia	1655	1,1
5.	Faringitis	1719	1,2
6.	Diare	1368	0,9
7.	Dermatitis	2006	1,4
8.	Hipertensi	1566	1,0
9.	Batuk	1077	0,7
10.	Sakit kepala	976	0,6

Sumber : Proyeksi dari data Dinas Kesehatan Kota Depok (2008)



D. PERTANIAN

Dinas Pertanian Kota Depok memiliki arahan utama dalam pembangunan di bidang pertanian dengan mengembangkan agribisnis perkotaan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah yang didukung oleh sumberdaya daerah dan pemanfaatan teknologi. Terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan produktif pertanian di perkotaan sehingga kelestarian konservasi lahan dan air tetap terjaga, maka diperlukan kebijakan pemberian fasilitasi kemudahan secara insentif bagi pemilik lahan pertanian dan penggarapnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya keberlangsungan usaha pertanian tetap terjaga dan memiliki manfaat bagi petani.

Dinas Pertanian Kota Depok memiliki beberapa kebijakan untuk meningkatkan agribisnis perkotaan dan pelayanan dalam bidang pertanian. Kebijakan tersebut didukung dengan beberapa upaya yang melibatkan seluruh *stakeholder* melalui penyuluhan, baik bagi petani sawah, perkebunan, petani ikan, maupun peternak sapi dan unggas, dan pemberian pupuk Urea, SP-18, ZA, NPK, dan Organik,

baik bagi sektor pertanian maupun perikanan. Strategi Pemerintah Kota Depok untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan menjamin terlaksananya keamanan pangan melalui pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan, peningkatan layanan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pengawasan terhadap Tempat Pemotongan Hewan (TPH), dalam hal ini ternak sapi. Kegiatan peternakan yang berada di bawah pengawasan Sub-Dinas Peternakan Dinas Pertanian Pemerintah Kota Depok, secara umum telah menunjukkan hasil yang sejalan dengan strategi tersebut. Kondisi tersebut terlihat dari kualitas dan kuantitas produk serta kondisi lingkungan peternakan yang telah berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, mengingat TPH Cisalak juga merupakan salah satu pemasok daging sapi di Kota Depok, dan keseluruhan proses, sejak pemeliharaan sampai dengan pemotongan ternak, turut mempengaruhi kualitas produk, maka dirasakan perlu adanya pengawasan yang lebih intensif, dalam hal kebersihan lingkungannya yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kualitas produk. Sehubungan dengan keberadaan beberapa TPH di Kota Depok, yang kondisinya dapat dikategorikan belum memenuhi standar, maka untuk memudahkan pengawasan dan pengelolannya, saat ini Pemerintah Kota Depok sedang berupaya membangun lagi lokasi RPH di Kecamatan Cimanggis, tepatnya di daerah Tapos. Diharapkan dengan penambahan RPH, Kota Depok kelak dapat mandiri dalam hal suplai daging sapi yang layak dikonsumsi. Selain RPH dan TPH, di Kota Depok terdapat pula lokasi peternakan sapi perah, yang menurut pengamatan, baik kondisi hewan maupun lingkungannya telah memenuhi standar yang disyaratkan bagi usaha susu murni. Kota Depok pun telah memiliki peternakan ayam petelur yang secara umum dapat dikategorikan telah memenuhi syarat. Namun khusus untuk tingkat kebauan yang ditimbulkan, harus tetap diantisipasi dan dikelola secara optimal agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Permasalahan dalam bidang pertanian yang dihadapi saat ini adalah adanya dampak spasial yang diakibatkan oleh peningkatan lahan terbangun di Kota Depok, adalah mutasi lahan dari pertanian menjadi permukiman, yang selanjutnya berakibat pada pengurangan lahan-lahan pertanian. Dalam hal ini diperlukan upaya pengendalian lahan-lahan produktif dengan potensi lahan basah agar tidak cepat terjadi alih fungsi lahan. Hal tersebut mengingat, sampai saat ini terlihat masih banyak dilakukan pembangunan permukiman dan sarana prasarannya yang diantisipasi dalam kurun waktu 15 tahun mendatang, sawah

teknis dan lahan produktif di Kota Depok akan habis berubah menjadi lahan kering karena diperuntukan bagi permukiman, industri, perdagangan, dan jasa. Akibat selanjutnya dari kondisi tersebut adalah Kota Depok tidak dapat berfungsi optimal sebagai kawasan resapan air dan dikawatirkan kondisi ketidakseimbangan ekologis tersebut akan berakibat bencana bagi masyarakat Kota Depok dan sekitarnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kiranya Dinas Pertanian Kota Depok perlu melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan lahan-lahan pertanian menjadi kawasan terbangun secara integratif dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan sebagainya. Beberapa langkah harus ditempuh untuk pengendalian lahan produktif tersebut melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian yang pada prinsipnya adalah alih teknologi yang berwawasan agribisnis dan melakukan upaya konservasi lahan pertanian di Kota Depok.

E. INDUSTRI

Kawasan industri di Kota Depok terletak di Kecamatan Cimanggis. Sebagian besar industri tersebut berdiri sebelum tahun 1982, yaitu sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, sampai dengan tahun 2008 di kawasan industri Kota Depok terdapat kurang lebih 58 industri kecil dan 27 industri menengah sampai dengan besar. Baik industri kecil maupun menengah – besar tersebut, antara lain terdiri dari industri makanan dan minuman, tekstil, garmen, plastik, peralatan teknik, peralatan kedokteran dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel SE-12 dan Tabel SE-13. Selain itu terdapat pula 56 industri penghasil limbah B3 serta dua industri yang mendapat izin dan rekomendasi untuk mengelola dan mengangkut limbah B3. Industri penghasil limbah B3 tersebut antara lain terdiri dari industri penghasil bahan-bahan plastik, farmasi, kimia dasar, laboratorium, dan sebagainya.

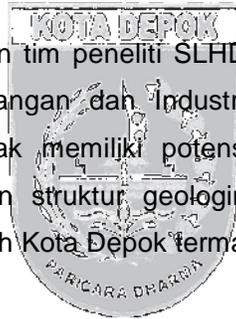
Berdasarkan data yang terkait dengan jumlah dan jenis-jenis industri di Kota Depok, baik yang menghasilkan limbah B3 maupun non-B3, dapat diperkirakan bahwa Kota Depok mempunyai potensi dalam menghasilkan limbah yang

kemungkinan akan mengalami pesat pula sejalan dengan pesatnya peningkatan jumlah penduduknya. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan semakin tingginya pencemaran udara dan air di Kota Depok.

Konsekuensi dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok perlu mengupayakan beberapa langkah, seperti: membatasi perizinan pendirian industri, terutama yang menghasilkan limbah B3, menginstruksikan kepada pemilik industri-industri tersebut untuk secara rutin memantau dan mengelola limbah yang dihasilkan dari proses produksinya, dan menindak tegas dengan memberlakukan sanksi-sanksi kepada pemilik industri yang didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

F. PERTAMBANGAN

Berdasarkan pengamatan tim peneliti SLHD Kota Depok 2009 dan wawancara dengan Dinas Pertambangan dan Industri Kota Depok, diperoleh informasi bahwa Kota Depok tidak memiliki potensi hasil tambang. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan struktur geologinya yang berupa alluvial fan dan secara tata ruang, wilayah Kota Depok termasuk dalam sub-urban.



G. ENERGI

Jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat kota Depok saat ini, didominasi oleh jenis kendaraan roda dua (dengan menggunakan jenis bahan bakar premium sebesar 410.260 buah, kemudian jenis kendaraan bus kecil pribadi sebesar 49.999 buah, dan yang terkecil adalah jenis kendaraan penumpang pribadi sebesar 23.095 buah, sedangkan Jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan bahan bakar solar didominasi oleh jenis kendaraan truk besar sebesar 10.268 buah, kemudian jenis kendaraan bus kecil umum sebesar 542 buah, dan yang terkecil adalah jenis kendaraan beban sebesar 20 buah, untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3.16 berikut

Tabel 3.16. Jumlah Kendaraan menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar Kabupaten/ Kota /Provinsi: Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Tahun Data:

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	
		Premium	Solar
1	Beban	Nihil	20
2	Penumpang pribadi	23.095	Nihil
3	Penumpang umum	Nihil	Nihil
4	Bus besar pribadi	Nihil	Nihil
5	Bus besar umum	Nihil	Nihil
6	Bus kecil pribadi	49.999	Nihil
7	Bus kecil umum	Nihil	542
8	Truk besar	Nihil	10.268
9	Truk kecil	Nihil	Nihil
10	Roda tiga	Nihil	Nihil
11	Roda dua	410.260	Nihil

Keterangan :

Sumber : Depok Dalam Angka, 2008

Jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat kota Depok, saat ini, didominasi oleh jenis kendaraan roda dua (dengan menggunakan jenis bahan bakar premium sebesar 410.260 buah, kemudian jenis kendaraan bus kecil pribadi sebesar 49.999 buah, dan yang terkecil adalah jenis kendaraan penumpang pribadi sebesar 23.095 buah, sedangkan Jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan bahan bakar solar didominasi oleh jenis kendaraan truk besar sebesar 10.268 buah, kemudian jenis kendaraan bus kecil umum sebesar 542 buah, dan yang terkecil adalah jenis kendaraan beban sebesar 20 buah,

Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat kota Depok untuk kendaraan bermotor (roda dua dan lebih) saat ini di Kota Depok didominasi oleh jenis bahan bakar premium sebesar 1.230 kiloliter/bulan, kemudian jenis bahan bakar solar sebesar 1.140 kiloliter/bulan dan jenis bahan bakar yang terkecil adalah pertamax sebesar 820 kiloliter/bulan yang tersebar di 41 buah SPBU di Kota Depok. Penyebaran lokasi SPBU dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tiap kecamatan adalah Kecamatan Cimanggis dengan jumlah SPBU 13 buah, penjualan BBM jenis premium sebesar 390 kl liter, solar sebesar 350 kl liter, dan pertamax sebesar 260 kl liter; Kecamatan Pancoran Mas dengan jumlah SPBU 7 buah, penjualan BBM jenis premium sebesar 210 kl liter, solar

sebesar 140 kl liter, dan pertamax sebesar 210 kl liter; Kecamatan Sawangan dan Sukmajaya masing-masing jumlah SPBU 7 buah, penjualan BBM jenis premium sebesar 180 kl liter, solar sebesar 180 kl liter, dan pertamax sebesar 120 kl liter; Kecamatan Limo dengan jumlah SPBU 5 buah, penjualan BBM jenis premium sebesar 150 kl liter, solar sebesar 100 kl liter, dan pertamax sebesar 100 kl liter; Kecamatan Beji dengan jumlah SPBU 4 buah, penjualan BBM jenis premium sebesar 120 kl liter, solar sebesar 120 kl liter, dan pertamax sebesar 80 kl liter; untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17. Jumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) Rata-rata Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kota: Depok, Tahun Data : 2009

a No h	Lokasi SPBU (Kecamatan)	Penjualan per Bulan (Kiloliter)			Jumlah
		Premium	Pertamax	Solar	
u 1	Sawangan	180	120	180	6
n 2	Pancoran Mas	210	140	210	7
3	Sukmajaya	180	120	180	6
D 4	Cimanggis	390	260	350	13
a 5	Beji	120	80	120	4
t 6	Limo	150	100	100	5
	Jumlah	1.230	820	1.140	41

Keterangan :

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Depok

Penggunaan bahan bakar yang digunakan oleh penduduk kota Depok untuk memasak saat ini didominasi oleh jenis bahan bakar LPG setelah diberlakukannya pengalihan jenis bahan bakar dari minyak tanah ke LPG sesuai dengan Program Pemerintah Pusat. Penggunaan jenis bahan bakar LPG yang terbesar di Kota Depok, berada di Kecamatan Cimanggis sesuai dengan besarnya jumlah Rumah Tangga (RT) yang ada rata-rata sebesar 989.736 kg/bulan, kemudian Kecamatan Sukmajaya sebesar 840.792 kg, kecamatan Pancoran Mas sebesar 660.252 kg, Kecamatan Sawangan sebesar 407.340 kg, Kecamatan Limo sebesar 367.056 kg, sedangkan yang terkecil sesuai dengan jumlah Rumah Tangga (RT) yang ada adalah Kecamatan Beji rata-rata sebesar 343.656 kg/bulan. Adapun penggunaan bahan bakar selain jenis LPG per kecamatan rata-rata tidak terdeteksi (teridentifikasi), untuk lebih jelasnya lihat Tabel SE-18 berikut.

Tabel 3.18. Jumlah Rumah Tangga dan Penggunaan Bahan Bakar untuk Memasak, Kota: Depok Tahun Data: 2008

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jenis Bahan Bakar			
			LPG	Minyak Tanah *	Briket*	Biomassa*
1	Sawangan	33.945	407.340	Nihil	Nihil	Nihil
2	Pancoran Mas	55.021	660.252	Nihil	Nihil	Nihil
3	Sukmajaya	70.066	840.792	Nihil	Nihil	Nihil
4	Cimanggis	82.478	989.736	Nihil	Nihil	Nihil
5	Beji	28.638	343.656	Nihil	Nihil	Nihil
6	Limo	30.588	367.056	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan : * Tidak ada Data

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, 2008.

Tabel 3.19. Panjang Jalan menurut Kewenangan Kabupaten/Kota /Provinsi: Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Tahun Data:

No	Jenis Kewenangan	Panjang Jalan (Km)	Persentase (%)
1	Jalan Nasional	14,310	2,73
2	Jalan Provinsi	20,990	4,01
3	Jalan Kabupaten	Nihil	Nihil
4	Jalan Kota	488,725	93,26
	Jumlah	524,025	100,0

Keterangan :

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2008

H. TRANSPORTASI

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Depok memiliki visi: 'peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, lancar, tertib dan teratur guna mendorong perwujudan kesejahteraan masyarakat'. Selain itu, misi instansi tersebut adalah:

- Mewujudkan manajemen lalu lintas yang komprehensif;
- Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai;
- Mewujudkan sistem jaringan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh wilayah; dan
- Meningkatkan pelayanan administrasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka membantu peningkatan pendapatan daerah.

Adapun tugas pokok instansi tersebut adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara itu DLLAJ Kota Depok memiliki fungsi sebagai berikut:

- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pemeberian perijinan dn pelaksanaan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Pengelola urusan ketata-usahaan.

Keberhasilan dalam menjalankan visi misi serta tupoksi DLLAJ Kota Depok ditentukan oleh beberapa faktor penunjang, antara lain:

1. Volume Lalu Lintas dan Tingkat Pelayanan Jalan

i. Volume lalu lintas

Manajemen transportasi disesuaikan dengan peruntukan masing-masing jalan. Khusus yang berkaitan dengan transportasi jalan raya adalah persimpangan sebidang yang terdapat sepanjang jalan-jalan yang ada di Kota Depok. Persimpangan sebidang mempunyai potensi terjadinya kemacetan dan antrian kendaraan terutama pada kondisi jam puncak seperti yang terjadi di sepanjang ruas jalan Margonda Raya, ruas jalan Raya Bogor, ruas jalan Sawangan, ruas jalan Pramuka, ruas jalan Pangkalan jati, ruas jalan Gas Alam, ruas jalan Dewi Sartika, ruas jalan Kartini dan sebagainya.

j. Kondisi geometris jalan

Geometris jalan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat kinerja jalan. Kondisi geometris yang disurvei merupakan kondisi persimpangan dengan tingkat potensi terjadinya kemacetan cukup tinggi. Lokasi-lokasi pengamatan kondisi geometris jalan sama dengan lokasi survei volume lalu lintas.

d. Tingkat kinerja

Kinerja jalan ditunjukkan oleh tingkat pelayanannya (*Level of Service* = LOS, US IHCM 1994) yang ditentukan berdasarkan nilai kuantitatif, seperti: Derajat Kejenuhan (DS) kecepatan perjalanan serta nilai kualitatif seperti: kebebasan pengemudi dalam bergerak/memilih kecepatan, derajat hambatan lalu lintas, dan kenyamanan dalam mengemudi.

Derajat Kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas digunakan sebagai faktor utama dalam penilaian tingkat kinerja ruas jalan, karena nilai DS menunjukkan adanya permasalahan ruas jalan terhadap kapasitasnya. Berdasarkan standar IHCM apabila $DS < 0,8$ menunjukkan kondisi ruas jalan stabil; $DS 0,8-1$ menunjukkan kondisi ruas jalan tidak stabil; dan $DS > 1,0$ menunjukkan kondisi ruas jalan yang kritis atau telah terjadi kemacetan.

e. Kecepatan Perjalanan

Kondisi lalu lintas pada suatu jaringan jalan selain ditunjukkan oleh besarnya volume lalu lintas juga dapat ditunjukkan oleh kecepatan rata-rata kendaraan (*average travel speed*) pada suatu ruas jalan. Parameter kecepatan dan waktu tempuh, akan berpengaruh pada tingkat pelayanan (LOS) suatu ruas jalan. Kecepatan arus bebas sesungguhnya dan kecepatan sesungguhnya pada ruas jalan yang diperkirakan terkena dampak kegiatan.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap kondisi lalu lintas di jalan-jalan sekitar di Kota Depok, menghasilkan ITP (Indeks Tingkat Pelayanan) dapat diartikan sebagai berikut:

- ITP A: Kondisi arus lalu lintasnya bebas satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, besarnya kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pengemudi dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan.
- ITP B: Kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan masih hambatan oleh kendaraan disekitarnya.
- ITP C: Kondisi arus lalu lintas masih dalam stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan kendaraan lain semakin besar.

- ITP D: Kondisi arus lalu lintas mendekati tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.
- ITP E: Pada tingkat pelayanan ini arus lalu lintas berada dalam kendaraan dipaksakan, kecepatan relatif rendah, arus lalu lintas sering terhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.
- ITP F: Arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah, arus lalu lintas sering terhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya Kota Depok, tentang volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp), V/C Ratio pada jam sibuk (*peak hours*) di beberapa ruas jalan-jalan yang ada di Kota Depok ditampilkan dalam Tabel

Tabel 3.10. Volume Lalulintas dan V/C Ratio 10 Ruas Jalan di Kota Depok

No	Nama Ruas Jalan	Kapasitas	Volume			V/C Ratio	Peak Hours
			A - B	B - A	Total		
1	Margonda Raya	5.951	3.099,71	1.707,49	4.807,20	0,81	07.00 – 08.00
2	Parung	3.372	1.277,66	1.126,47	1.404,13	0,71	06.45 – 07.45
3	Raya Sawangan	2.472	716,57	1.226,67	1.943,24	0,79	07.00 – 08.00
4	Pramuka	1.608	216,71	207,61	424,32	0,26	06.15 – 07.15
5	Pangkalan Jati	2.448	403,26	1.031,84	1.435,10	0,59	06.15 – 07.15
6	Lefran Pane	1.495	198,23	613,48	811,71	0,54	13.00 – 14.00
7	Raya Bogor	4.080	1.499,64	2.218,29	3717,93	0,91	18.00 – 19.00
8	Gas Alam	1.641	273,21	350,12	623,33	0,38	17.00 – 18.00
9	Kemakmuran	2.726	639,30	637,69	1.276,99	0,47	06.15 – 07.15
10	Kartini	3.576	1.1311,68	737,05	2.048,73	0,57	06.30 – 07.30

Sumber : Hasil Analisis 2008
Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya Kota Depok

Dalam RTRW Prasarana transportasi yang dikembangkan meliputi prasarana untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor, angkutan kereta api, penyeberangan, angkutan darat yang dikembangkan sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, dan nasional. Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. tersusun jaringan sistem transportasi yang efisien & efektif;
- b. meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- c. terselenggaranya pelayanan angkutan yang aman, tertib, nyaman, teratur, lancar dan efisien;

- d. terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang sesuai dengan perkembangan sarana angkutan dan teknologi transportasi angkutan barang;
- e. meningkatnya keterpaduan baik antara sistem angkutan laut, udara dan darat maupun antar moda angkutan darat;
- f. meningkatnya disiplin masyarakat pengguna jalan dan pengguna angkutan

Sistem transportasi di Kota Depok dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan untuk pembangunan jaringan jalan berdasarkan Keputusan WaliKota Depok, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. kebutuhan transportasi kota;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. keterpaduan dengan jaringan jalan tol, arteri, dll;
- d. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
- e. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
- f. keselamatan dan kelancaran operasi kendaraan bermotor;
- g. pertumbuhan ekonomi;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. keamanan.

Sejalan dengan pengembangan sistem transportasi kota, maka konsep struktur jaringan jalan yang akan dikembangkan adalah menghubungkan pusat dengan sub pusat dan rencana sub pusat melalui jaringan jalan arteri primer (Nas) yang dihubungkan dengan jalan kolektor primer (Nas & Prov) yang merupakan kumpulan dari jalan arteri dan kolektor sekunder (Kota).

Namun dalam menjalankan visi misi serta tupoksinya, DLLAJ Kota Depok menemukan beberapa permasalahan yang harus dapat diatasi semaksimal mungkin, mengingat jumlah kendaraan di Kota Depok yang semakin meningkat, yang akan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan panjang jalan, yang selanjutnya akan mengakibatkan kondisi seperti:

- a. Kesemrawutan Kota Depok yang kian parah;
- b. Kemacetan di Kota Depok akan bertambah luas dan parah;
- c. Pencemaran udara semakin parah;
- d. Keresahan dan kriminalitas meningkat.

Dalam rangka memecahkan masalah pemanfaatan ruang yang tidak konsisten di Kota Depok, upaya penanggulangan dan pencegahan (*Response*) dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu:

- a. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan pemanfaatan ruang, realisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok;
- b. Mengkaji ulang perencanaan Kota Depok dengan mengikutsertakan masyarakat/aspirasi masyarakat dan menggunakan data/informasi yang detail dan akurat;
- c. Mengkaji ulang tata ruang Kota Depok yang lebih berwawasan lingkungan;
- d. Mengalokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah seperti pengadaan foto udara dan citra satelit resolusi tinggi;
- e. Mengarahkan perkembangan fasilitas kota sesuai sub-pusat kawasan pengembangan pada lokasi yang direncanakan dalam RTRW;
- f. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap implementasi pemanfaatan izin lokasi untuk memanfaatkan ruang atau lahan yang telah ada sebagai pemukiman;
- g. Melaksanakan peningkatan kompetensi dan kinerja dari SDM pada unit kegiatan *leading sector* perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok yang dilakukan melalui pendidikan, kursus/pelatihan dan penanaman disiplin kerja;
- h. Melakukan sosialisasi RTRW di Kota Depok agar dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih proaktif antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Melakukan penegakan hukum (*Legal Standing*) bagi para pelaku kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan ruang dan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Depok;
- j. Bekerjasama dengan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi dan LSM Kota Depok dan sekitarnya yang bergerak dalam bidang lingkungan guna mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien dalam perencanaan pemanfaatan ruang;
- k. Melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penataan permukiman berdasarkan daya dukung fisik dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai karakteristik kawasan setempat (*local strategy management*);

- I. Mempertahankan persentase ruang terbuka hijau agar tidak mengalami penurunan akibat alih fungsi pemanfaatan ruang, dengan melakukan pengawasan yang ketat dan sanksi hukum yang tegas;

Minimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh inkonsistensi RTRW hingga saat ini belum optimal, hal ini disebabkan karena:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses monitoring pengendalian pemanfaatan ruang atas ijin-ijin yang telah diberikan;
- b. Penyimpangan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Ruang, Site Plan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta;
- c. Tingkat kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan ruang, realisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok;
- d. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Depok dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok;
- e. Tidak adanya struktur lembaga-lembaga monitoring dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.

Adapun masalah yang dihadapi dalam sistem transportasi yang terjadi di Kota Depok, seperti: kemacetan terutama di daerah yang terdapat jalan simpang sebidang, baik antara jalan dengan jalan maupun jalan dengan rel kereta api seharusnya mempunyai kepadatan rendah menjadi kepadatan tinggi atau sangat tinggi, disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Terbatasnya prasarana jalan sebagai penghubung jalan kolektor, arteri yang ada
- b. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan per tahun yang tidak sebanding dengan panjangnya prasarana jalan yang ada
- c. Banyaknya terdapat jalan dalam kategori simpang sebidang, hal ini sebagai salah satu sumber penyebab terjadinya kemacetan lalulintas (lihat Tabel ...)
- d. Masih rendahnya sikap disiplin berlalulintas di jalan bagi para pengguna jalan raya (pengemudi kendaraan bermotor terutama angkutan umum)

Dalam menetapkan rencana sistem jaringan transportasi, maka ditetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut:

SASARAN :

- Peningkatan efisiensi pergerakan lalu lintas jalan raya
- Peningkatan aksesibilitas lalu lintas jalan raya
- Peningkatan layanan antar moda transportasi

STRATEGI :

- Restrukturisasi jaringan jalan
- Pengembangan prasarana jalan
- Pengembangan terminal bus
- Pengembangan prasarana stasiun KA
- Optimalisasi layanan angkutan umum

I. PARIWISATA

Sebagai Kota Metropolitan, Kota Depok memiliki beberapa wilayah strategis yang berpotensi menunjang pariwisata baik wisata alamiah, budaya, maupun religius. Kawasa wisata tersebut sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Limo. Adapun kawasan cagar budaya peninggalan zaman penjajahan Belanda berupa rumah tinggal Nyai Dasimah dapat ditemui di Pusat Perbelanjaan Margo City. Selain itu terdapat pula beberapa situ yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Depok yang telah dinormalisasi, yang selanjutnya dapat dijadikan obyek wisata, berupa kolam pemancingan, wisata sepeda air dan saung-saung

J. LIMBAH B3

Pencemaran oleh limbah B3 di Kota Depok dapat dijumpai dalam bentuk cair, padat, maupun gas limbah B3 bersifat kumulatif, sehingga dampaknya baru akan terjadi di Kota Depok beberapa tahun kemudian.

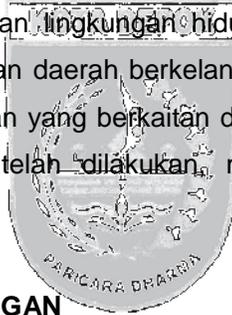
Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok dapat mengupayakan beberapa langkah, seperti :

- a. Membatasi IPR untuk perizinan pendirian industri.
- b. Membatasi perizinan angkutan umum
- c. Uji emisi secara rutin terhadap angkutan pribadi dan angkutan umum

BAB IV

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Depok dalam mengendalikan berbagai perubahan lingkungan selama tahun 2008, secara umum telah memberikan hasil yang cukup berarti dalam mengendalikan perubahan kualitas lingkungan, agar tidak menuju ke arah yang tidak diinginkan. Namun usaha yang telah ada masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama dalam menerapkan berbagai peraturan perundangan lingkungan hidup secara nyata terhadap setiap orang yang telah melakukan perubahan lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, disamping itu tindak lanjut ke depan diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pendanaan yang cukup dan memadai dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan atas pembahasan terhadap kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, analisis isu pokok lingkungan serta evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan, kondisi, tekanan, status dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan, maka dapat diagendakan upaya pengelolaan sbb. :



A. REHABILITASI LINGKUNGAN

Rencana yang akan dilakukan untuk Reboisasi, Penghijauan dan Kegiatan Fisik lainnya yang terkait dengan Perbaikan Kondisi Lingkungan adalah sbb:

1. Melakukan revegetasi dan reboisasi areal atau kawasan yang memiliki penutupan tajuk vegetasi jarang.
2. Perlindungan dan penataan kawasan hutan kota dan taman kota
3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya pelestarian sumberdaya lahan.
4. Pemantapan ruang lahan untuk budidaya pertanian dan perkebunan pada *catchment area* terutama menyangkut luas berdasarkan faktor daya dukung lingkungan setempat
5. Melakukan pengawasan terhadap upaya perubahan fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
6. Penggunaan metode yang tepat dalam melakukan rehabilitasi dan pemanfaatan lahan kritis untuk dapat dipergunakan sebagai areal pertanian dan perkebunan yang produktif.



7. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait dalam pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan peruntukannya
8. Perlu alternatif dalam pembangunan pemukiman penduduk, agar tidak memanfaatkan lahan produktif
9. Menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Tanah dan Larangan Pemanfaatan Lahan Produktif untuk keperluan lain.
10. Melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui program reboisasi dan penghijauan terutama melalui Program Gerhan /GNRHL, Kampanye Indonesia Menanam sejuta pohon, Program Bank Pohon, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
11. Melibatkan peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Realisasi Kegiatan Reboisasi, Penghijauan dan Kegiatan Fisik Lainnya terkait dengan Perbaikan Kondisi Lingkungan adalah sbb:

1. Menanam pohon produktif di Hutan Kota Kampus UI, oleh perwakilan murid-murid Sekolah Dasar di Jabotabek, dengan sumbangan pohon-pohon dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rektor Universitas Indonesia dan lainnya, pada saat memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa.



Gambar : Kegiatan penanaman pohon produktif oleh murid-murid SD di Jakarta, Bogor dan dihadiri oleh Meneg LH serta UI dan Pemkot Depok.
Lokasi : Hutan Lindung Kampus UI Depok



2. Sejak tahun 2002 Dinas Pertanian Kota Depok telah melakukan pemanfaatan lahan di sekitar Kota Depok seluas 20.029 ha, seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Jenis Pemanfaatan Lahan di Kota Depok

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	LUAS (Ha)				
		Tahun 2002	Tahun 2004	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Hutan/Veg. Hutan	2.088.00	897.68	414,60	410,58	410,58
2	Semak belukar	1.266.14	765.35	3.723,80	3.658,76	3.640,33
3	Kebun	4.608.47	5.055.79	2.781,07	2.728,04	2.693,62
4	Rumput	753.97	516.24	573,38	567,36	554,79
5	Sawah	1.228.25	455.85	943,35	943,34	939,58
6	Lahan kering/ladang	3.665.11	3.205.38	1.430,08	1.430,07	1.415,32
7	Lahan terbangun	6.054,99	8.196,96	9.968,44	10.098,57	10.190,78
8	Badan air	342,32	837,55	168,24	168,24	168,24
9	Lahan terbuka	21,75	98,19	26,04	24,04	15,76
Luas Total		20.029.00	20.029.00	20.029.00	20.029.00	20.029.00

Sumber : Analisis Tin Penyusun berdasarkan Data IPR, 2009

B. AMDAL

Rekomendasi AMDAL yang telah diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Depok terhadap beberapa kegiatan yang diwajibkan membuat dokumen AMDAL dan UKL UPL sudah sebanyak 27 dokumen yang terdiri dari 7 buah dokumen AMDAL dan 18 buah dokumen UKL UPL serta 2 buah dokumen pengembangan RKL RPL. Sebagian besar adalah kegiatan dari PT. PLN yaitu sebanyak 10 buah terdiri dari dokumen AMDAL, UKL UPL dan pengembangan RKL RPL. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.** Dokumen AMDAL, UKL UPL yang telah mendapat Rekomendasi tahun 2008

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1.	UKL UPL	PT. ICI Paints Indonesia Cimanggis Plant	
2.	UKL UPL	SPBU	PT. Pertamina
3.	UKL UPL	Perumahan Alam Asri	
4.	UKL UPL	PT. Tegar Metalindo Lestari	
5.	UKL UPL	Perumahan Tugu Tanah Baru Town House	
6.	UKL UPL	PT. Pertonas Niaga Indonesia	
7.	UKL UPL	PT. Tegar Metalindo Lestari	
8.	UKL UPL	PT. Arista Auto Prima / Showroom	
9.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
10.	RKL RPL	PT. PLN (Persero)	
11.	UKL UPL	PT. PLN (Persero)	
12.	RKL RPL	PT. PLN (Persero)	
13.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
14.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
15.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
16.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
17.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
18.	AMDAL	PT. PLN (Persero)	
19.	UKL UPL	Pembangunan Fly Over JI. Dewi Sartika	Dinas Pekerjaan Umum
20.	UKL UPL	SPBU	PT. Pertamina
21.	UKL UPL	SPBU	PT. Pertamina
22.	UKL UPL	PT. Henkel Indonesia	
23.	UKL UPL	PT. Sterling Product Indonesia	
24.	UKL UPL	PT. Tokai Dharma Indonesia – Industri Korek Api Gas	
25.	UKL UPL	SPBU	PT. Pertamina
26.	UKL UPL	Pasar Segar	
27.	UKL UPL	PT. Squibb-Myers	

Sumber: BLH Kota Depok, 2009

Terhadap kegiatan yang diharuskan membuat UKL UPL akan dilakukan pengawasan atau monitoring pada saat konstruksi dan pasca konstruksi nanti, bila proyek-proyek tersebut sedang melakukan konstruksi. Salah satu proyek UKL UPL yang saat ini sedang membangun adalah Pasar Segar dan saat ini sedang persiapan melakukan pengawasan/monitoring.

C. PENEGAKAN HUKUM

Mengenai masalah lingkungan di Kota Depok terlihat masih adanya pengaduan dari masyarakat terhadap beberapa industri yang membuang limbah cairnya ke Badan Sungai antara lain adalah PT Enzym, PT Indo Fermex dan PT Sadetex.

Hal ini mengindikasikan bahwa ke tiga industri tersebut masih belum mematuhi Undang-undang Lingkungan Hidup. Bila telah mencemari lingkungan hidup akan dikenakan denda atau hukuman penjara. Untuk kasus ini oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Depok sudah diberikan peringatan kepada ke tiga industri tersebut untuk membuat water treatment terlebih dahulu sebelum limbah cairnya dibuang ke badan sungai. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum dipatuhi maka akan dikenakan sanksi. Oleh sebab itu perlu penegakan supremasi hukum secara lugas, konsisten dan berkeadilan terhadap pelaku perusakan maupun pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kepastian hokum merupakan prinsip utama dalam dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kepastian hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sedangkan bagi dunia usaha akan memberikan jaminan keamanan terhadap investasinya. Untuk Pemda Depok sendiri kepastian hukum dapat menjamin konsistensi pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dan bertanggung jawab.

D. PERAN SERTA MASYARAKAT

1. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan

Demi terpeliharanya lingkungan yang sehat masyarakat Kota Depok telah melakukan beberapa upaya perbaikan lingkungan antara lain melaksanakan Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan yang diprakarsai oleh beberapa Dinas terkait di lingkungan Pemda Kota Depok. Selain itu kepada masyarakat diberikan pula kesempatan untuk turut berperan aktif dalam pengembangan pola pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh perluasan akses dan hak kontrolnya terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup sangat penting dan perlu ditingkatkan terus melalui program pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan fisik perbaikan kualitas lingkungan yang telah dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan di Kota Depok, tahun 2008



No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Perbaikan jalan	Kecamatan Cimanggis, Kel. Cilangkap RW 16	Dinas BM & SDA
2.	Posyandu, MCK, Perbaikan fisik Rumah Sehat		Pemberdayaan Perempuan
3.	Ikan, Tanam Sayur, Apotek hidup		Dinas Pertanian
4.	Penghijauan menanam pohon & gemar menanam waluh		BLH
5.	Kampus & UPS		DKP
6.	PSN, Gizi buruk, PHBS, Rumah Sehat, Layak Huni		Dinas Kesehatan
7.	PAUD		Dinas Pendidikan

2. Kegiatan Pengelolaan Situ-situ melalui Forum Komunikasi Masyarakat Situ (FKMS)

Dalam rangka upaya pemanfaatan dan pengelolaan Situ-situ yang ada di sekitar Depok, maka peranserta masyarakat diikuti sertakan dengan turut melibatkan Masyarakat Sekitar Situ (MSS). Guna tercapainya pengelolaan Situ tersebut telah dibentuk suatu forum masyarakat yang disebut Forum Komunikasi Masyarakat Situ (FKMS) yang beranggotakan masyarakat yang berada di sekitar Situ yang bersangkutan. Saat ini baru ada 3 buah FKMS yang terbentuk yaitu FKMS di Situ Bojongsari, Situ Citayam dan Situ Rawa Besar.

Pemanfaatan Situ yang saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan usaha perikanan seperti membuat keramba, jaring apung dan pemancingan. Usaha lain yang akan dirintis adalah usaha wisata air, dan sudah ada Situ yang melaksanakan wisata air seperti Situ Citayam, kemudian Situ Rawa Besar sedang merintis kearah wisata air. Hampir seluruh keramba ikan sudah ditertibkan dan di tepi Situ telah juga telah dibersihkan.

E. Kelembagaan

Pemerintah Kota Depok perlu mengendalikan dampak lingkungan melalui penegakkan aturan pemanfaatan lingkungan dan pengawasan pembangunan serta pembinaan terhadap kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Untuk mengendalikan dampak lingkungan dibutuhkan koordinasi pembangunan yang baik antar instansi pemerintah serta kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Untuk itu



Pemerintah Kota Depok telah menghasilkan produk hukum berupa 2 buah Perda mengenai Perangkat Daerah dan Tupoksi BLH Kota Depok. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4. Produk Hukum Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kota Depok

No.	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1.	Perda	08	2008	Perangkat Daerah
2.	Perda	36	2008	Tupoksi DLH Kota Depok

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan serta upaya peningkatan program pembangunan di masa mendatang, tentu sangat diperlukan anggaran untuk terealisasinya pengelolaan lingkungan dan program pembangunan tersebut. Dalam hal ini anggaran pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun 2008 telah diperoleh dari APBD sebesar Rp.39.304.531.811,-. Dari sejumlah tersebut kemudian Rp.13.128.055.750,- digunakan untuk peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPA beserta sarana penunjangnya. Selain itu juga sebesar Rp. 694.885.100,- digunakan untuk pengendalian banjir dan selebihnya sebesar Rp. 25.481.590.960,- digunakan untuk peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.5. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok, tahun 2008

No.	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran	
		Tahun 2008	
1.	APBD	1. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPA beserta sarana penunjang sebesar	Rp. 13.128.055.750,-
		2. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup sebesar	Rp. 24.121.046.360,-
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup sebesar	Rp. 1.360.544.600,-
		4. Pengendalian Banjir sebesar	Rp. 694.885.100,-
2.	APBN		Rp.
3.	Bantuan Luar Negeri		Rp.
Total			Rp. 39.304.531.811,-

Dalam rangka upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan yang lebih kontinyu. Untuk itu diperlukan pejabat pengawas



lingkungan hidup yang kompeten dan benar-benar menguasai serta memahami persoalan lingkungan hidup. Pertimbangan ekologi dalam setiap pembangunan yang akan dilaksanakan harus masuk dalam perencanaan pembangunan, jadi setiap pelaku pengambil keputusan khususnya personil di bidang lingkungan hidup maupun pelaku kegiatan pembangunan tidak hanya ingin mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja. Dengan adanya pertimbangan ekologi diharapkan mutu pencapaian pembangunan dapat meningkat dan aktifitas pembangunan pada sumberdaya dan proses lingkungan yang lebih luas dapat diperhitungkan. Oleh sebab itu pula maka pada sumberdaya manusia yang mengelola lingkungan hidup perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pengelola lingkungan yang baik.

Tabel 4.6. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Kota Depok, tahun 2008.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Doktor (S3)		
2.	Master (S2)	3	2
3.	Sarjana (S1)	8	5
4.	Diploma (D3/D4)	1	-
5.	SLTA	1	-
6.	SMP	2	
Total		15	7



DAFTAR PUSTAKA

- Bapeda Kota Depok, 2007. Laporan Akhir Penyusunan Strategi Ruang Terbuka Hijau Kota Depok Tahun 2007. Bapeda Kota Depok, Depok.
- BLH Kota Depok, 2009. Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kota Depok 2009. Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, Depok.
- Dinas Pertanian Kota Depok 2006. Kajian Mekanisme Insentif Bagi Pemilik Lahan Sawah. Dinas Pertanian Kota Depok.
- DKLH Kota Depok 2006. Kajian Ekologis DAS Ciliwung Kota Depok: Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi di DAS Ciliwung Kota Depok. DKLH Kota Depok, Depok.
- DKLH Pemkot Depok & Lempalhi 2006. Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran Sungai Ciliwung di Depok. DKLH Pemkot Kota Depok & Lempalhi, Depok.
- DLLAJ Kota Depok, 2007. Profil Transportasi Kota Depok. DLLAJ Kota Depok, Depok.
- Pemda Kota Depok No. 07 Tahun 2008. tentang Urusan Penetapan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok. Bagian Hukum Setda Depok, Depok 2008.

Gambar 2.21.	Konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di Beberapa Situ di Depok, 2009	II-56
Gambar 2.22.	Nilai pH di Beberapa Sungai di Depok, 2009	II-57
Gambar 2.23.	Konsentrasi TDS dan TSS di Beberapa Sungai di Depok, 2009	II-58
Gambar 2.24.	Konsentrasi Nitrat dan Nitrit di Beberapa Sungai di Depok, 2009	II-59
Gambar 2.25.	Konsentrasi BOD, dan COD di Beberapa Sungai di Depok, 2009	II-60
Gambar 2.26.	Konsentrasi Total Fosfat di Beberapa Sungai di Depok, 2009	II-61
Gambar 2.27.	Konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di Beberapa Sungai di Depok, 2009	II-63
Gambar 2.28.	Konsentrasi SO ₂ di Beberapa Lokasi di Depok, 2009	II-66
Gambar 2.29.	Konsentrasi NO ₂ di Beberapa Lokasi di Depok, 2009	II-66
Gambar 2.30.	Konsentrasi CO di Beberapa Lokasi di Depok, 2009	67
Gambar 2.31.	Konsentrasi Partikulat di Beberapa Lokasi di Depok, 2009	II-67
Gambar 2.32.	Nilai Kebisingan di Beberapa Lokasi di Depok, 2009	II-68
Gambar 3.1.	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Sawangan Kota Depok Tahun 1998 – 2008	III-2
Gambar 3.2.	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 1998-2008.	III-3
Gambar 3.3.	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Tahun 1998-2008.	III-3
Gambar 3.4.	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun 1998-2008.	III-4
Gambar 3.5.	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Beji Kota Depok Tahun 1998-2008.	III-4
Gambar 3.6.	Grafik Jumlah Penduduk Kecamatan Limo Kota Depok Tahun 1998-2008.	III-5
Gambar 3.7.	Grafik Laju pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 1998-2008.	III-8
Gambar 3.8.	Grafik Rencana dan Proyeksi Pemanfaatan Ruang 2005-2025	III-11
Gambar 4.1.	Kegiatan penanaman pohon produktif oleh murid-murid SD di Jakarta, Bogor dan dihadiri oleh Meneg LH serta UI dan Pemkot Depok. Lokasi: Hutan Lindung Kampus UI Depok	IV-3